



PROSIDING  
**SEMINAR  
INTERNASIONAL  
PKA-8**  
TAHUN 2023



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

PROSIDING

**SEMINAR  
INTERNASIONAL  
PKA-8**

TAHUN 2023



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

**Narasumber :**

**Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D**

(Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat)

**Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ozay**

(International Islamic University Of Malaysia)

**Prof. Amirul Hadi, MA, Ph.D**

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

**Sanusi M. Syarie, SE, M.Phil**

(Yayasan Rumpun Bambu Indonesia)

**Aris Faisal Djamin, SH**

(Peneliti Sejarah)

**Assoc. Prof. Sher Banu A.L Khan, Ph.D**

(National University Of Singapore)

**Laila Abdul Jalil, S.S., MA**

(Arkeolog/Peneliti/BRIN)

**Hermansyah M.Th., M.Hum**

(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

**Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc**

(Institut Pertanian Bogor)

**Syaifullah Agam, SE, M.Ec, Ph.D**

(Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI)

**Ir. Cut Huzaimah, MP**

(Dinas Pertanian Aceh)

**Assoc. Prof. Mohd. Affendi bin Moh.d Shafri, M. Res, Ph.D**

(International Islamic University Of Malaysia)

**Wiliam Wongso**

(Pakar Kuliner Indonesia)

**Satria Wira, Se, MM**

(Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh)

## Kata Sambutan

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Salah satu wadah untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan, serta melestarikan khasanah kebudayaan Aceh adalah melalui event Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Sejak dimulai pertama kali pada tahun 1958, Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan tujuh kali event PKA. Dalam event PKA ini seluruh khasanah kebudayaan etnis di Aceh di tampilkan baik dalam bentuk pertunjukan maupun perlombaan dengan melibatkan partisipasi seluruh kabupaten/kota di Aceh

Salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam event Pekan Kebudayaan Aceh adalah seminar kebudayaan. yang mengeksplorasi dinamika kebudayaan Aceh dengan segala aspek dan khasanahnya, dengan melibatkan para pembicara pakar dan pemerhati kebudayaan baik lokal, nasional, dan internasional.

Untuk PKA-8 tahun 2023 ini, kegiatan seminar kebudayaan juga akan diselenggarakan dengan tema khusus dan berbeda dengan tema-tema seminar PKA sebelumnya yaitu sejarah dan peluang ekonomi rempah.

Aceh adalah titik terpenting yang tak terbantahkan peran, kontribusi, dan posisi strategisnya baik dilihat dari dimensi kesejarahan maupun ekonomi. Beranjak dari jejak historis di atas dan sejalan dengan momentum dan dalam rangka menyukseskan program nasional jalur rempah nusantara dimana Aceh menjadi salah satu titik terpentingnya, maka seminar internasional PKA-8 tahun 2023 ini mengambil tema sentral : "Rempah : Latar Sejarah dan Peluang Ekonomi Masa Depan". Dalam rangka semangat kesinambungan antara dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, tema di atas dibagi lagi dalam sub-tema, yaitu sub tema "Jejak Sejarah Jalur Rempah" dan sub tema "Peluang Masa Depan Ekonomi Rempah".

Materi-materi dari dua sub tema ini dipaparkan oleh para pembicara internasional, nasional, dan lokal dalam seminar internasional PKA-8 tahun 2023, di dua tempat yaitu auditorium Ali Hasyimi UIN Ar-Raniry dan auditorium AAC Dayan Dawood Univerisitas Syiah Kuala. Materi-materi seminar inilah yang kemudian dirangkum dalam buku "Prosiding Hasil Seminar PKA-8 Tahun 2023" ini. Selain bentuk dokumentasi kehadiran prosiding ini diharapkan juga dapat memperkaya referensi dan perspektif kita akan sejarah dan peluang masa depan ekonomi rempah, baik dalam lingkup Aceh maupun Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Banda Aceh, Oktober 2023  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,



**Almuniza Kamal, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 1980001201999121001

# Daftar Isi

Kata Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	iii
<b>Daftar Isi</b>	v
<b>Bagian 1 : Pendahuluan</b>	1
1. <b>Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D</b> <i>Rempah : Latar Sejarah dan Peluang Ekonomi Masa Depan</i>	1
<b>Bagian 2 : Jejak Sejarah Jalur Rempah</b>	4
2. <b>Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özay</b> - A Closer Investigation of the 'Spice Policy' of Aceh with the Ottomans in the 16th century	4
3. <b>Prof. Amirul Hadi, MA, Ph.D</b> - Aceh: Beberapa Catatan Tentang Jalur Perdagangan dan Budaya (Perspektif Historis)	33
4. <b>Sanusi M. Syarif, SE, M. Phil</b> - Khasanah Budaya Rempah: Dari Seuneubok lada, Migrasi Hingga Agro-Socialforestry	49
5. <b>Aris Faisal Djamin, S.H</b> - Bandar Susoh dan Perdagangan Rempah di Pantai Barat Selatan Aceh (Tema; Jejak Sejarah Rempah di Pesisir Barsela)	52
6. <b>Assoc. Prof. Sher Banu A. L. Khan, Ph.D</b> - "Sultan, Sultanah dan Rempah: Pergeseran Gelombang Perdagangan di Aceh Dar Al-Salam"	65
7. <b>Laila Abdul Jalil, S.S., MA</b> - Motif Bungong Pala Tenun Songket Siem Ekspresi Budaya di Jalur Rempah	68
8. <b>Hermansyah M.Th., M.Hum</b> - Rempah dalam Manuskip Kuno Aceh	78
<b>Bagian 3 : Peluang Masa Depan Ekonomi Rempah</b>	
9. <b>Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, MSc. Agr</b> - Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Produk Rempah Indonesia	90
10. <b>Syaifullah Agam, SE., M.Ec., Ph.D</b> - Program Wisata Tematik Jalur Rempah Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 Tahun 2023	102

<b>11. Ir. Cut Huzaimah, MP</b> - Peluang Pengembangan Budidaya Komoditas Rempah di Aceh	108
<b>12. Assoc. Prof. Dr. Mohd Affendi bin Mohd Shafri, M. Res, Ph.D</b> - Rempah untuk Dunia: Amalan Perubatan Tradisi dan Potensi Moden	116
<b>13. William Wongso</b> - Gastrodiplomacy Interlisasi Kuliner Nusantara	128
<b>14. T. Satria Wira, SE, MM</b> - Peluang dan Tantangan Ekspor Rempah Aceh	133

## Bagian 1: Pendahuluan

# Rempah: Latar Belakang Sejarah dan Peluang Ekonomi Masa Depan

**Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D**

(Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat)

Rempah-rempah telah memainkan peran sentral pada sejarah manusia selama ribuan tahun. Ia bukan hanya digunakan untuk memberi rasa pada makanan, tetapi juga memiliki peran dalam perdagangan, pengobatan, dan bahkan sebagai simbol budaya dan keagamaan. Rempah-rempah seperti lada, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga telah menjadi komoditas berharga dalam perdagangan internasional sejak zaman kuno. Barang-barang itu diperdagangkan melalui jalur sutera dan laut, menciptakan jaringan perdagangan global.

Hal ini ditandai oleh bangsa-bangsa Eropa yang mencari rute melalui jalur laut untuk sampai ke Asia dalam mengamankan pasokan rempah-rempah. Hal ini memicu eksplorasi dunia dan penemuan wilayah-wilayah baru. Sebagai salah satu sentral rempah-rempah yaitu pada wilayah pemerintahan Aceh tempo dulu atau yang dikenal dengan Aceh Besar. Aceh Besar menyimpan banyak rekam jejak historis tentang kedatangan bangsa asing ke wilayah Aceh, salah satunya adalah sumber daya alamnya. Aceh Besar menyimpan sumber daya alam berupa komoditi rempah seperti lada, kemiri, cengkih, kayu cendana dan lain sebagainya acapkali disebut-sebut, baik dalam tutur masyarakat maupun dokumen-dokumen klasik.

Berbagai komoditi ini menjadi daya tarik bangsa asing untuk dipasarkan bhkan dimanfaatkan dalam berbagai produksi yang lebih luas di wilayah yang lebih luas. Pemilihan selat Malaka sebagai jalur para pedagang bukan tanpa alasan, sejak awal Sumatera sudah terkenal di kalangan pendatang dari India, Arab, maupun Eropa. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera, rentan angin dan ombak, pesisir utara dan timur menyediakan pelabuhan alami yang merupakan tempat aman untuk repasi kapal serta berdagang kapur barus, kemenyan, emas, dan lada. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tempat berdagang rempah-rempah, sutra dan komoditas yang dibawa dari tempat lain. Hal ini dibuktikan dengan rute pelayaran, sejarah perdagangan dan interaksi global yang ada di sana.

Selama periode kolonial, Belanda mengendalikan produksi lada dan cengkeh di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Pemberontakan di Tanah Rempah (*Banda Islands*) merupakan perlawanan melawan penindasan tersebut. **Revolusi Industri menjadi salah satu perkembangan transportasi dan teknologi pemrosesan rempah-rempah memungkinkan perdagangan internasional yang lebih efisien, dan hal ini berkontribusi pada revolusi industri di Eropa.**

Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui Bandar-bandar perdagangan Kerajaan Aceh, mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya.

Dengan kata lain, berkembang dan majunya wilayah Aceh memiliki akar historis yang berkaitan dengan bergulirnya perdagangan internasional. Utamanya adalah rempah-rempah yang menjadi komoditas utama ketertarikan bangsa di luar nusantara ini, sehingga mengundang mereka semua untuk berdatangan dan melakukan berbagai komunikasi sosial, ekonomi.

## Peluang Ekonomi Masa Depan

Melihat sistem pembangunan berkelanjutan, bahkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045, kita tentu dapat merasakan bagaimana terobosan-terobosan perekonomian dikembangkan di Indonesia. Peluang itu juga bisa dirasakan bagi produsen dan petani rempah-rempah. Sistem pembangunan berkelanjutan menawarkan tiga serangkaian konsep strategis, di antaranya berkaitan dengan peluang ekonomi, lingkungan hidup dan sosial masyarakat (SGDs, 2020).

**Membaca Peluang ekonomi masa depan melalui pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan rempah-rempah, terlebih di Aceh akan berpengaruh pada beberapa hal, di antaranya adalah; Pertanian Berkelanjutan, Inovasi Pertanian, Kesehatan dan Obat-obatan, Perdagangan Internasional, dan Destinasi Wisata.**

Pertanian rempah-rempah secara berkelanjutan menjadi penting untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Hal ini tentu akan melibatkan pada aspek praktik pertanian organik dan ramah lingkungan dalam menjaga kualitas dan kuantitas rempah-rempah. Yang mana inovasi dan pengembangan dalam aspek

pertanian dapat diterapkan dalam pengolahan dan produksi pertanian rempah.

Dalam bidang produksi, perusahaan makanan dan minuman selalu mencari cara baru untuk menggabungkan rempah-rempah dalam produk mereka, termasuk makanan siap saji, minuman, dan makanan penutup. Inovasi ini menciptakan peluang bisnis baru yang tentu akan bermanfaat pada kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan kata lain, rempah-rempah diharapkan selalu berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas, agar dapat memasok kebutuhan pasar, baik wilayah nasional maupun internasional.

Di samping itu rempah-rempah juga memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional, dan penelitian modern semakin menunjukkan manfaat kesehatan yang dihasilkan dari pengolahan dan konsumsi rempah-rempah. Produk-produk nutrasetikal dan obat-obatan berbasis rempah-rempah dapat menjadi pasar yang berkembang dalam aspek kesehatan. Rempah-rempah tetap menjadi komoditas berharga dalam perdagangan internasional. Negara-negara produsen rempah-rempah terus memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor mereka ke pasar global.

Dalam bidang kuliner juga tidak kalah pentingnya pemanfaatan rempah-rempah. Destinasi wisata kuliner yang menonjol menarik wisatawan dari seluruh dunia yang ingin mencicipi masakan otentik yang kaya rempah-rempah adalah misi penting dari wisata kuliner. Hal ini menciptakan peluang bagi industri pariwisata dan kuliner untuk memanfaatkan rempah-rempah sebagai bahan pilihan dan pemanfaatan dengan bidang perkulinieran.

Dalam dunia yang semakin terhubung antara satu dengan lainnya, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, rempah-rempah tetap memiliki daya tarik yang kuat, baik dari segi sejarah dan budaya maupun potensi ekonominya. Untuk memanfaatkan peluang ekonomi masa depan, penting bagi produsen, pelaku bisnis, dan peneliti untuk terus menjelajahi dan memahami peran rempah-rempah dalam dunia modern.

Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana pola perkembangan rempah yang dapat dianalisis melalui sejarah dan bisa dikembangkan melalui perkembangan komunikasi baik nasional maupun internasional, sehingga berdampak pada perkembangan wilayah dan komoditasnya, terlebih bagi Aceh khususnya, dan umumnya bagi Indonesia. []

## **Bagian 2: Jejak Sejarah Jalur Rempah**

# **A Closer Investigation of the ‘Spice Policy’ of Aceh with the Ottomans in the 16<sup>th</sup> century**

**Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özay**

International Institute of Islamic Thought and Civilization,

International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM).

mehmetozay@iium.edu.my; Orcid No: <http://orcid.org/0000-0002-2719-1543>.

### **Abstract:**

This paper focuses on the early stages of the relationships between the Ottoman State and the Sultanate of Aceh Darussalam. At first, it is essential to observe that the Aceh political elite constantly and encouragingly invited the Ottomans through its ‘spice policy’ to the Indian Ocean theatre of commercial competition. The mentioned role of the Acehnese political elite is a subject that has been chiefly passing attention among scholars who have attempted to study the relationships between the Ottoman State and the Sultanate of Aceh Darussalam. This study invites the academic audience to discuss the political consciousness of the Ottoman state’s ruling elite and those in the Sultanate of Aceh Darussalam comparatively regarding developing a potential political and commercial network in the Indian Ocean. Although the Ottoman lands contained partially territorial sovereignty some portions of the Spice Route (which was known as Silk Road by the Ottomans) from Southern Arabia to the Mediterranean coastal cities, it is crucial to provide an answer as to whether they had the political consciousness to become an influential actor and significant alliance with the Sultanate of Aceh after the Ottomans gained territorial sovereignty in the whole region of Hijaz and Southern Arabia and Bay of Persia. In this regard, several fundamental questions need to be highlighted and answered as follows: How did the Ottomans respond to the invitation of the Aceh political elites in the second part of the 16<sup>th</sup> century? To what extent did the Ottomans acquire a place in the commercial network between the Mediterranean and the Indian Ocean? Furthermore, to what extent did the Ottomans persist in its presence in the Indian Ocean affairs? etc. Without satisfying answers based on factual data to these and similar questions, it would be challenging to comprehend and interpret the presence of the Ottomans and their influences in the Eastern Part of the Indian Ocean, including the Sultanate

of Aceh Darussalam. Otherwise, the gap of knowledge related to those decades of early correspondence will be filled in by fictitious approaches. In this regard, it is necessary to venture into a novel approach that can contribute to evaluating the correspondences between two policies, namely, the Ottomans and the Acehnese, in the 16<sup>th</sup> century. In this regard, it would not be wrong to assert that this paper should be considered as a venture to deconstruct the existing understanding and Ottoman-centric tendencies among historians and suggest an Archipelagic-centric perspective in a sound and sustaining way.

**Key Words:** Aceh Sultanate, the Ottomans, the Indian Ocean, spice network,

## Introduction

This paper should be accepted as the continuity of some of my previous papers about Rumis and Ottoman political and geographical consciousness, which inform the readers about how the Archipelago was a *terra incognita* for the Ottoman political elites. I deal with the above-mentioned familiar event -particularly in the Archipelago and less in modern Türkiye- from an unfamiliar point of view. One may regard this perspective as the adversary to those with an Ottoman-centric approach that focuses on the positioning power of the Ottomans and neglects the geo-political and historical establishments of the Sultanate of Aceh Darussalam in North Sumatra.

The relationship between the Ottomans and the Sultanate of Aceh is significantly structured around the '*Meriam Lada Sicupak*' phenomenon, which refers to the Aceh envoy's visit to İstanbul in 1566-67.<sup>1</sup> The words in this phrase implicitly refer to the content of the unproved or unclear relationships -based on the Ottoman official documents- between the Ottoman State and the Sultanate of Aceh Darussalam. The first is *lada* (white pepper), a commercial item, as an economic power, and the second is *meriam* (cannon), a specific reason to gain military power against political rivals. Both items were present in the context of the Indian Ocean and its globalization through the ventures of the Western maritime nations commencing from the earlier years of the 16<sup>th</sup> century.<sup>2</sup> Although the connectivity among the diverse Eastern nations adjunct to the Indian Ocean had been known and developed accordingly in

---

1 It is understood that the Acehnese envoy arrived in İstanbul, while Süleyman I was still in military engagement in Szigetvar, Hungary (Razaulhak Şah, 1967: 377).

2 I argue that the Ottomans' failure to achieve this signifies to a process that would reveal itself more clearly a few hundred years later.

the pre-Portuguese era, the 16<sup>th</sup> century witnessed a drastic change in the manner and context of the commercial network in the whole region.<sup>3</sup> That is the one that converted and maintained the Indian Ocean into a global sea route to accumulate surplus through gaining economically powerful relations and implicitly supporting the premature capitalist economic system in Western Europe beyond the regional separation between India, the Archipelago, and China. Besides, this process caused significant tensions, conflicts, and military engagements, particularly between the Portuguese and Muslim policies such as Gujarat and Aceh.<sup>4</sup>

To support the argumentation mentioned above, I would like to refer to crucial steps that I believe clarify the position of the Ottomans in the affairs of the Indian Ocean sufficiently. The first is about the realities of the Ottoman maritime power in the Indian Ocean. Although there were a few maritime expeditions against the Portuguese, Orhonlu states that we do not have detailed information and data about the content and complexity of the Suez military harbor (*Süveyş Kapudanlığı*). Most importantly, he argues that the Ottomans did not utilize this port and facility much owing to their southern policy in the adjunct regions to the Indian Ocean, which was not sustainable (1970: 235).<sup>5</sup>

The second one is about the closer relationships between the Ottomans' economic decline and the economic development and progress in the form of capitalism in

---

3 During the ancient times there were constant trade affairs between the Eastern and Western parts of the Indian Ocean. For instance the Sasanid Persia and China were well-connected not only through the land route but also there were seafarers journeyed the long distance between these two geographies. And Persian silk products were transferred to China and Europe as well (Huart, 1972: 164-5). Besides, in the centuries pre-Western maritime venture in the very late years of the 15<sup>th</sup> century, the Indian Ocean had been known as Muslim lake because of the diverse Muslim nations' established commercial network containing from the Eastern Africa till the Archipelago and China's coastal areas. This reality is observed during the very initial stages of voyages of the Portuguese from Cape to the Indian Ocean and coastal areas of India by the constant assistance of "the nautical skills of the Muslims and the Indians" (Godinho, 1993: 24; Polat, 2017: 1). If any Ottoman vessels reached the Sumatran coasts it must have been with the assistance of those forces. The same technical assistance they needed appeared during their invasion venture in Red Sea in 1539. And owing to their inadequacy, they "were forced to rely on Arab, Gujarati and Malabar pilots" (Boxer, 1969a: 57). Along the local and Western sources Razaulhak Şah reminds this fact in his article which explains the letter of al-Qahhar in details (1968: 373). The Portuguese succeeded to reach India after a constant engagement in maritime affairs commencing from the time of princehood of Dom Henry (Henry the Navy) in 1430s onwards. And during his reign, the Portuguese increased his maritime capability in various aspects and were able to arrive in Malayalam coast in Western India (Pieris, 1913: 28). Although Henry the Sailor's name is generally mentioned as the beginning of the Portuguese's expansion into the Indian Ocean, it is evident that the one who initiated this process was his father, King John. However, Henry accompanied his father during the Ceuta expedition in 1415 (Sousa, 1695: 2).

4 This was a necessity for the establishment of capitalism as a new and dominating economic system on the robust fundamentals.

5 It is understood that the Ottoman administration had flexible policies on the basis of the conditions in the region. As Orhonlu says that during Süleyman the Eunuch, the Ottomans were able to establish a vigorous navy in 1537 (*Ibid.*). On the other hand, some other sources assert that the establishment of Suez navy and appointments of important figures were important investments (Öztuna, 1983: 279).

Western Europe. To support this account of the premature capitalist discussion, I would like to refer to the late Sabri Ülgener (1911-1983), a Turkish scholar of the history of economics, who sought the answer why "Ottoman craft producers had failed to make the transition to capitalism". Initial observation of this statement might cause us not to relate it to the increasing importance of the spice route running through the Indian Ocean. It was directly related because of the globalization of fundamental merchandise and its triggering efficacies upon the other production processes, including the craft ones. Ülgener's answer explicitly related to changing "the international trade routes away from the Mediterranean from the 16<sup>th</sup> century onwards". Furthermore, Ülgener asserts that "the Ottoman economy increasingly found itself in a backwater with access to international markets severely limited" (Faroqhi, 2005: 5). Probably, one should take into consideration the account of İnalcık the unfavorable conditions caused by the political developments in West Europe and the implicitly descending military engagements of the Ottomans would be contributive enough to the discussion as mentioned earlier. For instance, while the Ottomans were losing a crucial alliance like France because of the civil war in the latter's geography, the Ottomans themselves faced the failure to gain sovereignty in Malta Island in 1565, and the last ditch reached Sitgevar in Hungary in 1566 (1973: 41).

Before going into some details about *lada sicupak*, it would be helpful to understand the political situation in the Indian Ocean and the geo-political interests and intentions of the Aceh Sultanate. Shortly, Acehnese in North Sumatra was the -probably- only nation to be against the territorial expansion and domination of the Portuguese in the region. As argued by some writers, once the Acehnese were left alone by other regional states -including the Muslim ones- owing to their collaboration with the Portuguese, the former developed a novel policy and initiated sending an envoy to İstanbul (Razaulhak Şah, 1967: 373).<sup>6</sup> Although the context of *lada sicupak*

---

<sup>6</sup> This initiation was realized once the Acehnese received information through their own traders or their trade agents in Gujarat in the second half of 1530s. For instance, Boxer refers to Acehnese naval presence in the northwest of India during the same era (1969b: 416). Or as another process signifying the presence of the Ottomans in Surat during the incident exposed to the Ottoman navy, containing a total 9-vessels, led by Seydi Ali Reis in 1540s. In fact, Seydi Ali Reis was charge of taking all these vessels from Basra to the navy headquarter in Red Sea, Egypt Province. However, because of the sea events which seems to be monsoon season, the flotilla was diverted to the side of Surat. For that purpose, the Ottoman court sent an official letter to the ruler of Surat, then his name was called Rajab and requested to send back safely this flotilla to Egypt or utilized them in military engagement against the Portuguese (For details See: Feridun Bey, 991/1583, 617, 618). This reveals some insight to what degree the Acehnese were politically consciousness and followed up the developments not only in their own region but also in India as well. (Note: Feridun Bey's great collection of Ottoman state appears entitled *Munsha'at-i-Salatin*, (*Münşeat-ı Selatin*) compiled some time before 991/1583 and published at Constantinople in two volumes in 1274/1858. The diplomatic correspondence contained in this valuable and insufficiently appreciated book is arranged chronologically and is partly in Turkish, partly in Arabic and partly in Persian" (Brown, 1930: 8). "As it is known, Nişancı Ahmet Feridun Bey's journal named *Münşeat-ı Selatin*, which contains eight hundred and eighty stanza letters and authors, was presented to

reminds us of a direct and inevitable conflict between the Aceh Sultanate and the Portuguese, it is also true that the earlier engagement between these two powers in North Sumatra was relatively peaceful. As such, the Portuguese, before invading the city of Malacca, approached Pasai peacefully in 1509. Hence, the Portuguese's political and economic interests later revealed themselves and caused direct military engagements with the Acehnese in Pasai. As argued, the Portuguese controlled a kind of fort in Pasai by collaborating with certain regional groups. This conflict ended with the -probably- surprising victory of the Acehnese by gaining military equipment, including cannons (Danvers, 1966: 357; Sousa 1695: 272-274).<sup>7</sup> This is important because the Acehnese were not the first time to acquire cannons through the Ottomans' indirect assistance, as explained in detail elsewhere in this article. In addition to this early stage of information about the cannon-making and acquiring process, the Acehnese artisans produced some types of cannons and similar military equipment with iron imported from India by applying Chinese methods during the reign of Iskandar Muda (De Koninck, 1977: 17).<sup>8</sup>

Before I continue the story of *lada sicupak*, it would be interesting to remember that the Ottomans had set off a relatively robust navy into the western part of the Indian Ocean to resolve the maritime threat of the Portuguese in Diu in 1538. Although this expedition was ordered by Süleyman the Magnificent and Hadım Süleyman Pasha (*Süleyman the Eunuch*), though an able statesman but a very old one, appointed as the *kapudan* of the flotilla, the latter failed to develop a political strategy and diplomatic relationships with the smaller units of petty states around Diu. Based on the existing data, it is apparent that Hadım Süleyman Pasha was a military-oriented man and gained more military power without any political projections for mid or longer-term relationships. He acted forcefully upon Aden and ordered the ruler of this city-state to be executed (von Hammer Purgstall, 1984: 1456; Danişman, 1965: 199). As understood by the crucial process of this expedition to Diu, some other Muslim rulers immediately shifted their political alliance from the Ottomans to the Portuguese. Moreover, the Ottomans' mighty navy had to be forced to end the siege by order of Hadım Süleyman Pasha once the rumor of a more oversized Portuguese navy was approaching Diu Island

Sultan Murad III as a holiday gift on 9 Shawwal 982 (H)" (von Kraelitz, 1330/1914: 242).

- 7 The victory of the Acehnese after a relatively brief skirmish with the Portuguese in North Aceh undoubtedly reveals that the former must have learnt some war strategies and acquired at least some of the European weapons technology (Meilink-Roelofsz, 1962: 10). Boxer also refers to the Acehnese' acquisition of military equipments from the Portuguese during this early years of engagement (1969b: 415).
- 8 This account provides us some insight about that the Acehnese were capable enough to produce military equipments but yet to need to be equipped by certain calibre of cannons.

(von Hammer Purgstall, 1984: 1459; Yücel, 1987: 67).<sup>9</sup> It is essential to inquire how the Diu Expedition was analyzed and interpreted by the Ottoman bureaucratic and military elite; and what the impact upon the decision-making process to the Eastern Affairs in later stages of the reign of Süleyman the Magnificent was.

I would like to briefly explain or repeat the notorious story about *Lada Sicupak* with some details here. Since the acceptance of the Acehnese envoy by the Ottoman court took a longer time -which seems to be nearly two years- they are assumed to have survived materially by selling their *lada* (white pepper) in the İstanbul market, which was left only a handful. Moreover, they presented this little *lada* to Selim II (1566-1574), the Ottoman Sultan.<sup>10</sup> Based on the intention of the Acehnese envoy and a letter presented to the authorities in İstanbul, the Ottomans intended to set off the prepared flotilla.<sup>11</sup> However, they were forced to revoke because of the political

9 There is a consensus among the Ottoman historians that the Diu Expedition was a failure. But Yücel emphasizes this development in detail as stated in above-mentioned paragraph. (Note: Hadim Süleyman Pasha, though turning back from the Diu expedition without any significant result, he gained sovereignty of Yemen while on the way back to Suez port (Macro, 1968: 2). And Yemen remained as one of the southern provinces of the Ottomans till 1683 (Hathaway, 1997: 7).

10 The Ottoman army returned from Hungary expedition in Autumn in 1566. Since Selim II was enthroned in Edirne, but the larger ceremony was held in İstanbul in September, the same year. And one predicts that the Acehnese envoy must have been accepted by the new sultan in the last few months of 1566. On the other hand, Razaulhak Şah (1967: 377) tells us that Sultan Selim II sent his responsive letter on 20.09.1567. We are not informed by any sources how the Acehnese were treated by the Ottoman authorities and whereabouts the Acehnese envoys during their presence in İstanbul. But it is known that foreign envoys were welcomed and even their expenditures met by the Ottomans almost in the same period (von Hammer Purgstall, 1984: 1457-8).

11 The main actor in bureaucracy behind the policy of engagement with the Indian Ocean developments was Sokollu Mehmed Pasha (Mehmed Sokolovic), the grand vizier (1565-1579) during the late eras of both Süleyman the Lawgiver (18 months), and Selim II (1566-1574). He represented a faction which had political and strategic intentions for a novel direction of the Ottoman State in the East (the Indian Ocean), rather than in the West. During the years of the reign of Selim II, other faction which prioritized the military engagement in Europe, were against Sokollu and his Eastern policy. It is understood that Sokollu's future projection of the State was the reason of setting of a 17-vessel navy sometime between 1567-68 and 1569. However, this influence was short-lived because of the uprising in Yemen in 1570 that diverted the attention of the Ottoman policymakers towards domestic policies instead (Mühimme Defteri, 1995: 118-119; Şere, 2014: 65; Durant, 1961: 522). Besides, there was, I think, bigger problem occurred in the Mediterranean owing to the "naval forces collapsed in 1571 in Lepanto (Lane, 2021: 11). Although Razaulhak Şah (1967: 378) refers to Sultan Selim II as the mastermind of the preparation of the above-mentioned flotilla to be sent to Sumatra, the reality was that the Ottoman court was under the strong administrative role of the grand vizier, namely, Sokollu Mehmed Pasha during those years. After Selim II, his successor Murad II ascended to the throne in Ottoman court (1574-1595) and during his period the Ottoman State almost lost its communication with the Indian Ocean and in particular Sumatra. The reign of Murat II experienced hardening realities which was caused mainly by the certain reflections of the badly managed Spanish colonialization and its all inefficiencies upon the economies of the Mediterranean region including the Ottoman State through the ascending the prices (Lane, 2021: 11). Sokollu, the grand vizier, beyond being an able statesman, seems to have had interest to intellectual activities. As such, it is stated that he ordered the translation of pseudo-Aristotle's *Sirr al-asrar* (Secret of secrets), the work which was utilized by Ibn Khaldun and Kinalizade Ali Çelebi (d. 1572) (Sariyannis, 2019: 254).

riot in Yemen.<sup>12</sup> Although the Ottoman sources -including the renowned "*Mühimme Defterleri 6-7*"<sup>-13</sup> do not enlighten us in which way they assisted the Aceh envoy, it is understood from the Aceh sources and social memory that there was a (or few) canon presented to Aceh from the Ottoman court.<sup>14</sup> There is one firm reference to the return of an Aceh envoy to have a voyage to Egypt by a *kadırga* left from İstanbul (Razaulhak Şah, 1967: 378).<sup>15</sup> It was named as *Meriam Lada Sicupak*. Moreover, it has become a historically notorious story in Acehnese society without mentioning any written specific *Hikayat* about it. Nevertheless, the interesting point is that some

---

12 In fact, Yemen was a problematic region since 1521, once the Ottomans gained the territorial sovereignty of the Mamluks which had some influences in Yemen, Southern Part of Arabian Peninsula. Since the local religio-political elites in Yemen did not recognize the sovereign power of the Ottomans, they preferred to political riots periodically (Danışman, 1965: 198). This unexpected development in Yemen seems to have occurred in late months of 1567 (Razaulhak Şah, 1967: 379). Since the Ottomans were busier with the Cyprus and Tunisia affairs in coming years, although they promised to set off the flotilla to Sumatra, they failed to realize this policy. Pertaining to along the 6-year communication and correspondence between the Aceh court and the Ottomans, the last correspondence released by Selim II as a response to the 3<sup>rd</sup> letter sent by Al-Qahhar was not dated accordingly. Regarding to the individuals who took part in the envoy were Sünbül Ağa and Haraza. It can be argued that Sünbül Ağa was an Ottoman citizen and Haraza was the Acehnese. But it is yet to be clarified how they both could be present in the same envoy. But it is predicted that it was in 1571 (Razaulhak Şah, 1967: 380). All this process tells us that the Acehnese were able to send their envoys with letters insistingly to İstanbul. However, we are not informed about the whole process how and in which conditions the Acehnese envoys arrived in İstanbul.

13 These 'registers' are the most crucial documents containing the orders from the Ottoman ruler to the provincial rulers, namely, governors and some other highest authorities in provinces (Hathaway, 1997: 30).

14 One can infer an idea from few documents from BOA sources (*Mühimme Defterleri 7*) that whether the Ottomans provided few biggest cannons to the Acehnese envoys. It is understood that the Ottoman court authorities ordered some regional authorities to provide some materials including horse, weapons, things like such as copper etc. For details See: A.DVNS.MHM.d...7.237.975 Ra 13. "Açe padişahı tarafından Südde-i Saâdet'e gönderilen elçi dönüşté Yemen, Cidde ve Aden'den at, silâh, bakır vs. eşya alıp götürmek isterse kendisine engel olunmaması ve gereken yardımın yapılması". (English tr.: The envoy sent by the Aceh sultan to Südde-i Saâdet returned with horses, weapons, copper, etc. from Yemen, Jeddah and Aden. If he wants to take things away, he should not be prevented, and the necessary help should be provided. Again, a similar document released on the same day informs us that some artisans requested by Aceh Sultan were ordered to accompany the returning envoy to Sumatra A.DVNS.MHM.d...7.238.975 Ra 13: "Açe padişahının talep ettiği dülger, demirci, kalafatçı, nakkaş vs. sanatkârların elçi ile birlikte gönderilmesi". (English tr.: Carpenter, blacksmith, caulk, miniaturist, etc. requested by the Aceh sultan. Sending the artists with the ambassador.) And these issues are repeated in Razauhlak Şah's article referring to the letter sent to Mısır Beylerbeyi (Governor of Egypt) and summarizes it by mentioning the artisans who would be arriving in Mısır (defter edilip sana gönderilmiştirlerdir). The order to Mısır Beylerbeyi is that he would send immediately the above-mentioned artisan group with Aceh envoy to Sumatra (Razaulhak Şah, 1967: 378). It appears here an alternative group who are named as 'volunteers' (gönüllü). In case any of them would like to accompany to Aceh envoy to go Sumatra there should not be any difficulties for them (Razaulhak Şah, 1967: 378). The latter account reminds us that there must have been 'Rumîs' in Egypt (in any port cities under the control of Governor of Egypt) who were able to travel voluntarily or autonomously in the region. Though it is not directly related to the Sumatra affairs, it is important that the Ottomans, after the conquest of Egypt, seem not to have exported crucial artisanship institutions. This is in line with the question and opinion of Faroqhi who seeks an answer whether "the organization of craftsmen in guilds was introduced to the Arab world after the conquest of the Mamluk State". And she adds that this is because there are no any primary sources informing about this earlier stage of communication between the Ottoman land and Egypt (2005: 3).

15 Because the letter released by the Ottoman court orders that the mentioned *kadırga* should be returned to İstanbul once the mission of taking Aceh envoy to Egypt would be successfully conducted (Ibid.)

sources cause some more confusion referring differentiated to Yavuz Selim I (1512-1520), Selim II (1567-1574), and -implicitly, Ahmet I (1603-1617)<sup>16</sup> about the identity of the authentic presenter of '*lada sicupak*' (Sulaiman, 1984: 5; Harun, 1985: 8).<sup>17</sup>

Another skeptical point is that although some sources, including Reid and Özbaran, tell us that two vessels reached Aceh port, the Acehnese or local sources do not inform us anything about it. However, they do not provide reliable, authentic references about these two vessels' voyages to North Sumatra. On the other hand, the flotilla issue is the central point conveying a meaningful statement about it. For instance, a sentence clarifies the core intention of the Aceh Sultan stating that "in case you may send us a flotilla we promise the presence of the Portuguese on this side will be demolished (*Alet ve teçhizatla mürettebat donanma-i Humayun gönderirseniz bu taraftaki Portekizlilerin mahvolacağını biz taahhüt ederiz*) (Razaulhak, 1967: 376).<sup>18</sup> As discussed elsewhere in this paper, although the promised flotilla could not be set off to North Sumatra, the Acehnese continued their aggressive engagement with the Portuguese in Malacca during similar years. For instance, al-Qahhar, the Acehnese Sultan, had a navy venture to Malacca in 1570 (Sousa, 1695: 282).

## Remembering *lada sicupak*

This historical phenomenon of providing symbolic information has been repeated constantly in the past few decades because of the social and academic engagements enhanced after the tsunami in 2004 between Aceh and Türkiye. However, it seems there was a significant forgotten process in the past century, and only a few scholarly and popular writings attempted to remind the public. For instance, news about *Lada Sicupak* appeared in 1984 in *Waspada*, Medan. The writer highlights the old but forgotten story

16 There is another reference in Aceh sources mentioning an Ottoman sultan's illnesses. And two individuals with the title of 'Çelebi' namely, Ahmed Çelebi and Ridvan Çelebi visited North Sumatra because of their hearing about some herbs such as 'minyak kaphur'. However, the Ottoman sources, till today, do not inform us about the illness and/or any individuals' visit to North Sumatra to find out any materials to be used in medical solution of the Sultan's illness (Iskandar, 1978: 69). (Note: Rum is a reference to the geography containing both Anatolia and Balkania or as it is known Rumeli where the Ottomans gained sovereignty for almost since the 15<sup>th</sup> century onwards. Or shortly it can be argued that the Ottoman territory was considered as Rum land as observed in the statement of "Padişah-ı milk-i Rum..." (Fleischer, 1986: 277; Mustafa Ali, 1997: 913). Besides some single provinces such as Amasya is also referred as Rum in some sources (Von Hammer Purgstall, 1984: 1452, (f.n. 93).

17 Some sources refer to the presence and collaboration of Ottoman military individuals with the Acehnese in particular against the Portuguese. When the latter had a plan to invade Sunda Sultanate, it is argued that the Acehnese with Turks cast artilleries and provided assistance to the Sundanese (Hageman, 1869: 229).

18 Although the Acehnese political elite seems to have had a convincing conversation in the letter about the demolishing of the Portuguese by the military assistance of the Ottomans, the latter contacted 3 biggest military engagements with the Portuguese in the Western part of the Indian Ocean and they lost all.

by referring to a known Acehnese scholar, Mohammad Gade Ismail's article published in *Santunan Magazine* No. 78<sup>th</sup> year VIII April 1983 in Banda Aceh. Gade Ismail wrote an article about it after visiting the *Bronbeek Museum* in Aarheem in 1982.<sup>19</sup> This is important for our current paper because it is a contemporary text informing academic circles and the public about the relationships that occurred four hundred years ago.

## Legitimate Comparison between the Ottomans and the Aceh Sultanate

Faroqhi (2010: 57) argued that "Ottoman history has become a legitimate subject for comparison" beyond its being considered by nationalist academic circles -I prefer here rather than the word *chauvinist*. Following this statement, I would venture to compare the Ottoman policy of the Indian Ocean and the Aceh political elites' involvement in the same sphere of relations. Moreover, this stance would allow us to deconstruct the premise of the Ottoman-centric perspective, which seems not only be argued by some chauvinist historians -who might be considered to have a kind of justification manner in their context- in *Türkiye* but also unthinkingly followed by external circles in some other countries.

In fact, before Aceh's initiative to approach the Ottoman court to construct a strategic alliance in the context of both engaging militarily with the Portuguese in the Eastern part of the Ocean and developing a significant commercial network, the Indian Ocean commercial and cultural networks which had been known and actively participated by diverse nationalities throughout the centuries. There is no doubt that the expansion of Islam territorially contributed increasingly to the importance of the seaway (Alpers, 2014: 1).

There is an interesting inquiry about the extent to which the presence of the Ottoman State in the Indian Ocean was real. Although there were some attempts, it is suspicious whether the Ottomans invested intentionally and sustainably or not. A few works, such as Nelly Hanna's 'Making Big Money in 1600' as cited by Casale, tell that the Ottomans had a constructive engagement at prime level in the Indian Ocean merchant world (2006: 171).<sup>20</sup> There is a crucial reason why the Ottomans did not significantly have inclinations in

19 Mohd. Gade Ismail published this article about lada sicupak in *Santunan*, (No. 78, April 1983) a local journal published in Banda Aceh (Sulaiman, 1984: 5).

20 Although Casale challenges the argumentation developed in Hannah's paper, the former does not reveal any relevant direct, dynamic and sustainable engagements of the Ottomans in the merchant economy in the Indian Ocean (*Ibid*, 172). One of the significant reason, beyond the absence of bureaucratic mentality and consciousness about the Eastern affairs, is related to the Ottomans ship building processes. As argued

the Eastern policies and were not, to a greater extent, in the Indian Ocean developments. It is based on the argument that the Ottomans had a definite direction to the West geographically -and culturally, I guess- since its birth as a sovereign state at the beginning of the 14<sup>th</sup> century in northwest Anatolia. Another crucial reason that cannot be denied is the Ottomans' European policies. Although the Ottomans were recognized as the *Ghazi* state and conducted constant military engagement in the Christian lands in Europe (Coles, 1968: 34; Hasan, 1988: 37),<sup>21</sup> the Ottomans also had significant bilateral relations with some European powers such as the Portuguese and the Dutch (Akar, 2003: 430).

It would be better to focus briefly on what happened during the earliest period of the reign of Süleyman I. Although Yavuz Selim I directed Ottoman foreign policy to the East throughout his reign (Hathaway, 1997: 5), his son Süleyman I, as understood, had some unclear vision in the very initial years. The years between 1523 and 1525 stand out as when it had not yet been decided which eastern and western expeditions would be prioritized. In this period, some factors stand out in the decision of the Süleyman, the Magnificent administration between the east and west of the Ottoman conquest expansionism. It is seen that the rebellion that took place in Egypt in the years 1523-4 was a factor in delaying the decision. İbrahim Pasha, the grand vizier, was sent to Cairo and asked to end the unrest in Egypt. İbrahim Pasha, who returned to İstanbul in 1525, brought with him the world map that Piri Reis presented to Yavuz Selim I about eight years ago, which included not only the Black Sea, and the Mediterranean but also the New World, the Indian Ocean, and some accounts about commercial activities, and the naval power of Portugal. He presented his book to the court. However, the conquest of Belgrade in 1521, in the first year of his reign, was a sign that Süleyman I was turning his attention to Europe. However, it is seen that the army remained idle during the processes mentioned above, causing unrest in the Janissary Corps.<sup>22</sup>

by some researchers that in especially the Ottomans were not capable to build oceanic vessels till the mid of the 17<sup>th</sup> century. However, the Western European maritime nations intervened the Eastern merchant economy through these high deck galleon (Gerçeksever, 2015: 547-8).

- 21 The Ghazi concept can be considered as political phenomenology of the Ottoman State. Some earliest authentic sources of the Ottoman history, such as Mecmua-i Münseat and Solakzade refers to this Ghazi phenomena in their fihrist and relevant chapters (See: Feridun Bey. (991/1583). "Fihrist", Mencuat-i Münseat, Reprint, Rabi'ul Akhir 1274, TBMM Nüshası / Turkish Grand National Assembly (TBBM) Library Version Volume I; Solakzade, Mehmet Hemdemi Çelebi. (1298/1880). Solakzade Tarihi, Bab-ı Ali: Mahmud Bey Matbaasi, p. 3). On the other hand, the Ghaza ideology seems to have been well-structured and embeddedness between two phenomena such as "asabiyah which is one of God's tools" as argued by Ibn Khaldun and support system of religious belief, namely, Islam "additional agent of cohesion" (Irwin, 2018: 46).
- 22 Hess, Andrew C. (1970). "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries: 1453-1525", The American Historical Review, Vol. 75, No. 7, (December), p. 1912. (1892-1919). Andrew C. Hess. (2005). "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries: 1453-1525", (ed.), Ian Glete, Naval History: 1500-1680, London: Ashgate, s. 121.

It is understood that the Ottomans - contrary to popular belief - were closely aware of the changes that occurred in the economic and commercial fields of the world during the relevant period and even made significant efforts to be involved in these developments as much as possible (Akar, 2003: 431). The Ottomans, whose importance was claimed to have diminished with the discovery of new trade routes by Europe opening to the East and West at the end of the 15<sup>th</sup> century, could attract the shining Northern European merchants to their region with the measures they took. This geography remained in the East-West trade until the end of the 17<sup>th</sup> century. It shows that its importance continues.

In the author's evaluation of Bulut's work, the effects of Ottoman-Dutch relations on the Ottoman economic system are discussed. Notably, the Ottoman's aim in this bilateral relationship was to ensure the supply of goods that the people needed and to avoid any problems. Relations with the Netherlands, which became the most important economic power in Europe in the 17<sup>th</sup> century, clearly reveal how foreign the Ottoman Empire was to the issue of colonialism. Although it is not possible to put forward a very technical idea, such as what colonialism and the trade capitalism triggered and what their consequences will be, it can be expected that a political effort has been made to explain how the Netherlands reached the essential stages of this trade capitalism. Moreover, in this regard, it is crucial to see whether the Portuguese were present in the Indian Ocean before the Dutch maritime intervention and whether the relationship extended to India and the Archipelago. However, the extent of its problematic continuity gave rise to an idea in Ottoman political circles on issues such as colonialism, commercial capitalism, and territorial sovereignty. As the author points out, "... the activities of Dutch merchants within the Ottoman borders were constantly encouraged by the Ottomans. On the other hand, the Dutch Republic also had political and economic objectives. While the economic aim was to achieve mercantilist goals, the political aim was to ensure the support of the mighty Ottoman Empire in their struggle for independence against Spain (Akar, 2003: 431).

As I stated in one of my recent articles, The Ottomans provided permissions to the Western European trade associations and individual traders, such as the Venetian and Genoese, and later on, the French (1536), to operate at the state borders by gaining some privileges since the mid-15<sup>th</sup> century (Şişman, 1999: 511) whereby "the Ottomans closely observed the maritime affairs from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean" (Akar, 2003: 430). However, contrary to this, the Ottomans did not actively engage in global trade interactions at the primary level. At this point, the

statement of Özbaran (2007: 49) is quite crucial, who stresses that the commercial activities were not as important as navy construction. This, in fact, implicitly clarifies that the Ottomans could not comprehend the intention of the Acehnese political elites, who not only emphasised military powers but also economic relationships.<sup>23</sup> This point provides insight into the Ottomans' and Portuguese' approaches towards the newly developing Indian Ocean commercial network. While the latter intentionally targeted the root of the valuable merchandise and traced ports to gain access to the various sources, the former was in a passive condition unless the regional Muslim polities had approached and invited, as observed significantly in the example of the Sultanate of Aceh Darussalam. The intention of the Portuguese was in line with the economic condition in Europe, where prices of all the valuable merchandise had been increasing. This was at least one of the logical reasons for the Portuguese to set off the oceans, particularly the Indian Ocean (Reid, 2000: 41). It does not mean that I decline the scale of expansion power of the Ottomans in the European continent and squaring the European states as an external factor which led the Iberians' emergence as seafarer nations'.

In one of my previous articles, I focused on the presence of the Rumis, whom I consider autonomous bodies acting by their intention.<sup>24</sup> However, they might have served the Ottoman state's political and military purposes whenever needed. This latter aspect is encountered in the Portuguese accounts about their observations and experiences on the Western Indian shores, including Basra Bay, describing a group of Muslim people as *Rumes* who were referred to as being initially from the land under the control of Ottomans rulers (Özbaran, 1974: 47: f.n.5). One significant example during the era of Aceh's direct engagement in the Indian Ocean commercial network, there was development in North-West of Indian and about it "... in 1553, Imad-ul-Mulk (Aslan Rumi) was appointed commander of the Foreign Legion" which includes mercenaries from diverse nationalities such as the Turks, Persians and Habshis who

23 In this regard, some writers emphasize that Süleyman the Magnificent had hesitations whether to engage significantly with the Eastern Affairs or not in 1529. And to be able to change the policy making process of Süleyman the Magnificent both İbrahim Pasha, the Governor of Egypt and Selman Reis encouragingly worked to convince the Ottoman court (Yücel, 1987: 66). Besides, although the Ottomans gained naval victorious in the Mediterranean, it was also reality that the Ottoman maritime power did not possess the skilled workers such as sailors and shipbuilders in Italian and Spanish navies, neither did the Ottomans gain technological devices developed in the Western Europe (White, 2011: 16).

24 Faroqhi (1995: 180) also refers to the presence of Rumi groups. In particular, she, quoting from C. R. Boxer, signs 400 Rumis in a vessel which was sanked after a direct clash, was full of valuable merchandise transmitting by the Acehnese themselves to one of the Arabian port city in 1565. Besides, there is one reference argues that Kurtoğlu Hızır was training Acehnese army with the assistance of eight artillerymen and 50 gunsmiths in Aceh (Goodwin, 2001: 81). But I think the authenticity of this daya is yet to be proved.

were in the service of the Sultan" (Commissariat, 1938: 102; Boxer, 1969b: 418).

I want to pinpoint why the Ottoman court did not act accordingly and declined the growing importance of the Indian Ocean in the context of the spice trade.<sup>25</sup> This is undoubtedly a vital question related to the mentioned era and Aceh and Ottoman relations. However, beyond it -I argue- if one considers the *longue durée* perspective and the developmental stages in larger regional entities, including Western Europe, it had strong outcomes about the stagnation and declining process of the Ottomans just after Süleyman the Magnificent.<sup>26</sup> This latter phenomenon is quite interesting and important, yet experts in this field must investigate accordingly. I may suggest one initial answer by finding a similarity with Henri Pirenne's assertion about Europe's declining process when the Arab-Muslim presence ascended in the Mediterranean. As such, Pirenne states that "... because of the Arab conquests, the unity of Mediterranean civilization was shattered, and Europe entered the Middle Ages. He based his argument on the many facts of European economic life that changed significantly after the Arabs had transformed the Western Mediterranean into a 'Muslim Lake', thus interrupting long-standing economic ties that even the barbarian invasions of earlier centuries had not damaged" (Gaiduk, 2003: 37-8).

My fundamental argument is whether the Ottomans, during the first and second parts of the 16<sup>th</sup> century, had any crucial political consciousness -including maritime engagement and commercial interactions with potential partners in the whole region of the Indian Ocean- about the new era initiated by the Portuguese maritime discovery. The latter's attempt is regarded as an intentional step to contain the Ottomans from the Eastern part of its borders. Although there is a contra idea against it, we may interpret the presence of the Portuguese as a real threat not only to the territorial sovereignty of its southern regions and the Hijaz area, the Sacred land of Islam, but also to the Oceanic commercial network which had been under significant control of various Muslim nations

---

25 Spice route was named as 'İpek Yolu' (Silk Road) by the Ottomans (Yücel, 1987: 66). Spice route and investment in this business had been known pre-Islam in the Archipelago. To be able to answer to the contribution of the Ottoman State actively to this established system through its communication with the Sultanate of Aceh Darussalam one should revisit the earliest stages of each regions and states. In this regard, the establishment of the Ottomans was based on expeditions and territorial expansion towards and through the Byzantium land in the West of the Ottoman Principality (Beylik) in the late 13<sup>th</sup> century (Hasan, 1988: 37). On the other hand, Samudra-Pasai -almost in the same period in line with the initial presence of the Ottomans -though Islam became a dominant factor and Islamization through relatively lesser degree of expanding process- was born into the system of already maintained spice route in the whole region. During the second ruler -Malik-ul Tahir- of the Sultanate of Samudra-Pasai, trade affairs were developed constantly. Parallel in this stage, trader groups from diverse nationalities such as Indian and Arabians paid regular visits to the ports of North Aceh (Hasan 1988: 151).

26 There are some theories pertaining to the phenomenon of decline. For instance, Owen observes by analysing Gibb and Bowen's accounts that the Ottomans' decline commenced from 1591 onwards (1976: 113).

in the adjunct coastal region including Sumatra. It is evident that the Western European nations expanded gradually but constantly their maritime presence far beyond the limits of Europe. It was a drastic change of military and political struggles among European and West Asian nations, moving from land territory to open sea or oceanic territories. Besides, the initiation of the Portuguese represented -probably beyond their intention- a metamorphosis of global trade affairs and territorial expansion. Suppose one carefully reads the maritime engagement of the Portuguese -the first Western European seafaring state- as a kind of example or comparison. In that case, he might conclude the whole process of the intentions or attempts of the Ottomans. The Portuguese enhanced the significant understanding of the spice route and the commercial networks from Gujarat to Ternate. This ascended the interest of the traders -and I believe the traders in other Western European countries as well-they needed urgently technical and scientific assistance such as "nautical cartography" in the late decades of the 15<sup>th</sup> century (Thomaz, 1995: 79). After almost a three-quarter century the Ottoman bureaucracy appointed Piri Reis, one of the brilliant scientific minds then, as the head of the flotilla in the Western part of the Indian Ocean as a continuous defensive action against the Portuguese, and his failure to bring a few vessels back to the navy headquarter in Suez caused his life.

Although the Ottomans assisted by sending maritime infrastructure to the Mamluks, who were under direct and constant threat of the Portuguese expeditions,<sup>27</sup> and later building a navy port in the Red Sea during Yavuz Selim I, these were partial responses and were not intentional efforts to enhance direct engagements with the growing Indian Ocean commercial networks. It is crucial to find out why the Ottomans were not significantly involved in the highly competitive theatre of the Indian Ocean. Commencing from the very beginning of the 16<sup>th</sup> century, the Indian Ocean was on the way to converting a global sea or, in other words, itself, becoming the Indian Ocean World (Prange, 2009: 36).<sup>28</sup> This emphasizes that it was a growing network and containing all known nations from the East and the West to gain hegemony from the existing commercial networks to some or more significant extent.

In that case, one may observe not only the Ottomans but also other Muslim polities in the classical Muslim lands -read as contemporary Middle East and West Asia and partially

<sup>27</sup> The Ottoman assistance continued till the eve of the expedition of Sultan Selim I in 1516. For instance, Selman Reis with Yeşbek, his close associate, led the Mamluk navy containing 8 kadirga, 3 galyata and kayık (smallest vessels). It also included 1000 Ottoman soldiers (Mughul, 1967: 40).

<sup>28</sup> In fact, this competition gained more significance in the 17<sup>th</sup> century through the interventions of the Dutch and the British at the same time to the multilayer commercial affairs in the whole region. And this process was converted into another stage of eco-political habitat once those European seafarer nations accumulated knowledge and territorial access (Souza, 2013: 104-5).

north-west India- "between 1050 and 1500 were all land-based and more interested in armies than in navies". Their significant revenues were provided by the war engagement and agricultural taxes. Furthermore, probably the most important one is that those polities gained self-sustained economies in their regions. On the other hand, without declining the importance of the "caravan trade," which appears to have been the result of geographic features of the Arab lands. These communities were again the secondary actors in commercial networks between the Indian Ocean and the Mediterranean basin (Guilmartin, 1974: 259; Risso, 1995: 42).<sup>29</sup> As I cite elsewhere in this article, the Ottomans tried to respond to the invitations of the other nations including the Acehnese to the maritime expeditions in the oceanic environment. This is a logical and neutral evaluation of the Ottomans' engagement with the maritime processes shared by some writers, such as those considered 'experts' of the Ottoman State (Brockellmann, 1992: 249).

## Political Consciousness

If we remember the era just after the invasion of Timur in the eastern part of Anatolia in 1402, which was a real threat to the political and territorial sovereignty of the Ottomans, it caused "the birth of Ottoman historical consciousness," as argued by some writers (Kastritsis, 2013: 4). The problem is why the Ottomans did not develop further engagement against the Portuguese threat in the whole Indian Ocean.

A closer look at the content of the Aceh letters submitted by hand with Aceh envoys in İstanbul in the year around 1567, just after the demise of Süleyman The Magnificent, in the battleground in Szigetvar, Hungary, is pertinent to comprehend significantly what happened between these two sovereign states, namely the Sultanate of Aceh Darussalam and the Ottoman State.<sup>30</sup> This issue of sovereignty

29 This description of land-based states is relevant with the Turkish ones as well. Since their departure from the arid lands of the Central Asia Turks moved constantly to the West. Their objective, after being self-conversion process to Islam, during both the Seljuki and the Ottomans, was to salvage humanity in the 'known' land geographies from Central Asia till Byzantium lands (Turhan, 2003: 211).

30 The earliest official communication by Sultan Selim II were September 1567 as seen in the BOA records: i) A.DVNSMHM.d. 7.234.975.Ra 13 (17 September 1567). Açe Padişahı Sultan Alâeddin elçi ve mektup göndererek Portekizliler'in müslümanlara saldırılarda bulunduklarını bildirip yardım talep ettiğinden; (English Tr.: Since Aceh Sultan Sultan Alaeddin sent an ambassador and a letter, informing that the Portuguese were attacking Muslims and asking for help); ii) A.DVNS.MHM.d.7.236.975.Ra 13 (17 September 1567). Kurdoğlu Hızır Kaptan'ın Açe Padişahı Sultan Alâeddin'den gelen yardım talebi. (English Tr.: Kurdoğlu Hızır Kaptan's request for help from Aceh Sultan Sultan Alaeddin). The mentioned letter was written in Arabic. However, as it is well documented the Malay language was well known in the whole Archipelago, in particular, the port cities and not only the various Malay ethnicities but also the foreigner traders including the Portuguese got used to this lingua franca to conduct their commercial activities (Groeneboer, 1998: 23). It is not known what medium of communication the Ottoman authorities or

of the Sultanate of Aceh Darussalam did not only contain its region, namely, North Sumatra, but extended to outer spaces of the Island of Sumatra and across the Malacca Straits. The latter is observed in the military actions conducted by the Aceh polity to the city of Malacca under the Portuguese political hegemony. As the late Teuku Iskandar argued regarding cultural spheres,<sup>31</sup> Aceh was the hub of all Malay regions in the *longue durée* between the 14<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries. Politically, Aceh had a solid representative power among the Malay polities during the era of Al-Qahhar in the 16<sup>th</sup> century. Moreover, although al-Qahhar states in his letter that "others left Aceh alone in her struggle against the Portuguese", it is understood that there was a significant level of cooperation between the Acehnese and "many princes of the east" and they attacked Malacca "as united power" in 1567 (Sousa 1695: 256)<sup>32</sup> which is obviously in line with the discourse of Teuku Iskandar.

The Sultanate of Aceh Darussalam attempted to communicate and collaborate with the Ottoman States in the context of changing Indian Ocean trade affairs during the 16<sup>th</sup> century. The fundamental cause of this correspondence seems to be the possession of the military technology of the Ottoman army. This technological advancement was a reality in the second part of the 15<sup>th</sup> century, and its continuity was observed in the first part of the 16<sup>th</sup> century. I think the Acehnese were informed and acknowledged the military might of the Ottomans. Furthermore, it is logical because of the former's communication and interactions with the Western part of India during those decades. As argued by some writers, it is evident that this military advancement of the Ottomans was fundamentally based on their "continuous ghazi warfare" towards the Byzantine territories (Guilmartin Jr, 1974: 257).

The letter -dated letter dated 07.01.1566- of Sultan `Alā al-Dīn Ri`āyat Syah al-

artisans who are assumed to have been assigned to travel to Sumatra utilized during their interactions with Acehnese. As a conclusion, the letter sent by al-Qahhar must have been translated by someone either from Gujarat -because of the interlocutorship of the ruler of Gujarat as argued in elsewhere in this article- or in Hijaz region under the Ottoman control. In addition, the other letters transmitted from Aceh to Istanbul are yet to be discovered and these will definitely help the researchers to comprehend the nature of these documents.

31 For details See: Teuku Iskandar. (2007). "Aceh as a Muslim-Malay Cultural Centre (14<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> Century)".

32 Al-Qahhar seems to have been very sure to gain the sovereignty in Malacca after this military venture. Because he prepared well militarily containing "450 sailing vessels, 200 brass cannons and almost 20.000 soldiers" and including as a tradition in the region applied in similar conditions, his wife and children accompanied him to ascend to the rulership of this important city (Sousa, 1695: 256). This data from the Portuguese sources provides us that Aceh had already possessed brass cannons, vessels -though the scope of them not clarified-, and significant number of human resources. These huge material sources reveal that al-Qahhar had already planned to attack to Malacca to end the Portuguese occupation. And sending an envoy with the detailed letter to the Ottoman court which is cited multiple times through Razaulhak Şah's article in various places in this paper- was no doubt a part of this grandeur strategic plan. However, the response of the Ottomans was too slow and recurring correspondences did not provide any healthy conclusion.

Qahhār (1538-1571) reflects the political intention and consciousness of the Aceh ruling elite in that period.<sup>33</sup> It proposes a more constant and sustained collaboration with the Ottoman court. I strongly argue that the Aceh political elite invited the Ottomans to take part in the developments in the Indian Ocean spice trade seriously. If one wishes to name it correctly, it should undoubtedly be 'spice diplomacy'. If one traces the constant developments in the Indian Ocean, it appears that commercial interactions were not limited with spice products. But items such as cloth, fabric, porcelain, silk, and some others became also important for the country and intercontinental trade affairs (Godinho, 1993: 28). This approach of the Acehnese explicitly corrects the mistakenly perceived argument that the Aceh's venture of sending envoys and letters to İstanbul was a mere demand of military assistance from the Ottomans. The Acehnese had acquired military equipment and ammunition from the regional states. The Portuguese witnessed one example of the latter statement in the 16<sup>th</sup> century in Mazulapatan where one of the biggest vessels, "loaded with full of ammunition," belonged to the Aceh ruler (Sousa, 1695: 369).<sup>34</sup>

Hence, whether the Ottoman court did give an essential response to this invitation and acted accordingly is quite suspicious. Although there was an attempt of the Ottoman ruling elite to respond to the requests of the Aceh envoy and the letters sent by the Aceh Sultan, as observed in the correspondences mentioned in "Mühimme Defterleri 7",<sup>35</sup> the realization of these attempts seems to have failed significantly. There is no doubt that there were obvious reasons, such as the Yemen political revolt called the Imam Mutahhar revolt (H. 975 / C. E. 1567). Moreover, the Cyprus issue, which was under the control of Venice, occurred in 1570, and only after two more extraordinary siege processes in 1571 and 1572 was the island conquered by the Ottoman navy (İnalcık, 1973: 41; Kunt, 2014: 1, 2; Gaiduk, 2003: 69; Razaulhak Şah, 1967: 379).<sup>36</sup>

33 The mentioned letter was found by Razaulhak Şah, an Indian researcher, in the library of Topkapı Palace in the second part of the 1960, while he was conducting his own research different from Aceh and/or the Archipelago. This incident even provides us some insight about how the Ottoman palace elite or foreign affairs department classified the historical documents without any geographical considerations.

34 The Acehnese seem to have gained significant navy power and incidentally encountered with the Portuguese forces in the open sea. As expressed in some sources that the Acehnese attacked with a lesser number of forces to the Portuguese, the latter had to be prepared by certain other "squadrions" from the Portuguese and attacked an Aceh port and gained victorious (Sousa, 1635: 291). The Portuguese leaving the Chaul port to search for the Acehnese fleet encountered with them near that port. The latter is said to have had "sixty sail with well manned and provided with cannon" led by the Sultan and his heir in the same period (Sousa, 1695: 292).

35 Mühimme Defteri. (1995). 7 Numarali, (975/1567-1569), Özeti-Transkripsiyon ve İndeks I, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 28, Ankara.

36 As it is clearly observed and understood from the letter dated on 15.01.1568 released by Sultan Selim II justified the reason why the flotilla could not set off to Sumatra (Razaulhak Şah, 1967: 379).

It is obvious that the conquering process conducted in 1571-72 disrupted the materialization of the intention to set off several vessels to Sumatra.<sup>37</sup> However, the answer might have been beside these factual developments. Since the later part of the reign of Süleyman the Magnificent was criticized because of some declining meritocracy in the Ottoman civil and military bureaucracy, as argued by some historians including Sariyannis (2008: 128)<sup>38</sup>, one can be inclined to interpret the aloofness of the Ottoman ruling elite to the Indian Ocean affairs.

As observed in BOA texts and some other texts commenting on these authentic sources, the Sultan of the Ottomans promised to send the flotilla to Sumatra Island once they completed the expedition in Yemen (Razaulhak Şah, 1967: 381).

The attempt of Sultan al-Qahhar, the Aceh Sultan, to send his envoy to Constantinople with a known letter dated 07.01.1566 was a strategic move for a sovereign state in the Archipelago. "During the visit, while the envoy revived the idea of being a vassal state of the Ottoman by sending annual tribute,<sup>39</sup> Sultan Selim II kindly declined this idea, arguing the geographical distance between the two states (Feridun Bey, 991/1583: 549, 550; Reid, 1969: 398; Hurgronje, 1906: 209). It might be urged here that Sultan Selim II declined the offer of the Acehnese to pay yearly tax, which was regarded as a significant income from the vassal states and can be considered a clue of the political continuity of the Ottoman court. As seen in the court meeting in 1525, the Ottoman authorities did not decide in favour of the developments in the Indian Ocean, and Sultan Selim II<sup>40</sup> also did not approve the

37 During the same years, Iberian Muslim communities requested assistance from the rule of Selim II which seems to be parallel to the Aceh's attempt to some extent, and interestingly the response of Selim II was similarly telling that after the Cyprus expedition the Ottomans could take into consideration the mentioned request from Iberian Muslims. But neither was there any relevant development about it, although the Ottomans gained territorial sovereignty of the Island of Cyprus. And the writer of this short article does not refer to anything pertaining to the Indian Ocean developments (Emecen, (n.d.): 3). In particular, the defeat at Lepanto in 1571 must have caused a significant material and psychological obstacles in the Ottoman court and it is no doubt that the Ottomans could not materialize the half-promised assistance to the Iberian Muslims (El-Hareir, 2016: 33).

38 For details, See Sariyannis, M. (2008). "Ottoman Critics of Society and State", *Archivum Ottomanicum*, (ed.), György Hazai, 25, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 128 (127-150). The idea of Sariyannis must have based on Lütfi Pasha's *Asafname* which criticizes the bureaucratic system during the era of Süleyman the Magnificent as referred elsewhere in this paper.

39 This is because of the Acehnese political elite' consideration of the Ottoman rulers as the highest authority in Islam as acquiring the title of Caliph. It is known that Süleyman I "added the title of Caliph to the long catalogue of his dignities in 1538" (Coles, 1968: 36). And it is highly possible that because of this religious mindedness the Acehnese attempted to send valuable presents with their own vessel which was caught and sank by the Portuguese (Boxer, 1969b: 418). The visit of the Aceh envoy to Istanbul is referred in the writings of Koca Sinan Pasha to the Sultan who seems to be Sultan Selim II (Salihlioğlu, 2004: 108).

40 There is also a crucial change in the attitude of the Ottoman rulers since the reign of Selim II. While the first ten sultans led the army and regularly left the capital city based on the "ghazi phenomenon" which is

political contract of the Acehnese. Of course, the potential decision would no doubt significantly impact the state's future.

This was not the initial stage of the relationships between these two sovereign states. As understood from other documents in the Presidential Ottoman Archive in Istanbul, Aceh had been aware of the developments regarding the Ottomans' territorial expansion in Hijaz and communicated with the authorities in the Hijaz region. Furthermore, later, the Ottomans or the Hijaz government sent an Ottoman envoy called Lütfi (1488?-1563) (Razaulhak Şah, 1967: 375-6). Nevertheless, the Ottoman sources do not inform us about the earliest engagement of the Acehnese nor provide us with someone called Lütfi as an envoy to Sumatra (Braginsky, 2012: 230).<sup>41</sup> Besides, an article at *al-Jawaib* printed in Istanbul and Cairo, pertains to the earliest connection between the two states. Based on this piece of the article the relations are described as follows: "And in the year Hijri 922 during the reign of the excellent Faramah (Firman) Shah, it attained the great honour and durable pride of coming under the protection of the high Ottoman Empire the late Sinan Pasha<sup>42</sup> mediated this during the days of the late Sultan Selim Khan and it (Sumatara) obtains from him a decree that contained the acceptance of protecting it. Moreover, in the year Hijri 1267, Sultan Alauddin Mansur Shah sent a messenger to the great Astanah to renew the decree of protection, in which the late Sultan Abdul Majid Khan blessed him with a decree immersed in dependency and with an engraved medal. Ever since this country came under the protection of the high Ottoman Empire, its ships were honoured by (wearing) the Ottoman flag, and the number of Sultans who headed it was thirty-five Sultans; the first was Ghazi Sultan Johan Shah, who was mentioned previously and the last was Sultan 'Ala Muhammed Shah whose reign was in the year 1287."<sup>43</sup>

---

considered as the fundamental root of the state, Selim II was the one initiating the change not to attend any military expedition himself (Coles, 1968: 34).

41 On the other hand, Razaulhak Şah asserts that the letter written by Sultan Selim II to Aceh sultan confirmed the voyage of Lütfi to North Sumatra (1967: 376, f.n.2). There is one Lütfi Pasha who ascended, in the course of time, the civil bureaucracy and was appointed as Grand Vizier during the reigns of Yavuz Selim I and Süleyman the Magnificent. After he preferred to retirement because of the corruption -as he himself stated- in the system he initiated writing historical accounts which is called *Asaf-nâme* (Refet, 1341; 5; Sarı Mehmed Paşa, 1935: 19; Lewis, 1962: 71; Howard, 2011: 185; Uğur, 1989: 243). His work is known as follow: Lütfi Paşa. (1341). *Tevarih-i Ali Osman*. It is not clear whether this Lütfi Pasha visited Sumatra in the first part of the 16<sup>th</sup> century or not. On the other hand, Lütfi Pasha accompanied to Barbaros Hayrettin, the Admiral of the Ottoman Navy during the expedition in the Mediterranean in 1537 (Parmaksizoğlu, 1983: 63). Besides, the infamous Koç Bey explains in details similar social and bureaucratic degradation in the Ottoman system in his notorious report (2018: 55).

42 Cf. f.n. 40. This 'Sinan Pasha' must be Koca Sinan Pasha who presented his telhis to Sultan Selim II including the Aceh envoy's visit to Istanbul (Salihlioğlu, 2004: 108).

43 "On the conditions of the Kingdom of Acen or Aca", *Al-Jawaib*, p. 229, 230 (Note: This is from an online source. It seems some of the issues of *Al-Jawaib* were compiled in a book.); "On the conditions of Açın"

However, the very beginning of these developments provides insight into the political consciousness and intention of the Aceh political elite. This initiation of the Acehnese elite cannot be regarded as an unintended practice or randomly occurred without any political purpose. However, it shows that they had already acquired information about the Ottomans and the political changes in the Hijaz region. It was a novel venture to divert the international relations between the Ottoman lands and the Archipelago. The primary factor of this diversion of political interest and giving a new direction to it was undoubtedly the increasing competition of spice trade between the Archipelago and Western Europe. Spice as a commodity gradually caused growing tension and conflict and later direct military engagements among the diverse actors in the Archipelago and Western Europe.

One can argue that the demands of the Sultanate of Aceh Darussalam ought to be given lengthy consideration because of its constant attempts to engagement with the Ottomans. The present writer asserts that the Acehnese' endeavours served to recognize and establish a sort of global perception of territorial legitimacy and hegemony of the Ottoman rulers. However, some questions are yet to be answered about whether any political brokers might have led the Aceh envoy to İstanbul. It is known that the current data does not provide us information about where and how the Aceh delegation lived and survived in İstanbul. In this regard, some potential candidates might have led the Aceh envoy to the Ottoman court. One of these parties might have been the Hijaz governor and his appointed staff; the second alternative was the consul of Venice in İstanbul. The rationality of the second is based on the constant engagement of the Venice traders in the Middle East to transact and transport the eastern merchandise to Europe. As Reid (2005: 79) stated, a Venetian ambassador in İstanbul in 1562.<sup>44</sup>

(Fi ahval-i memleketi Acin", Al-Jawaib, No. 237, p. 2. (Note: It is understood that the content of the related news is the same in different issues of this newspaper, but the titles are different.

44 It is probable that during the 1560s there were few Aceh envoys were dispatched to İstanbul if the statements of Braginsky are taken into consideration. He asserts that there were multiple engagements between the Aceh and the Ottomans through the latter's sending five envoys to İstanbul between 1547 and 1571 during the reigns of both Süleyman I and his son, Selim II. And as a response of the Ottoman court (Braginsky, 2012: 230). This data should be read synchronically with the statements of the letters sent by the Acehnese -in particular, commencing from the letter dated 07.01.1566 sent by al-Qahhar and the similar historical anecdotes referred in the letters sent in the 19<sup>th</sup> century pre-Dutch War era (For some statements, See Razaulhak Şah, 1967: 374). Another reference in the latter article as a supporting reference to earlier communication between the Aceh Sultanate and the Ottoman Court is stated by citing the names of Acehnese envoys namely Omar and Hussain sent to the Ottomans (Razaulhak Şah, 1967: 374). Besides, there is another reference to the Ottomans' envoy to North Sumatra in 1564-65. Again, same suspiciousness appears over here about whom initiated this voyage (Razaulhak Şah, 1967: 375). Supporting to the point of view of Braginsky, it is understood that the Aceh Sultan sent another envoy with a letter in 1569 and the Ottoman court released a letter with a statement that the current situation did not allow them to set off the flotilla. But they promised that once the conditions would improve, they would immediately take an action (Razaulhak Şah, 1967: 379). Interestingly, the similar fates of the two earliest minor navies of

Reid gives ample space to explain Ottoman-Aceh relations. Although he could not access the Ottoman sources, he utilized Western and some secondary Turkish sources. In this regard, he refers to an initial stage of the relations to the Western witness, namely, the Venetian ambassador in İstanbul in June 1562. Based on this observation, the Venetian ambassador, an envoy, or a delegation from Aceh, has proposed collaborating with the Ottoman court.<sup>45</sup> Moreover, since the early period, Venice appointed an envoy in İstanbul to develop sustainable collaboration with the Ottoman ruling elite. This collaboration became more meaningful after the Ottomans gained territorial sovereignty in the Hijaz region, which was undoubtedly adjunct to the Indian Ocean and trade affairs with the East.

## Conclusion

With the Portuguese's maritime presence in the Indian Ocean and their strong bond to the Archipelago commencing from gaining territorial sovereignty in Malacca, the traditional spice trade route became globalized. It is obvious that this period was crucial globally not only in the context of the 16<sup>th</sup> century. But, beyond the colonization process, considering the constant transactions and commercial networks between the whole Indian Ocean and Western Europe there was a strong tendency for the creation of a new economic system which appeared in the form of capitalism in Western Europe. On the other hand, the political venture of the Acehnese court by sending envoys and letters to the Ottoman State during the reign of al-Qahhar, the third sultan of the Sultanate of Aceh Darussalam was a critical juncture in the history of both the Acehnese and the Ottomans.

Although there have been significant works to comprehend the relationships between the Acehnese and the Ottomans, we still need complete written documents for further analytical studies and interpretation of the past realities. However, as argued in this article, the Ottoman sources do not enlighten us about the earliest period of communication processes. This provides an insight into how the Ottoman foreign affairs institution -administered by *Reisülküttab* in the earliest period- did not maintain a constant and sustainable documentation process. Unsurprisingly, the

---

the Ottomans failed in the years of 1509 and 1510 on the way from İstanbul to Egypt because of the natural cause and the Rodosean Chivalries attack. These were the initiation to assist to the Mamluks because of the growing Portuguese threat Kansu Al-Gavri, the ruler of the Mamluks, corresponded with Bayezid II (1481/1512), the Ottoman ruler. Only in the third attempt could the Ottomans successfully transmit the assistance containing essential materials to build vessels (Mughul, 1967: 38).

45 Anthony Reid. (2005). An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra, Leiden: KITLV Press, p. 79.

Ottoman authorities did not have a healthy recording or documentation, particularly with the developments in line with the Indian Ocean which contain the earliest stages of relationships. It is proved to some extent while one reads some similar issues pertaining to the Ottoman sources. For instance, Princeton, a prominent university, initiated academic research about the causes of the decline in the Ottoman State. Beyond the linguistic barrier, since most works were written in Ottoman Turkish, there seems to be weaknesses in terms of "most of the materials are buried in uncatalogued or inaccessible archives and collections" (Wright, 1935: vii). Although after some decades there have been some improvements in administration and reorganization of the Ottoman document, obvious weaknesses still exist.

Beyond the correspondences mentioned above, the fundamental issue is whether the Ottomans had crucial political consciousness and intentions to expand their relationships and presence beyond the borders of the Arabian Peninsula. Although the prevailing influences of the Ottomans in this region had been witnessed since the reign of Bayezid II, the significant attempt of Selim I was not enough to enhance the Eastern Policy of the Ottoman court. Instead, it was a self-limitation of the maritime ventures to protect the southern portions of the Arabian Peninsula and the Red Sea (Yücel, 1987: 65). And as argued by Razaulhak Şah, all the attempts of the Acehnese did not produce the fruits expected by the Acehnese and the promises of the Ottoman ruling elite. After almost 6-year constant correspondence and exchanging envoys between the two sovereign states, the Ottoman could not send any flotilla to Aceh in North Sumatra (Razaulhak Şah, 1967: 381). In a nutshell, the whole 16<sup>th</sup> century witnessed that the Ottomans did neither develop eagerly any sustainable relationships with the regional powers and states adjunct to the Indian Ocean nor attempt to gain significant portions of the global trade affairs in the same seaway.

## References

- Akar, Şevket Kamil. (2003). Mehmet BULUT, Ottoman-Dutch Economic Relations in the Early Modern Period 1571-1699", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* (Türk İktisat Tarihi Sayısı), Cilt 1, Sayı 1. (429-432).
- Alpers, Edward A. (2014). *The Indian Ocean in World History*, Oxford: Oxford University Press.

- Boxer, C. R. (1969a). *The Portuguese Seaborne Empire (1415-1825)*, New York: Alfred A Knopf.
- Boxer, C. R. (1969b). "A Note of the Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh 1540-1600", *Journal of Southeast Asian History*, 10, (415-428).
- Brown, Edward G. (1930). *A Literary History of Persia*, Volume IV, (Modern Times: 1500-1924), Cambridge: Cambridge University Press.
- Braginsky, Vladimir. (2012). "Co-opting The Rival Ca(n)non: The Turkish Episode of Hikayat Hang Tuah", Vol. 25, No. 2, *Malay Literature December*. (229-260).
- Brockelmann, Carl. (1992). *İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi*, (Çev.: Neşet Çağatay), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Casale, Giancarlo. (2006). "The Ottoman Administration of the Spice Trade in the Sixteenth Century Red Sea and the Persian Gulf", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 29, No. 2. (170-198).
- Coles, Paul. (1968). *The Ottoman Impact on Europe*, London: Thames & Hudson.
- Commissariat, M. S. (1938). A Brief History of the Gujarat Sultanat", *The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. XXVI, (1921-1923), Nos: 74-75, Bombay, Nendelns/Liechtenstein: Kraus Reprint. (99-157).
- Danışman, Zuhuri. (1965). *Ottoman İmparatorluğu Tarihi*, Vol. VII, İstanbul: Yeni Matbaa.
- Danvers, Frederick Charles. (1966). *The Portuguese in India: Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire*, Frank Cass, II. Baskı, Vol. I, London.
- De Koninck, Rodolphe. (1977). *Aceh in The Time of Iskandar Muda*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Durant, Will&Ariel. (1961). *The Age of Reason Begins: A History of European Civilization in the Period of Shakespeare, Bacon, Montaigne, Rembrandt, Galileo and Descartes 1558-1648*, Part VII, New York: Simon and Schuster.
- El-Hareir, (2016). "The Impact of the Great Discoveries on the Islamic World", In *The Different Aspects of Islamic Culture*, Volume Six: Islam in the World Today (ed.), Abdulrahim Ali; Iba Der Thiam; Yusof A. Talib, UNESCO Publishing (37-44).
- Emecen, Feridun. (). "Selim II", *TDV İslam Ansiklopedisi* (pdf-online). (This article is in the printed version of the mentioned encyclopedia. (2009). Cilt 36, pp. 414-418.)

- Faroqhi, Suraiya. (2010). "Empires before and after the Post-colonial Turn: The Ottomans", Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies: A Tribute to Rifa'at Abou-el-Haj, *The Journal of Ottoman Studies*, Volume: 36 Issue: 36, 57, (Guest Editors), Donald Quartaert; Baki Tezcan, İSAM. (57-76).
- Faroqhi, Suraiya. (2005). "Understanding Ottoman Guilds", *Crafts and Craftsmen of the Middle East: Fashioning The Individual in the Muslim Mediterranean*, (ed.), Suraiya Faroqhi, Randi Deguilhem, London: I. B. Tauris. (3-40).
- Feridun Bey. (991/1583). "Fihrist", *Mencuat-i Münsefat*, Reprint, Rabi'ul Akhir 1274, (TBMM Nüshası / Turkish Grand National Assembly (TBBM) Library Version Volume I. (Dem: 71-9443, Yer, 71-5305).
- Feridun Bey. (991/1583). "Taht-El Raja Hakimi Alaaddin Tarafından İsdar Buyurulan Name-i Humayunun Sureti", *Mecmuat-i Münseati*, Reprint, Rabi'ul Akhir 1274. (549-550).
- Feridun Bey. (991/1583). "Bandar Surat Hakimi Recep Han Tarafına Tasdir ve Tebsir buyurulan name-i humayunun sureti", *Mecmuat-i Münseati*, Reprint, Rabi'ul Akhir 1274, (TBMM Nüshası / Turkish Grand National Assembly (TBBM) Library Version Volume I. (Dem: 71-9443, Yer, 71-5305).
- Fleischer, Cornell H. (1986). *Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire, The Historian Mustafa Ali (1541-1600)*, Princeton: Princeton University Press.
- Gaiduk, Ilya V. (2003). *The Great Confrontation: Europe and Islam Through the Centuries*, Chicago: Ivan R. Dee.
- Gerçeksever, Abdulkadir. (2015). "Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki Faaliyetlerine Karşı Osmanlı Devleti Tarafından Ace (1566) ve Gücerat (1538) Sultanlıklarının Desteklenmesi", *2<sup>nd</sup> International Symposium of Turgut Reis and Turkish Maritime History*, (1-4 Kasım, 2013), Proceedings, Vol. I, (ed.: Cihan Yemişçi; Tarık Eray Çakır; Mustafa Gürbüz Beydiz, Cezmi Çoban), Bodrum Belediyesi, Bodrum. (1-20).
- Godinho, V. Magelhaes. (1993). "The Portuguese and the 'Carreira da India', 1497-1810", In *Ships, Sailors and Spices: East India Companies and Their shipping in the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> Centuries*, (ed.), Jaap R. Bruijn; Femme S. Gaastra, Amsterdam: Neha. (1-43).
- Goodwin, Godfrey. (2001). *Yeniçeriler*, (Çev.: Derin Türkömer), İstanbul: Doğan Kitapçılık.

- Groeneboer, Kees. (1998). *Gateway to the West: The Dutch Language in Colonial Indonesia: 1600-1950*, (Tr.: Myria Scholz), Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Guilmartin Jr, John Francis. (1974). *Gunpowder and Galleys: Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hageman, J. (1869). *Geschiedenis Der Soenda-Landen*, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, J. J. Van Limburg Brouwer, Deel XVII, Batavia: Lange&Co.
- Harun, Ramli. (1985). *Hikayat Sultan Aceh Iskandar Muda*.
- Hasan, Masudul. (1988). *History of Islam* (Classical Period 1206-1900 C.E.), Volume II, Lahore: Islamic Publications.
- Hathaway, Jane. (1997). *The Politics of households in Ottoman Egypt*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Howard, Douglas A. (2011). "Osmanlı Nasihatname Türleri ve Mit", *Erken Dönem Osmanlılar: İmparatorluğun Yeniden Yazımı*, (ed.), Virginia H. Aksan; Daniel Goffman, (Çev.: Onur Güneş Ayas), İstanbul: Timaş Yayınları. (185-222).
- Huart, Clement. (1972). *Ancient Persia and Iranian Civilization*, (Reissued), London: Routledge&Kegan Paul.
- Hurgronje, Snouck. (1906). *The Acehnese*, (Tr.: A.W. S. O'Sullivan), Vol. I, E. J. Brill, Leiden.
- Irwin, Robert. (2018). *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*, Princeton: Princeton University Press.
- İnalcık, Halil. (1973). *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600*, (Tr.: Norman Itzkowitz; Colin Imber), London: Weidenfeld and Nicolson.
- Iskandar, Teuku. (2007). "Aceh as a Muslim-Malay Cultural Centre (14<sup>th</sup> -19<sup>th</sup> Century), *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias (BRR), Banda Aceh, Indonesia, 24-27 February 2007.
- Iskandar, Teuku. (1978). *Hikayat Aceh (Kisah Kepahlawanan Sultan Iskandar Muda)*, *Disertasi*, (Alih Bahasa: Aboe Bakar), Seri Publikasi Nomor 1, Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh.
- Kastritsis, Dimitri. (2013). "The Historical Epic Ahval-i Sultan Mehemed (The Tales of Sultan Mehmed) in the Context of Early Ottoman Historiography", In *Writing*

- History at the Ottoman Court: Editing the Past, Fashioning the Future*, (ed.), H. Erdem Çipa; Emine Fetvacı, Bloomington: Indiana University Press. (1-22).
- Koçi Bey. (2018). *Koçi Bey Risalesi*, (Hazırlayan: Yılmaz Kurt), 4. Baskı, Ankara: Akçağ Yayıncıları.
- Kunt, Metin. (2014). "An Ottoman imperial campaign: suppressing the Marsh Arabs, central power and peripheral rebellion in the 1560s", *The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları Dergisi)*, No. 43. (1-18).
- Lane, Kris. (2019). *Potosi: The Silver City that Changed the World*, Oakland: University of California Press.
- Refet, Muallim. (1341). "Müellifin Eserine Dair Birkaç Söz", *Tevarih-i Ali Osman*, (Lütfi Paşa), Birinci Tab', Asarı Atika Müzesi Kütüphanesi Hafız Katibi Ali, İstanbul: Matbaa-i Amire. (3-6).
- Lewis, Bernard. (1962). "Ottoman Observers of Ottoman Decline", *Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (March). (71-87).
- Lütfi Paşa. (1341). *Tevarih-i Ali Osman*, Birinci Tab', Asarı Atika Müzesi Kütüphanesi Hafız Katibi Ali, İstanbul: Matbaa-i Amire.
- Macro, Eric. (1968). *Yemen and the eastern world*, London: C. Hurst&Co.
- Mughul, M. Yakub. (1967). "Portekizlilerle Kızıldeniz'de Mücadele ve Hicaz'da Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi Hakkında bir Vesika", *Belgeler*, Cilt II, Sayı 3-4 (1965), Türk Tarih Kurumu Basımevi. (37-50).
- Mustafa Ali, Gelibolulu. (1997). *Kitabü't-Târih-i Künhü'l-Ahbâr*, I. Cilt, II. Kısım, (Haz. Ahmet Uğur; Musatfa Çuhadar; Ahmet Gül; İbrahim Hakkı Çuhadar), Kayseri.
- Mühimme Defteri. (1995). 6 Numaralı, (972/1565-1565), Özeti-Transkripsiyon ve İndeks II, T. C. Başkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 28, Ankara.
- Orhonlu, Cengiz. (1970). "Hint Kaptanlığı ve Piri Reis", *Belleten*, Cilt 34, Sayı 134, (Nisan), Ankara: Türk Tarih Kurumu. (235-254).bax
- Owen, Roger. (1976). "The Middle East in the Eighteenth Century-An 'Islamic' Society in Decline? A Critique of Gibb and Bowen's Islamic Society and the West", *Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies)*, Vol. 3, No. 2. (110-117).
- Özbaran, Salih. (2007). "Osmanlılar ve Deniz: 16. Yüzyıl Hint Okyanusu Bağlamında Yeniden Bakış", In *Türkler ve Deniz*, (ed.), Özlem Kumrular, İstanbul: KitapYayinevi.

- Özbaran, Salih. (1972). "The Ottoman Turks and The Portuguese in the Persian Gulf, 1534-1581", *Journal of Asian History*, Vol. 6, Wiesbaden: Otto Harrassowitz. (45-87).
- Öztuna, Yılmaz. (1983). *Büyük Türkiye Tarihi -Başlangıcından Zamanımıza Kadar-*, Dördüncü Cilt, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
- Parmaksızoğlu, İsmet. (1983). "Lütfi Paşa'yla İlgili Yeni Bir Belge", *Belleten*, Türk Tarih Kurumu, Cilt XLVI, Sayı 181-184, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. (63-65).
- Pieris, P. E. (1913). *Ceylon: The Portuguese Era (History of the Island for the Period 1505-1658)*, Vol. I, Colombo: The Colombo Apothecaries Co.
- Polat, Gaye Danışman. (2017). "Kamal, An Instrument of Celestial Navigation in the Indian Ocean, as Described by Ottoman Mariners Piri Reis and Seydi Ali Reis", *Osmanlı Bilimi Araştırmaları*, XIX/1. (1-12).
- Prange, Sebastian R. (2009). "Like Banners on the Sea: Muslim Trade Networks and Islamization in Malabar and Maritime Southeast Asia", *Islamic Connections: Muslim Societies in South and Southeast Asia*, (ed.), R. Michael Feener; Terenjit Sevea: Singapore: ISEAS. (25-47).
- Razaulhak Şah. (1967). "Açı Padişahı Sultan Alaeddin'in Kanuni Sultan Süleyman'a Mektubu", (373-409).
- Reid, Anthony. (2005). *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, Leiden: KITLV Press.
- Reid, Anthony. (2000). *Charting The Shape of Early Modern Southeast Asia*, Cornell University Library, Ithaca, New York.
- Reid, Anthony. (1969). "Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia", *JMBRAS*, Vol. X, No. 3, December.
- Risso, Patricia. (1995). *Merchants and Faith: Muslim Commerce and Culture in the Indian Ocean*, Westview Press.
- Salihlioğlu, Halil. (2004). *Koca Sinan Paşa'nın Telhisleri*, (Yay. Haz.: Halil Salihlioğlu), İstanbul: IRCICA.
- Sarı Mehmed Pasha. (1935). *Ottoman Statecraft: the Book of Counsel for Vezirs and Governors*, (Tr.: Walter Livingston Wright), Princeton: Princeton University Press.
- Sariyannis, Marinos. (2008). "Ottoman Critics of Society and State", *Archivum Ottomanicum*, (ed.), György Hazai, 25, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (127-150).

- Sariyannis, Marinos. (2019). "Ottoman Ibn Khaldunism Revisited: The Pre-Tanzimat Reception of the Mudaqqima, From Kınalızade to Şanizade", in M. Sariyannis, (ed.), *Political Thought and Practice in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete IX: A Symposium Held in Rethmno, 9-11 January 2015*, Rethymno: Crete Universit Press.
- Solakzade, Mehmet Hemdemi Çelebi. (1298/1880). *Solakzade Tarihi*, Bab-ı Ali: Mahmud Bey Matbaası.
- Sousa, Manuel de Faria y. (1695). The Portuguese Asia or The History of the Discovery and Conquest of India by the Portuguese, (Tr.: John Stevens), London: C. Brome.
- Souza, George Bryan. (2013). "Opium and the Company: Maritime Trade and Imperial Finances on java, 1684-1796"; *Expanding Frontiers in South Asian and World History*, (ed.), Richard M. Eaton, Munis D. Faruqui, David Gilmartin, Sunil Kumar, Cambridge: Cambridge University Press. (104-123).
- Sulaiman, Jamali. (1984). "Laporan Khusus Sumut Aceh: Kapan Lada Meriam Lada Secupak", *Waspada*, Rabu 4 Juli, 1984, No. 13811, Tahun 38, p. 5.
- Şere, Abdurrahman. (2014). *Osmanlı Tarihi* (Fezleke-i Devlet-i Tarih-i Osmaniye), (Günümüz Türkçesine Adaptasyon: M. Sait Karaçorlu), İstanbul: Volga Yayıncılık.
- Şışman, Ayşin. (1999). "1702-1708 Tarihleri Arasında Türk-Fransız İlişkilerinde Konsolos Arzları ve Bunlara Ait Hükümler", *Belleten*, 63(237). (509-557).
- Thomaz, Luis Filipe F. R. (1995). "The image of the Archipelago in Portuguese cartography of the 16<sup>th</sup> and early 17<sup>th</sup> centuries", *Archipel*, Volume 49. (79-124).
- Turan, Osman. (2003). *Selçuklular Tarihi ve Türk-islam Medeniyeti*, 12. Basım, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Uğur, Ahmet. (1980). "Asaf-name-i Vezir Lütfi Paşa", *İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi* IV, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basimevi.
- von Kraelitz, Friedrich. (1330/1914). "İlk Osmanlı Padişahları'nı İsdar Etmiş Oldukları Bazı Beratlar", *Tarih-i Osmani Encümeni*, İstanbul, Cilt V, Sayı 28. (242-250).
- von Hammer Purgstall, Joseph. (1984). *Osmanlı Devleti Tarihi*, Cilt V, İstanbul: Üçdal Neşriyat.
- White, Sam. (2011). *The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire*, Cambridge: Cambridge University Press.

Wright, Walter Livingston. (1935). "Preface", *Ottoman Statecraft: the Book of Counsel for Vezirs and Governors*, Sarı Mehmed Pasha, Princeton: Princeton University Press. (vii-x).

Yücel, Yaşar. (1987). *Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl*, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

"On the conditions of the Kingdom of Acen or Aca", *Al-Jawaib*, p. 229, 230.

"On the conditions of Açin" (Fi ahval-i memleketi Acin", *Al-Jawaib*, 14 May (el Francis), sene 1873, (17 Rabiul Awal 1290), No. 237, p. 2.

**Mehmet Özay** is currently a full time lecturer and researcher in International Institute of Advanced Islamic Thought and Civilization at International Islamic University of Malaysia (ISTAC-IIUM). Between 2007-2010, Özay became a visiting lecturer in Education Faculty and Post-graduate studies at Islamic State University of Ar-Raniry and taught Sociology and Anthropology in the department of Social Sciences and Politics (SOS-POL) at Syah Kuala University (Unsyiah) and Muhammadiyah University in Banda Aceh, Indonesia. He worked as a researcher and lecturer at the Faculty of Education, the University Technology Malaysia (UTM), Skudai, Johor Bahru between 2010-2013. Between post graduate lecture works he was awarded research grants on *Colonial Education; Malay Language and Nationalism; and Traditional Islamic Education in Malay World; Aceh History and Sociology*, by Research Management Center at UTM. His further career endeavour was at journalism field leading socio-political coverage of the Malay World under Turkish national media, Anadolu Agency (AA) and Turkish Radio and Television (TRT), before joining Ibn Haldun University in İstanbul from 2017 to 2021. He has written almost a dozen of books and more than 20 book chapters and edit books written in Malay, English and Turkish languages. His expertise is highly interdisciplinary in the field of socio-politics, history, and religio-anthropological field in Indonesia, Malaysia, Myanmar, India and other Asia-Pacific regions. The academic articles as products of research activities during all these years in Indonesia and Malaysia were presented at various international conferences and published in Turkish, English languages in international journals.

# Aceh: Beberapa Catatan Tentang Jalur Perdagangan dan Budaya (Perspektif Historis)\*

Prof. Amirul Hadi, MA, Ph.D

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

*In Sumatra Vartahema visited the flourishing port of Pedir, near Acheh. Every year, he tells us, eighteen to twenty ships were laden with pepper for China. It was also produced an immense quantity of silk and much benzoin. So extensive was its trade, and so great the number of merchants resorting there, that one of its streets contained about 500 money-changers (Badger, sebagaimana yang dikutip dalam Hall, 1962: 235)*

## A. Pendahuluan

Kutipan di atas merupakan statemen dari Badger dalam karyanya *The Travel of Ludovico Di Vartahema* (1863), yang dikutip oleh D.G.E. Hall. Deskripsi ini kemudian diperkuat oleh pelancong Portugis --termasuk Tome Pires, Duarte Barbosa, dan Joao de Barros-- yang mengunjungi kawasan ini pada awal abad ke-16. Mereka menyaksikan betapa Pedir merupakan sebuah kerajaan pantai yang kaya dan terkenal yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Menurut de Barros, Pedir merupakan "the principle source of supply for pepper. A condiment which was so greatly valued by the nations of the East and the West." Pedir, oleh karena itu, merupakan "the best of the island." (de Barros, 1563-1615: 120).

Semua pusat kekuasaan (kota-kota pelabuhan) di kawasan ini merupakan pusat aktifitas produksi dan perdagangan rempah, yang mampu mendatangkan para pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Pasai, Pedir (Pidie), Daya, Aceh dan lainnya.

Inilah yang memunculkan fenomena pertemuan antar budaya yang dibawa oleh para pendatang. Kekayaan khazanah budaya inilah yang didapat oleh Aceh dalam

---

\* Makalah yang disampaikan pada "Seminar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 (the Seminar on Culture of the 8<sup>th</sup> Aceh Cultural Festival)," Banda Aceh, ACEH, 6-7 November 2023.

sejarah berkat perdagangan, khususnya rempah. Diskusi yang diangkat di sini fokus pada *immaterial culture*, bukan pada *material culture*.

Model yang diikuti dalam analisis adalah perspektif yang dikembangkan oleh Fernand Braudel, yaitu *global history* atau *total history*. Sarjana Perancis ini sukses melakukan paradigma yang revolusioner dalam kajian sejarah, yaitu perubahan fundamental pada fokus, dari pusat kekuasaan dan elitis kepada kelompok manusia (masyarakat), lingkungan (geografis), struktur, dan mentalitas yang membentuk masyarakat. Ini merupakan sebuah kajian sejarah yang menggunakan pendekatan "multi- disiplin", dimana geografi dan ekonomi memainkan peran penting. Beliau juga merupakan tokoh mazhab "the Annales", yang menekankan pada sejarah mentalitas yang bernuansa psikologis. Catatan dan pemikiran singkat di sini mengikuti pola ini.

## B. Budaya: Sebuah Konsep

Budaya identik dengan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, budaya muncul dari dan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, budaya (*culture*) merupakan objek kajian disiplin ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Mengkaji budaya bermakna mengkaji manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang kompleks dan memiliki natur biologis yang berbentuk material dan psikologis yang bersifat internal dan spiritual.

Dua dimensi dari natur manusia inilah yang memberikan warna bagi perkembangan kajian terhadap prilaku manusia, termasuk budaya di dalamnya. Dalam hal ini, secara garis besar para ahli ilmu sosial terbagi ke dalam dua kubu utama. Yang pertama adalah kelompok yang menganut konsep "mekanistik" dari prilaku manusia. Dari perspektif ini, prilaku manusia dipandang sebagai sebuah mesin yang bergerak dan beraktifitas sebagai reaksi otomatis, objektif, dan dapat diprediksi terhadap berbagai rangsangan dari luar (lingkungan). Dalam hal ini, aturan (*order*)—yang bersifat internal dan dengan kekuatan yang ia miliki—menentukan jenis prilaku yang terinspirasi oleh faktor luar. Sebagai lawan dari konsep ini adalah jenis pendekatan yang dikenal dengan "subjektif" terhadap prilaku dan aturan. Dari perspektif ini, prilaku sesungguhnya ditentukan oleh sesuatu yang berada di dalam diri seseorang, perasaan, persepsi, dan sensibilitas. Artinya, bentuk prilaku seseorang atau masyarakat tergantung pada apa yang ada dalam pikirannya. Oleh karena itu, pengalaman dan makna dari pengalaman menempati posisi sentral dalam pendekatan ini. Konsep budaya dipahami sebagai "aturan (*order*) yang terkait dengan aktifitas yang penuh makna" (Alexander, 1990: 1-2).

Dalam ilmu-ilmu sosial, pertentangan antara Karl Marx dan G.W. Friedrich Hegel merupakan bentuk dari perbedaan yang kontras antara "mekanistik" dan "bentuk kultural" dalam menjelaskan fenomena sosial. Hegel melihat bahwa dalam perjalanan sejarah manusia terdapat periodisasi. Setiap periode dijelaskan dalam framework tersendiri yang sarat dengan pengalaman yang bermakna. Inilah yang ia maksud dengan *Geist*, spirit dari masa, sebuah konsep yang berkembang di dalam konteks idealisme Jerman yang dapat disamakan dengan "budaya." Sebaliknya, Marx, yang menganut model pemahaman materialis historis terhadap perkembangan, menegaskan bahwa adalah penolakan objektif terhadap kepentingan yang rasional yang merupakan sumber dari sebuah perkembangan, bukan frustasi objektif. Yang menjadi cincin utama adalah terkait dengan wujud ekonomi dan politik, bukan subjektif. Ia memberikan dikhotomi yang radikal antara "superstruktur" (*superstructure*) dengan "dasar" (*base*), atau antara "kesadaran" (*consciousness*) dengan makhluk sosial. Dari perspektif ini, fenomena kultural (budaya)—baik berbagai aturan hukum, ritual keagamaan, maupun seni dan pemikiran intelektual—merupakan bentuk superstruktur yang dipicu oleh dasar, atau kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, fenomena kultural tidak dapat dijelaskan melalui struktur internal atau makna, akan tetapi harus dilakukan melalui kajian terhadap berbagai elemen material yang direfleksikan (Alexander, 1990: 1-2).

Dalam kajian filosofisnya terhadap budaya, Wilhelm Dilthey memberikan tekanan pada sentralitas pengalaman manusia sebagai sumber makna, baik bagi pelaku maupun peneliti. Kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sikap saling memahami berakibat pada transformasi dari pengalaman individual kepada ide yang dianut bersama (*shared ideas*) dan, akhirnya, kepada kekuatan bangunan sistem kultural. Di sini terlihat jelas bahwa filosof ini memberikan tekanan pada peran internal dan subjektif dari sistem yang dibangun ini. Posisi khusus ini, menurutnya, memerlukan metoda "hermenetik," yang ia pahami sebagai sebuah metoda penafsiran. Menemukan natur berbagai struktur internal dan subjektif bermakna menemukan "makna" yang dikandung. Dalam konteks ini, "penafsiran" berangkat dari "pemahaman," tidak semata-mata dari pengamatan (*observation*). Dilthey adalah orang yang pertama dan barangkali masih merupakan pemikir yang memiliki pengaruh yang sangat jauh dalam kajian filosofis terhadap budaya. Hal ini ia lakukan dengan memberikan tekanan pada kajian fenomena sosial yang dilakukan secara ekslusif dari kacamata kultural. Sementara kajian mekanistik menempati posisi kedua, dan ini meliputi kajian matematika, fisika, biologi, dan mungkin juga ekonomi (Alexander, 1990: 1-2).

Sungguh, sebelum akhir abad ke-19, para filosof sosial dan sejarawan cenderung melihat budaya sebagai bentuk ide, atau spirit, yang menjadi dasar bagi kajian

terhadap masyarakat (Smelser, 1992: 4). Perkembangan yang berarti dalam hal ini memperlihatkan bentuknya dalam sejarah teori sosial abad ke-20. Talcott Parson merupakan di antara tokoh terpenting dalam hal ini. Dalam pendekatan "functionalist" yang ia kembangkan dalam kajian sosial, Parson menegaskan bahwa hubungan antara budaya dan kekuatan material tidak dilihat sebagai "pengalaman internal" melawan "faktor luar," akan tetapi dicermati dari tataran analitis dari sebuah dunia empiris yang menyatu. Dari perspektif ini, Parson mencermati bahwa para pelaku melakukan internalisasi terhadap sebuah aturan yang penuh makna (sebuah sistem kultural) yang lebih umum sifatnya dari seperangkat interaksi sosial (sistem sosial) yang mereka sendiri juga merupakan bagian darinya.

Argumen analitis ini bermakna bahwa, pada satu sisi, setiap prilaku sosial memiliki referensi kultural, oleh karena itu ia tidak dapat dilihat secara mekanistik. Namun, pada sisi yang lain, karena dalam teman analitis prilaku-prilaku juga merupakan bagian dari sistem sosial, bukan hanya sistem kultural, perspektif kelompok idealis juga harus ditolak. Parson juga menawarkan sistem analitis yang ketiga, yaitu personalitas, atau berbagai imperatif psikologis. Bagi Parson, prilaku berbentuk simbolis, sosial, dan—pada waktu yang sama juga—berwujud motivasional. Ini bermakna bahwa—dengan memberikan tekanan pada analisis otonomi terhadap sistem kultural, sosial, dan psikologis—Parson telah menemukan jalan keluar bagi dikhotomi antara aliran mekanis dan subjektif, tanpa meninggalkan salah satunya. Di sini terdapat ruang untuk budaya (*culture*), akan tetapi dalam bentuk otonomi yang relatif; dan pada saat yang sama juga dibutuhkan analisa yang lebih berbentuk mekanistik (Alexander, 1990: 4-5).

Konsep budaya yang dikembangkan oleh para antropolog termasuk di antara yang paling berpengaruh pada pemikiran ilmu-ilmu sosial abad ke-20. Budaya di kalangan antropolog, tentu, tidak bermakna hasil karya seni dan prilaku sosial yang baik. Ia lebih mengacu kepada pengalaman yang dipelajari dan diakumulasi. Namun, tidak ada kesatuan definisi yang diberikan oleh para antropolog terhadap konsep budaya itu sendiri, meskipun persamaan di antaranya juga terlihat. E.B. Tylor, dalam karya klasiknya *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom* (1871) memberikan definisi budaya sebagai "suatu kesatuan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, nilai-nilai moral, hukum, adat, dan berbagai bentuk kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota masyarakat" (Keesing, 1981: 68). R. Linton memberikan definisi budaya sebagai "seperangkat pengetahuan, sikap, dan berbagai bentuk prilaku yang telah terbiasa yang dimiliki bersama dan diturunkan oleh para anggota masyarakat tertentu" (Keesing, 1981: 68).

Dari dua definisi yang dikutip di atas terdapat dua hal yang dapat disimpulkan. *Pertama* adalah budaya dipahami sebagai pola kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini, budaya mengacu kepada bentuk fenomena yang dapat dicermati (observasi).

Sementara dimensi *kedua* mengacu kepada budaya yang dipahami sebagai "sistem pengetahuan dan kepercayaan yang terorganisasi melalui mana masyarakat membentuk pengalaman dan persepsi mereka, memformulasi prilaku-prilaku, dan memilih di antara berbagai alternatif" (Keesing, 1981: 68). Budaya dari perspektif ini mengacu kepada "dunia ide" (*the realm of ideas*). Roger M. Keesing cenderung memahami teman budaya dari perspektif ini, yakni sebagai sebuah sistem *ideational*. Untuk itu, budaya meliputi "berbagai sistem ide yang dimiliki bersama, konsep-konsep dan aturan-aturan, dan makna yang merupakan landasan dan diekspresikan dalam pola kehidupan manusia" (Keesing, 1981: 68).

Dari perspektif ini, kita dapat menyebut sebuah budaya Aceh yang dipahami sebagai sistem ide, konsep, aturan, dan makna yang secara kolektif dimiliki oleh masyarakat Aceh dan menjadi landasan bagi prilaku dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, budaya meliputi segala dimensi kehidupan manusia yang diwujudkan dalam prilaku. Adalah keliru ketika budaya dipahami hanya berwujud seni. Ia sesungguhnya mencakup segala dimensi, termasuk budaya politik, budaya kerja, budaya belajar, dan lainnya. Dari perspektif inilah, tulisan ini mencoba melakukan eksplorasi terhadap budaya Aceh pada masa lampau, terutama abad ke-17.

### C. Beberapa Budaya Aceh dalam Sejarah

Dalam kajian ini ada dua hal yang perlu menjadi catatan khusus. *Pertama*, dalam artikel ini tidak semua budaya dikaji dan disajikan secara rinci. Hanya beberapa budaya utama dan yang dapat dilacak dalam sejarah yang akan dibahas. Dalam banyak hal budaya dan tradisi yang dikaji cenderung *court-centris*, karena memang sumber-sumber yang tersedia secara mayoritas berorientasi pada istana. Namun, fenomena sosial juga dapat dilacak. Yang *kedua*, Kajian historis ini dilakukan melalui dua tataran. Yang pertama adalah tataran "praktikal." Dari dimensi ini, berbagai informasi mengenai aktifitas kehidupan di kerajaan Aceh yang terkait dengan topik bahasan dilakukan, seperti aktifitas politik, intelektual dan lainnya. Hal ini diikuti oleh tahap kedua, yaitu kajian terhadap dimensi "konseptual." Dari perspektif ini, upaya eksplorasi dilakukan terhadap ide-ide dan berbagai motif di balik prilaku masyarakat ketika itu. Untuk tujuan ini, dibutuhkan kajian mengenai "pandangan dunia" (*worldview*) masyarakat Aceh. Hanya melalui kajian terhadap dimensi "praktikal" dari

masyarakat Aceh ketika itu dan “pandangan dunia” yang mendasarinya, keterkaitan erat antara makna (*meaning*) dan prilaku (*action*) dapat ditangkap dan dipahami.

## **1. Budaya Memuliakan Tamu**

Pada tanggal 24 Juni 1599, Frederick de Houtman—seorang petualang, pedagang, dan pelaut Belanda—mendarat di Banda Aceh. Kedatangan bangsa Belanda pertama ke Aceh ini disambut secara kenegaraan oleh Sultan, Sayyid al-Mukammil (berkuasa 1589-1604). Beragam makanan dan minuman dihidangkan, dan—sesuai dengan tradisi kerajaan ketika itu—tamu Belanda ini turun ke sungai bersama dengan Sultan sambil menikmati hidangan. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh kesenian, terutama tari-tarian. Bahkan, al-Mukammil juga menghadiahkan sepasang pakaian adat dan keris, sebagai sebuah penghormatan terhadap tamu Eropah ini (Unger, 1948: 71-78; Steenbrink, 1993: 11-12. Hampir empat dekade berikutnya, tepatnya tahun 1638, seorang utusan Portugis, Francesco di Soza di Castro yang dikirim oleh penguasa Portugis di Goa ke Aceh, melakukan sebuah kesalahan besar. Di Castro menolak menaiki Gajah yang telah disediakan khusus oleh penguasa Aceh untuk menyambut tamu negara yang akan dibawa ke istana. Ia sesungguhnya tidak mampu berjalan, karena terluka ketika sebelumnya terlibat kontak senjata dengan dua kapal Belanda di dekat perairan Aceh. Oleh karena itu, ia ditandu oleh para anak buahnya di atas karpet. Penolakan ini merupakan penghinaan bagi penguasa Aceh. Hanya beberapa langkah mereka berjalan, para anak buah kapal Portugis yang membawa utusan pemerintah mereka tersebut diserang oleh para pengawal Sultan, dan di Castro pun ditangkap (Drewes & Voorhoeve, 1958: 27).

Dua contoh di atas secara jelas memberikan petunjuk betapa kerajaan Aceh ketika itu memiliki “budaya memuliakan tamu,” terlebih lagi utusan negara asing. Oleh karena itu, prosesi dan protokoler kenegaraan dilakukan dalam rangka menyambut para tamu tersebut. Mengikuti segala aturan kenegaraan dalam penyambutan tersebut bermakna bahwa penguasa Aceh (ini juga bermakna kerajaan itu sendiri) merasa dihargai, seperti yang dilakukan oleh Frederick de Houtman. Sebaliknya, penolakan terhadap acara penyambutan bermakna penghinaan bagi penguasa dan kerajaan Aceh itu sendiri.

Contoh yang diberikan di atas juga merupakan ilustrasi betapa kerajaan Aceh ketika itu telah membangun sebuah budaya tersendiri yang dipegang dan dilaksanakan secara ketat oleh kerajaan. Pertanyaan yang patut diangkat di sini adalah: bentuk-bentuk budaya apakah yang sesungguhnya dikembangkan oleh kerajaan Aceh dalam sejarahnya?; nilai-nilai apa saja yang dikandung oleh budaya

tersebut? Jawaban terhadap dua pertanyaan ini tidak hanya membutuhkan kajian yang bersifat "eksternal," yaitu prilaku keseharian masyarakat Aceh dalam perjalanan sejarahnya, akan tetapi juga dimensi "internal" dari prilaku tersebut, yaitu pandangan dunia, nilai-nilai dan norma yang dianut, dan berbagai faktor internal lainnya yang merupakan pemicu munculnya berbagai prilaku.

Kebiasaan kerajaan dan masyarakat Aceh yang berinteraksi dengan berbagai masyarakat dunia yang datang ke kerajaan ini untuk tujuan dagang membuat mereka membangun tradisi memuliakan para tamu. Ajaran Islam yang dianut juga menjadi di antara pendorong terwujudnya tradisi ini dan melestarikannya. Bukan hanya para pedagang dan tamu asing yang Muslim yang dimuliakan, mereka yang non-Muslim pun disambut dan dihormati.

## 2. **Budaya Politik**

Pertama yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah kerajaan Aceh merupakan sebuah entitas politik Islam yang berdiri sendiri, yang disebut "kesultanan." Ketika Aceh muncul secara resmi sebagai sebuah kerajaan Islam pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, kekuatan politik di dunia Islam tidak lagi terfokus pada kekhalifahan di Baghdad, akan tetapi telah terdistribusi ke berbagai kekuatan kecil, yang dikenal dengan "kesultanan." Istilah ini berasal dari kata "sultan," yang dalam bahasa Arab bermakna "pemegang kekuasaan atau otoritas" (Manzur, 1988: 182-183; Arnold, 1965: 128, 202). Dinasti Seljuk adalah yang pertama menggunakan gelar ini untuk penguasa mereka pada abad ke-11 M (Lewis, 1988: 52). Ketika itu, gelar ini diberikan oleh khalifah kepada para penguasa de facto di Baghdad dan berbagai provinsi. Namun, pada abad ke-13 gelar ini digunakan dalam pengertian pemerintahan Islam yang memiliki otonomi penuh, sebagaimana yang digunakan oleh dinasti Turki Usmani dan Mamluk. Mulai saat itu, para penguasa lokal di berbagai penjuru dunia Islam menggunakan gelar ini dengan kekuasaan penuh terhadap wilayahnya, tanpa harus mendapat "legitimasi" terlebih dahulu dari khalifah di Baghdad (Arnold, 1965: 99-183).

Dalam konteks inilah gelar "sultan" digunakan oleh penguasa Aceh ketika itu. Ini bermakna bahwa Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri sendiri dengan tugas mengimplementasikan ajaran Islam di bumi Aceh. Inilah yang ditegaskan oleh 'Abd al-Rauf al-Singkili bahwa kerajaan Aceh merupakan sebuah "kekhalifahan" yang berdiri sendiri (Al-Singkili, 1971: 2-3). Penguasanya disebut sebagai *khalifah*, yang bermakna "wakil Tuhan" yang memiliki tanggungjawab mengimplementasikan ajaran Islam di wilayah kekuasaannya (Al-Singkili, 1971: 2-3). Oleh karena itu, para

penguasa Aceh diberi gelar yang sarat dengan nilai-nilai politis dan keagamaan. Sultan Iskandar Muda, umpamanya, diberikan gelar *sayyiduna wa mawlana paduka seri sultan Iskandar Muda johan berdaulat zhill Allah fi al-'alam*. Demikian juga halnya dengan pengantinya Iskandar Thani (al-Raniri, 1966: 36, 44, 58). Ratu Shafiyyat al-Din diberi gelar dengan *sultanah taj al-'Alam Shafiyyat al-Din berdaulat zhill Allah fi al-'alam* (al-Singkili, 1971: 2-3).

Sebagai seorang penguasa dari sebuah entitas politik Islam, seorang sultan di kerajaan Aceh memiliki dua otoritas, yaitu "politik" dan "agama." Ia sesungguhnya memiliki legitimasi dan otoritas sebagai pemimpin politik yang juga memiliki kekuasaan (*power*). Namun, pada saat yang sama ia juga menyandang predikat sebagai pemilik otoritas keagamaan. Ini tidak berarti bahwa seorang penguasa Aceh juga berfungsi sebagai seorang 'ulama'. Gelar dan predikat 'ulama' yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai ilmu keagamaan yang mendalam. Oleh karena itu, otoritas keagamaan yang dimiliki oleh sultan dalam hal ini harus dipahami dari perspektif bahwa ia adalah penguasa tertinggi dari sebuah kerajaan Islam melalui mana ajaran Islam dapat dilaksanakan secara baik. Dengan kata lain, otoritas keagamaannya ini dapat disebut sebagai sebuah "otoritas yang mengandung makna keagamaan" (*religiously sanctioned authority*) (Hadi, 2004: 37-65).

Kepemilikan kedua otoritas ini (politik dan agama) di tangan seorang sultan bermakna bahwa kesultanan merupakan sebuah institusi yang memiliki nilai "sakral," meskipun penguasanya tidak. Dengan kata lain, kesultanan merupakan sebuah lembaga yang sakral, sementara penguasanya secara pribadi tidak. Oleh karena itu, dapat dicermati dalam perjalanan sejarahnya, Aceh pernah memiliki beberapa sultan yang tidak memenuhi persyaratan kemampuan manajerial dan moral yang memadai sehingga mereka harus diturunkan dan, bahkan, terbunuh (Hadi, 2004: 65-90). Adalah dilandasi oleh kepemilikan kedua otoritas ini juga, seorang penguasa di Aceh diberikan tanggungjawab yang besar dalam memimpin umatnya.

Di antara tugas terpenting dari penguasa adalah mewujudkan sebuah kerajaan yang maju, makmur, adil, dan berkedaulatan. Hal ini ditambah lagi dengan tugas mengaplikasikan ajaran Islam di kerajaan dan menjaga keselamatan kerajaan, baik dari ancaman dalam maupun luar (Hadi, 2004: 90-93). Tugas dan tanggungjawab penguasa ini akhirnya menuntut adanya loyalitas dari pihak rakyat, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Singkili (al-Singkili, 1971: 4; Hadi, 2004: 85).

Aceh juga merupakan sebuah kerajaan yang menganut "tradisi kekuasaan" model Asia Tenggara, di mana seorang penguasa merupakan "pusat" dari mana semua aktifitas kerajaan berasal. Oleh karena itu, pendeklasian kekuasaan kepada

para bawahannya merupakan sebuah keniscayaan. Ia adalah seorang pemegang kekuasaan juridis tertinggi yang mendelegasikan kekuasaannya kepada para qadhi dan perangkat hukum lainnya.

Kekuasaan politik juga didelegasikan kepada para penguasa lokal (*uleebalang*) yang diberikan secara resmi dalam bentuk "sarakata." Namun, ia juga dibantu oleh petinggi keagamaan, yang bergelar *syaikh al-Islam*. Yang menarik dalam hal ini adalah seorang *syaikh al-Islam* tidak hanya memiliki tugas keagamaan, akan tetapi juga memiliki peran politik yang besar, seperti deputi sultan, penasihat sultan, bahkan juga guru dari penguasa

### **3. Budaya Belajar/Intelektual**

Barangkali tidak ada yang menyangkal bahwa dalam perjalanan sejarahnya kerajaan Aceh dikenal sebagai "pusat studi ke-Islaman" (*center for Islamic studies*) di kawasan Asia Tenggara (Hall, 1962: 216). Prestasi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi ia dicapai melalui kerja keras dari pihak kerajaan dan tradisi pembelajaran yang panjang dan berkesinambungan, yang mencapai puncaknya pada abad ke-17.

Budaya belajar dan intelektual kerajaan Aceh harus ditelusuri dari kegiatan yang sama beberapa abad sebelumnya, yaitu pada masa kerajaan Pasai. Ia tidak hanya dikenal sebagai "pusat kajian Islam," akan tetapi juga sebagai "pusat penyebaran pertama agama Islam di kawasan Asia Tenggara (Hall, 1962: 216). Barangkali, tidak terlalu asing bagi para sejarawan kawasan ini sebuah laporan perjalanan Ibn Battutah, seorang pelancong Muslim asal Moroko, yang terkenal mengenai Pasai. Pada tahun 746 H (1345 M) dan kemudian pada tahun 747 H (Desember atau Januari 1347 M), Ibn Battutah mengunjungi Pasai, di mana ia menemukan sebuah komunitas Muslim, yang bermazhab Syafi'i. Sultan Pasai, al-Malik al-Zahir, tidak hanya seorang Muslim yang taat, akan tetapi juga melakukan berbagai aktifitas keagamaan di wilayah kekuasaannya (Ibn Battuta, 1894: 224-240; Ibn Battuta, 1963: 272-276, 301-303; Dunn, 1989: 251, 257, 266).

Sebagai sebuah pusat penyebaran Islam di kawasan ini, Pasai juga akhirnya dituntut secara alami untuk memenuhi kebutuhan intelektual ke-Islaman. Tradisi intelektual Pasai ketika itu sungguh didukung oleh pusat kekuasaan. Ibn Battutah ketika itu menemukan dua 'ulama' Persia di Pasai, yaitu Qadhi Syarif Amir Sayyid dari Syiraz dan Taj al-Din dari Isfahan. Diskusi keagamaan dilaksanakan secara reguler di istana dan mesjid, di mana Sultan juga berpranserta aktif (Ibn Battuta, 1894, vol. 4: 230-231; Ibn Battuta,

1963, vol. 4: 114-115). Di sini terlihat betapa penguasa Pasai ketika itu memperlihatkan antusiasme yang tinggi terhadap bidang pendidikan dan pengkajian Islam. Budaya ilmiah dan tradisi intelektual yang berkembang di Pasai terus berlanjut pada abad ke-15. Oleh karenanya, meskipun Melaka telah muncul sebagai sebuah kesultanan pada abad ke-14 dan 15, posisi Pasai sebagai ranah pengkajian Islam tetap tidak tergantikan. Melaka masih memiliki respek yang tinggi terhadap Pasai sebagai pusat kajian ke-Islaman di kawasan ini, dan ia tetap menjadikan Pasai sebagai tempat rujukan bagi diskursus ke-Islaman (Adil, 1874: 36; Brown, 1970: 90-96, 145-149; Overbeck, 1933: 254-260; Roolvink, 1965: 129-139).

Budaya dan tradisi intelektual inilah yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Aceh Darussalam. Dengan kata lain, Aceh mengadopsi tradisi ini dari Pasai. Abad ke-16 memperlihatkan kemajuan intelektualitas yang tinggi di Aceh. Ini dibuktikan dengan kedatangan beberapa 'ulama' luar untuk misi pendidikan. Mereka menetap dan mengajar di Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Husayn (berkuasa 1571-1579), seorang 'ulama' Mekah, Muhammad Azhari, datang dan mengajar di Aceh dan di mana juga ia akhirnya meninggal. Berikutnya, pada masa pemerintahan Sultan 'Ala' al-Din (1579-1596), tradisi kedatangan 'ulama' juga terus berlanjut dan bahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seorang 'ulama' Mekah yang lain, bernama Syaikh Abu al-Khayr b. Syaikh Ibn Hajar, datang ke Aceh untuk mengajar berbagai kajian ke-Islaman, termasuk tasawwuf dan fiqh. Syaikh Muhammad Yamani, dari Yaman, juga datang ke Aceh dengan mengajarkan ilmu ushul al-fiqh. Juga pada masa pemerintahan Sultan ini paman al-Raniri datang dan berkarir di Aceh. Ia adalah Syaikh Muhammad Jaylani b. Hasan b. Muhammad, yang mengajar sastra Arab, logika, fiqh, ushul al-fiqh, dan bahkan tasawwuf (ar-Raniri, 1966).

Pada abad ke-17, tradisi kedatangan 'ulama' luar ke Aceh tidak terjadi lagi secara besar-besaran. Pada abad ini hanya Nur al-Din al-Raniri, 'ulama' yang berasal dari Gujarat (India), yang datang dan berkarir secara ilmiah dan, dalam beberapa hal, politik di kerajaan ini. Di antara alasannya adalah telah munculnya beberapa 'ulama' tempatan, yang tidak hanya berkarir dalam bidang keilmuan, akan tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Ini tidak berarti bahwa budaya dan tradisi ilmiah di kerajaan Aceh berkurang. Bahkan, pada kurun ini intensitas diskursus ke-Islaman di kerajaan ini mencapai puncaknya, paling tidak dari perspektif Asia Tenggara (Hadi, 2004: 153-158).

Dalam kajian mengenai mata rantai diskursus ke-Islaman di Aceh ketika itu patut disebut Hamzah Fansuri (wafat 1600?). Pemikir, sastrawan, dan pengikut paham Wujudiyyah ini merupakan simbol dari kelanjutan budaya dan tradisi intelektual

ke-Islaman di kerajaan Aceh ketika itu. Perannya di kerajaan tidak hanya terlihat dalam bidang intelektual, keagamaan, akan tetapi juga dalam bidang politik dan ekonomi (Lihat laporan yang diberikan oleh John Davis (1599), Frederick de Houtman (1601), dan James Lancaster (1602) mengenai hal ini). Kenyataan bahwa ajaran Wujudiyyah yang ia kembangkan sangat populer ketika itu menunjukkan bahwa diskursus keagamaan sangat intens. Adalah pada masanya John Davis menyaksikan bahwa "masyarakat Aceh adalah Muslim, ... Mereka mendidik anak-anak mereka, dan memiliki lembaga pendidikan (sekolah) yang banyak" Davis, 1880: 151). Aliran keagamaan ini kelihatannya mendapat dukungan dari pusat kekuasaan. Kedekatan tokoh ini dengan para penguasa dibuktikan tidak hanya oleh perannya dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi juga dalam bidang intelektual (Hadi, 2003: 277-306). Hamzah menulis sebuah karya yang berjudul *Ikatan-Ikatan 'Ilmu al-Nisa'*, sebuah karya sajak yang mengandung ajaran sufi, atas perintah Sultan Sayyid al-Mukammil, atau—paling tidak—didedikasikan kepadanya (Al-Attas, 1967: 49).

Tradisi intelektual juga terus berlanjut dan berkembang pada masa Iskandar Muda (berkuasa 1607-1636). Tokoh agama dan intelektual yang paling berpengaruh ketika itu adalah Syams al-Din al-Sumatrani (wafat 1630). Seperti Hamzah, Syams al-Din adalah juga pengikut dan tokoh ajaran Wujudiyyah. Hubungan intelektualnya dengan Hamzah diakui oleh para sarjana, di mana ia dikatakan berguru pada Hamzah, atau—paling tidak—memiliki hubungan intelektual dengannya (Nieuwenhuijze, 1945: 19-20). Kapasitas intelektualnya telah membawa A.H. Johns untuk menulis bahwa Syams al-Din adalah "putra Melayu pertama yang telah mewariskan banyak karya dalam bahasa Arab dan sejumlah karya yang berbentuk prosa dalam bahasa Melayu" (Johns, *EI2*).

Informasi akurat tidak didapat mengenai aktifitas intelektual di kerajaan, terutama di istana, ketika itu. Namun, dapat diasumsikan bahwa hal ini juga dilakukan oleh penguasa. Ini dapat diperkuat oleh kenyataan bahwa Iskandar Muda merupakan murid dari Syams al-Din (Johns, *EI2*). Di antara sejumlah karya yang ia tulis, dua di antaranya didedikasikan kepada Iskandar Muda. Kedua karya tersebut ditulis sebagai panduan awal dalam tasawwuf, yang berjudul *Thariqat al-Salikin* dan *Nur al-Daqiq* (Nieuwenhuijze, 1945: 19-20).

Budaya dan tradisi intelektual kerajaan terus berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya. Para 'ulama' senantiasa menduduki posisi sentral di kerajaan, seperti yang ditunjukkan oleh al-Raniri (wafat 1658) dan al-Singkili (wafat 1693). Diskursus keagamaan juga mengambil tempat di istana. Di antara yang terpenting dari diskursus ini adalah debat teologis yang terjadi pada masa pemerintahan Shafiyyat al-Din

(1641-1675) antara al-Raniri melawan Sayf al-Rijal, murid Syams al-Din. Perdebatan ini akhirnya dimenangkan oleh Sayf al-Rijal, yang bermakna bahwa dukungan istana kepada al-Raniri berakhir (Ito: 1978: 489-491).

Dukungan penguasa terhadap budaya dan tradisi intelektual terus berlanjut. Diskursus intelektual keagamaan yang berkenaan dengan *iman* dan *kufir*, khususnya ketika al-Raniri masih berada di Aceh, kelihatannya telah memicu minat para penguasa untuk lebih banyak lagi mempelajari Islam. Hal ini diwujudkan dengan melakukan diskusi keagamaan di istana, dan—yang juga tidak kalah penting adalah—permintaan para penguasa agar para ‘ulama’ menulis buku-buku tertentu. Iskandar Thani, umpamanya, telah meminta al-Raniri untuk menulis kitab *Bustan al-Salathin* dan *Asrar al-Insan fi Ma’rifat al-Ruh wa al-Rahman*. Shafiyyat al-Din bertanggungjawab atas perintah penyusunan sebuah karya mengenai perbandingan agama, yang berjudul *Tibyan fi Ma’rifat al-Adyan* (Al-Attas, 1986: 25-27). Shafiyyat al-Din juga dikatakan telah meminta al-Singkili untuk menulis kitab yang berjudul *Mir’at al-Thullab* (Voorhoeve, 1980: 40). Karyanya yang lain, yaitu mengenai hadith yang diberi judul *Arba’in*, juga dikatakan ditulis atas perintah penguasa ketika itu, yaitu Zakiyyat al-Din (berkuasa 1678- 1688) (Voorhoeve, 1980: 40).

Kegiatan intelektual para ‘ulama’ ketika itu tidak hanya terbatas pada diskursus ke-Islaman yang mengambil tempat di istana dan penulisan karya-karya keagamaan, akan tetapi juga keterlibatan mereka di dalam lembaga pendidikan. Meskipun kita tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis lembaga pendidikan yang terdapat ketika itu, tidak dapat dinafikan bahwa lembaga-lembaga tersebut ada—sebagaimana yang disebutkan oleh Davis—and telah menghasilkan banyak alumni.

Di muka telah disinggung bahwa terdapat kemungkinan bahwa Syams al-Din al- Sumatrani adalah murid Hamzah Fansuri. Al-Raniri juga dikatakan mempunyai beberapa orang murid (Azra, 1994: 177-178, 184-185). Al-Singkili juga mempunyai sejumlah murid, di antaranya adalah Burhan al-Din (wafat 1693), atau yang lebih dikenal dengan Tuanku Ulakan dari Minangkabau ( Hamka, 1967: 24); ‘Abd al-Muhyi dari Jawa Barat, dan ‘Abd al-Malik b. ‘Abd Allah (wafat 1736) dari Trengganu. Di antara muridnya yang berasal dari Aceh adalah Dawud al-Jawi al-Fansuri b. Isma’il b. Agha Mushtafa b. Agha ‘Ali al-Rumi, yang bersama-sama dikatakan telah mendirikan sebuah *dayah* di Banda Aceh (209-211).

#### 4. **Budaya Seremonial**

Yang dimaksud dengan budaya seremonial di sini adalah kebiasaan dalam melakukan berbagai aktifitas secara seremonial dengan segala aturan dan perangkatnya. Semua seremoni yang dilakukan memiliki makna yang berbeda, sesuai dengan momentum yang ada, baik politis, imperial, maupun agama. Yang menarik adalah jenis ceremoni apapun yang dilakukan, semuanya tetap terkonsentrasi pada istana dan penguasa, sebagaimana yang akan dipaparkan secara singkat di bawah ini.

Di awal artikel ini telah disebutkan secara singkat bagaimana Frederick de Houtman, yang tiba di Aceh pada tanggal 24 Juni 1599, diberikan jamuan kenegaraan oleh al-Mukammil dengan segala acara kesenian tradisional dan hadiah kerajaan. Setahun sebelumnya, John Davis juga mendapat sambutan kenegaraan, di mana ia juga diberikan keris kehormatan kerajaan yang memberikannya kebebasan dalam beberapa hal untuk tinggal dan berbisnis di Aceh. Kepadanya juga diberikan seperangkat pakaian adat kebesaran (Davis, 1880: 140-141). Hal yang serupa juga dialami oleh para pengunjung yang lain, seperti James Lancaster (Lancaster, 1940: 93), Augustin de Beaulieu (Beaulieu, 1764, vol. 1: 731) pada masa Iskandar Muda, dan Thomas Bowrey (Bowrey, 1905: 307) pada masa pemerintahan Shafiyyat al-Din, untuk menyebutkan beberapa contoh.

Bentuk kegiatan seremonial kerajaan ini memberikan implikasi beberapa poin penting. Pertama adalah adanya budaya memuliakan tamu di kalangan masyarakat Aceh. Ia juga menunjukkan—terutama bagi masyarakat dunia—bahwa Aceh merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat dan berpergaulan internasional. Unsur budaya yang tercermin dalam berbagai karya seni juga terdapat dalam setiap seremonial kerajaan.

Berbagai ritual dan perayaan keagamaan juga dilakukan secara kenegaraan. Di antara kegiatan-kegiatan yang terpenting adalah prosesi ketika Sultan berangkat Shalat Jum'at dan kegiatan dalam mesjid, kegiatan dalam bulan Ramadhan, seremoni dan ritual 'Id al-Fitr dan 'Id al-Adhha. Yang menarik dari semua prosesi dan seremoni ini adalah—kecuali kegiatan ritual itu sendiri—semua kegiatan ini bermula di istana dan juga berakhir di istana. Penguasa dan istananya berada pada posisi "sentral" dari kegiatan. Dalam hal ini, kita tidak melihat lagi adanya perbedaan yang signifikan antara perayaan kenegaraan, yang bersifat tradisional, dengan perayaan keagamaan, yang berbentuk sakral. Artinya, kedua bentuk perayaan tradisional dan keagamaan menyatu menjadi "sebuah kegiatan kerajaan." Bila dikaji lebih lanjut, fenomena ini mengacu pada konsep bahwa semua prosesi dan perayaan tersebut—with segala atribut kebesaran kerajaan—merupakan "kerajaan itu sendiri" (Hadi, 2004: 118-146); Ito, 1984: 209-248).

## **5. Budaya Kosmopolit dan Toleran**

Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan pantai. Di kawasan mana “Islam” dan “dagang” berjalan secara beriringan kejelian penguasanya dalam menarik perhatian para pedagang—baik regional maupun internasional—untuk singgah di pelabuhannya merupakan suatu hal yang fundamental. Inilah di antara faktor penentu yang membuat hasil gemilang di Aceh pada abad ke-16, yang dikenal sebagai abad kebangkitan Aceh Darussalam. Masa keemasan Aceh abad ke-17 sesungguhnya adalah hasil kerja keras para penguasanya pada masa sebelumnya, yaitu abad ke-16.

Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan momentum penting bagi kebangkitan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang baru saja berdiri. Portugis dianggap oleh masyarakat Nusantara—khususnya Muslim—sebagai musuh “agama” dan “dagang.” Oleh karena itu, bangsa Portugis ini dianggap sebagai musuh bersama. Mulai saat itulah Aceh, yang telah menunjukkan kemampuan militer, politik, dan ekonomi yang tangguh, menjadi tumpuan harapan para pedagang Muslim dan non-Muslim.

Berkembangnya Aceh sebagai kawasan pelabuhan regional dan internasional menjadikan Banda Aceh sebagai sebuah kota yang kosmopolit yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia, baik Muslim maupun bukan. Para pedagang Muslim umumnya berasal dari Arab, Turki, Persia, Abyssinia, Pegu, dan India (Schrieke, 1966: 43). Pedagang dan utusan dagang dari kawasan lain juga berdatangan, seperti Cina, Belanda, Inggeris, dan Perancis (Lombard, 1986: 150-170). Mereka datang ke Aceh untuk melakukan perdagangan dan biasanya menetap di sana untuk beberapa lama.

Seorang warga Perancis yang mengunjungi Aceh (tahun 1601-1603) mengatakan bahwa biasanya para pedagang tinggal di Aceh sampai enam bulan (Lombard, 1977: 8). Orang-orang Eropah tidak hanya mendirikan kantor perdagangan di Aceh, akan tetapi juga tinggal di sana untuk beberapa lama. Bahkan Thomas Best, umpamanya, pernah memiliki sebuah rumah di Banda Aceh pada tahun 1688 di mana ia pernah menjamu teman senegaranya, William Dampier. William Soames juga tinggal di Aceh, dari tahun 1696 sampai dengan 1697 (Hing, 1995: 17).

Sifat kota Banda Aceh yang kosmopolit berakibat pada terbukanya Aceh terhadap pengaruh luar. Dengan kata lain, dimulai abad ke-16—and terus berlanjut pada abad ke- 17—Aceh telah menjadi kawasan “majemuk” dan “terbuka.” Majemuk di sini bermakna penduduk yang terdiri dari berbagai etnis dan bangsa, dan juga tentunya

dari dimensi budaya (akulturasi). Di sinilah kita cermati adanya kebijakan yang brillan dari penguasa Aceh ketika itu. Dengan sikap keterbukaan, Aceh mengadopsi apa yang mereka anggap penting dan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi mereka.

Di antara yang terpenting dari kebijakan tersebut adalah pengadopsian bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan, bukan bahasa Aceh. Kebijakan ini bahkan meluas kepada dimensi "budaya" Melayu secara lebih luas. Namun, ini tidak berarti bahwa kerajaan ini tidak memiliki peran dalam prosesnya. Inilah yang disebut oleh Leonard Andaya sebagai "model masyarakat Melayu Aceh abad ke-17" (Andaya, 1999). Yang istimewa dalam konteks ini adalah kerajaan Aceh telah berhasil membangun "berbagai standar baru ke-Melayuan yang didasarkan pada model-model yang lebih Islami dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Melaka" (Andaya: 1999). Dengan kata lain, meskipun dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh abad ke-17 merupakan pewaris kebudayaan Melayu kerajaan Melaka, namun ia telah membawa budaya ini menjadi lebih Islami.

Yang lebih dominan dari unsur budaya tersebut adalah aspek sastra dan tradisi kerajaan. Dalam budaya sastra, Aceh telah mengadopsi bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Aceh, dalam hal ini, tidak hanya telah secara sukses mempertahankan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Nusantara, akan tetapi yang terlebih penting adalah ia telah berhasil membawa bahasa ini menjadi bahasa intelektual ke-Islaman.

Aceh ketika itu menjadi pusat kajian ke-Islaman yang menghasilkan berbagai karya ke-Islaman dalam bahasa Melayu. Ini di samping berkembangnya kesusatraan Melayu di kerajaan ini secara signifikan. Hal ini juga terlihat dalam budaya dan tradisi kerajaan (Andaya, 1999: 13-29).

#### D. Kata Akhir

Diskusi di atas telah mencoba menguak beberapa dimensi budaya kerajaan Aceh, terutama yang dimulai pada abad ke-17. Ruang yang terbatas mengharuskan penulis untuk membatasi cakupan bahasan. Masih ada sesungguhnya beberapa dimensi kebudayaan lain yang juga perlu dibahas, seperti budaya perang dan damai ketika itu.

Bahasan budaya perang dan damai ini memerlukan ruangan tersendiri untuk dikaji, karena cakupan diskusinya yang relatif luas. Namun, beberapa poin yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan sebagian gambaran mengenai bentuk sesungguhnya budaya kerajaan Aceh di masa lalu.

Kajian mengenai berbagai dimensi budaya Aceh masa lalu tentu perlu mendapatkan perhatian kita. Sejarah merupakan pelajaran yang patut dikaji secara lebih seksama untuk kepentingan kekinian. Dalam perjalanan sejarah, tentu telah terjadi pasang surut perkembangan budaya masyarakat ini. Tidak semua budaya masa lalu dapat kembalikan ke masa kini. Dalam hal ini perlu modifikasi sesuai dengan kondisi kekinian. Paling tidak, terdapat banyak semangat (*spirit*) budaya masa lalu yang dapat ditarik ke masa kini; dan ini semua banyak dipengaruhi oleh atmosfer Aceh sebagai kawasan yang secara geografis sangat strategis dan terlibat aktif dalam perdagangan regional dan internasional. *Wallahu a'lam...*

# Khasanah Budaya Rempah: Dari Seuneubok lada, Migrasi Hingga Agro-Socialforestry<sup>1</sup>

Sanusi M. Syarif, SE, M. Phil<sup>2</sup>

*Jak rakan puga seuneubok  
Ta dong saboh lhok pileh peutua  
Ta poet boh gaki ta blo tangkulok  
Ta poet boh pucok ta jak blo Ija<sup>3</sup>*

## 1. Pendahuluan

Era kejayaan Aceh pada masa lampau, berhubungan erat dengan produksi dan perdagangan rempah. Berbagai peristiwa bersejarah, berhubung-kait dengan rempah. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah ekonomi-perdagangan rempah, hubungan diplomasi Aceh dengan negara luar dan persaingan pedagang Eropa untuk menguasai jalur rempah, hingga berkembangnya imperialisme.

Dari sisi budaya (baca: adat), rempah Aceh telah membentuk jiwa dan semangat yang kuat dalam hal etos kerja, semangat migrasi ke kawasan baru, kepemimpinan, kelembagaan berdasarkan nilai-nilai dan adat Aceh.

Adat Aceh kemudian dijadikan rujukan dalam pembentukan masyarakat baru di *seuneubok- seuneubok lada*. Khususnya yang dibuka oleh perantau dari Aceh (Aceh Rayeuk), Pidie, Peusangan dan Pase. Hal ini tercermin dalam beberapa hal antara lain: penerapan adat dalam pengelolaan kebun lada dan sistem bagi hasil yang berpusat pada sistem *seuneubok*.

---

1 Disampaikan dalam Seminar Internasional PKA 8, dengan topik Rempah Aceh Dalam Tinjauan Sosial Budaya

2 Penulis pemerhati adat Aceh, mukim dan gampong, serta praktisi dalam penguatan kapasitas dalam bidang adat, tenurial dan pemetaan gampong-mukim partsipatif.

3 Maksudnya: mari rekan buka seuneubok, tiap satu kawasan pilih ketua, panen pertama beli tangkulok (penutup kepala) dan panen berikutnya barulah kita membeli ija (kain).

## 2. Lembaga *Seuneubok*

Sejak ratusan tahun yang lalu pembukaan *seuneubok lada* telah dilakukan dengan sangat terorganisir. Hal ini tercermin dari kehadiran lembaga *peutua seuneubok* di setiap pembukaan kawasan perkebunan lada.<sup>4</sup> Kehadiran dan peran lembaga *peutua seuneubok* sangat diperlukan, bukan hanya dalam memimpin pembukaan *seuneubok*. Namun juga menertibkan para pendatang lain yang kemudian membuka kebun lada di sekitar atau berdampingan dengan *seuneubok lada* yang dipimpinnya (Sanusi 2001).

Fakta sejarah tersebut dapat ditelusuri keberadaannya di Aceh. Mulai dari Pantai Barat- Selatan Aceh pada abad ke 18, hingga ke kawasan pantai Timur Aceh pada paruh awal abad ke 19 masehi. Hal ini dibuktikan pula oleh keberadaan *peutua seuneubok*, sebagai pemimpin masyarakat di tingkat *seuneubok* (Saidan 2023).

Keberadaan lembaga *seuneubok* dapat ditelusuri jejaknya, jauh ke belakang. Lembaga ini menjadi peletak dasar dalam pembukaan dan penataan ladang/ *lampoh* di Aceh. Diperkirakan, sebelumnya, lembaga *seuneubok* sudah cukup berkembang di Wilayah Pidie dan Aceh Rayeuk.<sup>5</sup> Hal ini cukup beralasan, karena dari kedua wilayah ini, lada kemudian berkembang ke pantai Barat-Selatan Aceh pada abad ke 17.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya kemudian wilayah dari suatu *seuneubok*, kemudian diakui sebagai sebuah *gampong*, terutama ketika para *aneuk seuneubok* telah memilih untuk menetap di kawasan tersebut. Pada saat sekarang, proses perubahan status *seuneubok*, sebagai satuan masyarakat terkecil yang terbentuk dari para petani lada, menjadi *gampong* masih dapat ditelusuri dari sejarah lisan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah di *Gampong Jambo Dalem* dan *Jambo Reuhat*. *Jambo Dalem*, dulu merupakan bagian dari Negeri Trumon dan *Jambo Reuhat* berada di Negeri Idu Rayeuk.

Pembukaan *seuneubok* di *Jambo Dalem* dilakukan oleh *Peutua Suman*, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Gunong Pulo. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin *seuneubok*, *Peutua Suman* dibantu oleh seorang wakil, bernama *Waki Daod*. *Waki* merupakan gelar jabatan untuk seseorang yang menjadi tangan kanan

---

4 Muhammad Gade Ismail dalam kajiannya tentang Seuneubok Lada di patai Timur Aceh (1991).

5 Walaupun Seuneubok Lada lebih dulu berkembang, namun dari sisi toponimi, jumlah gampong yang bernama seuneubok di kedua daerah ini sangat sedikit. Terutama jika dibandingkan dengan di Pantai Timur Aceh. Salah satu gampong bernama seuneubok adalah Gampong Neubok Badeuk di Mukim Pulo Mesjid, Tangse.

6 Muhammad Gade (1990)

dari pemimpin adat pada masa dahulu. *Peutua* Suman beserta *aneuk seuneubok* pengikutnya masih mempunyai hubungan keluarga dan berasal dari wilayah XXVI Mukim Aceh Rayeuk (Jalaluddin 2023). Keberadaan *waki* di suatu *seuneubok*, menunjukkan bahwa lembaga *seuneubok* telah memiliki struktur tertentu, walaupun relatif sederhana.

Sebaliknya, di *Gampong* Jambo Reuhat, struktur wilayah dan juga lembaga *seuneuboknya* lebih berkembang lagi. Hal ini disebabkan karena *peutua* dari *Seuneubok* Bukit Kawa, yang menjadi cikal bakal *gampong* Jambo Reuhat, menfasilitasi pembukaan beberapa *seuneubok* baru. Seperti *Seuneubok* Jambo Capli yang dipimpin *Peutua* Cut, *Seuneubok* Alue Kacang, *Seuneubok* Alue Seunong, *Seuneubok* Krueng Lingka dan *Seuneubok* Krueng Lingka. Semua *Peutua Seuneubok* tersebut berada di bawah *Peutua Seuneubok* Bukit Kawa. Dengan demikian *Peutua Seuneubok* Bukit Kawa disebut sebagai *peutua Chik* atau *Peutua Rayeuk*. *Peutua Chik* pertama dari *seuneubok* Bukit kawa adalah *Peutua Yusuf*, kemudian dilanjutkan oleh *Peutua Hasan* (Bentao), *Peutua Bambong* dan terakhir *Peutua Uma*.

Selanjutnya dari arah *Seuneubok* Benteng (Utara Jambo Reuhat) dibuka pula *Seuneubok* Peusangan oleh *Peutua Main*, *Seuneubok* Dalam, *Seuneubok* Siblah, *Seuneubok* Tualang dan *Seuneubok* Jambo Reuhat.

Dalam perkembangannya kemudian, masing-masing *seuneubok* di bawah *peutua Chik* Bukit Kawa menjadi *seuneubok* otonom. Setiap *seuneubok* tersebut, selain terdapat seorang *peutua*, juga terdapat imeum meunasah yang mengurus hal-hal *hukom* (syariat) beserta harta sejumlah harta agama. Seperti meunasah, tanah meunasah, tanah waqaf dan kuburan umum (Saidan 2023).

Sekitar tahun 1960-an, bekas wilayah *Seuneubok* Rayeuk Bukit Kawa, ditambah dengan *Seuneubok* Jambo Reuhat dileburkan dan digabung menjadi satu, dengan nama baru *Gampong* Jambo Reuhat. Padahal, *seuneubok* Jambo Reuhat awalnya berada di bawah *Peutua Chik* *Seuneubok* Benteng. Penggabungan tersebut lebih berdasarkan pada pertimbangan kedekatan dan kemudahan hubungan transportasi pada masa itu.

# **Bandar Susoh dan Perdagangan Rempah di Pantai Barat Selatan Aceh**

(Tema; Jejak Sejarah Rempah di Pesisir Barsela)

Oleh :

**Aris Faisal Djamin, S.H**

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pantai barat selatan Aceh dikenal oleh para penjelajah dunia dengan sebutan *the Pepper Coast* atau pantai lada, untuk komoditas lada terbaik tedapat di Pulo Dua dan Trumon sebagai eksportir lada terbesar di sepanjang pantai ini. Sedangkan pantai timur Aceh sering disebut dengan *betel nut coast* atau penghasil pinang, hal ini diungkapkan oleh Nur El Ibrahimy dalam bukunya "Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh". Selain Trumon, Bandar Susoh juga merupakan pusat perdagangan lada bagi dunia internasional dan juga pusat galangan kapal-kapal niaga. Sebaliknya Meulaboh dan Daya merupakan daerah penghasil emas yang kaya dengan logam mulianya. Kota-kota pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal yang datang dari Eropa terutama dari Amerika adalah, Kluet, Tapak Tuan, Meukek, Labuhan Haji, Susoh, Kuala Batu, Meulaboh dan Daya.<sup>1</sup>

Kuala Batu pada awalnya merupakan pecahan dari wilayah Kerajaan Susoh, polemik perdagangan dan kekuasaan membuat ia mekar lalu mendirikan Bandar pelabuhan, sejak saat itu peta perdagangan mulai berubah namun tidak lama sampai wilayah tersebut diserang oleh kapal perang amerika *Potomac* pada tahun 1832. Hingga membuat bandar perdagangan tersebut tutup untuk selama-lamanya, hal ini dibuktikan dalam periode-periode berikutnya, yaitu Kuala Batu tidak tersebutkan dalam catatan para pedagang lokal maupun internasional.

---

<sup>1</sup> H.M. Nur El Ibrahimy. (1993). *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*. Jakarta; PT Grasindo. Hlm. Hlm. 4-5.

Pada tahun 1666 M dengan berdirinya Kerajaan Susoh menandakan dimulainya aktivitas baru di bagian barat daya Aceh tersebut, salah satu upaya dalam memajukan wilayah yang dilakukan oleh Raja Susoh adalah dengan dimulainya aktivitas perdagangan baik dalam ruang lingkup lokal maupun internasional. Pengalaman yang pernah dirasakan oleh para pembesar Susoh selama menduduki Pariaman, menjadi cikal bakal ide dalam membangun peradaban di tempat yang berbeda.

Setelah Kesultanan Aceh tempo dulu melakukan ekspansi perluasan wilayah sampai ke bagian timur dan barat pulau Sumatera, maka di setiap wilayah taklukkan tersebut Sultan Aceh menempatkan orang-orang kepercayaannya atau jabatan vassal tersebut bernama "Raja Muda". Salah satu vassal Sultan Aceh ada di Pariaman, pasca Perang Besar tahun 1665 akibat imbas dari Traktat Painan, orang-orang Aceh yang berada di Pariaman kembali ke kampung halaman dan menetap di Susoh.<sup>2</sup>

Sejarah panjang perjalanan pulang hingga membentuk sebuah peradaban baru, perdagangan baru, hingga adat dan istiadat baru ini kami rangkum dalam sebuah makalah yang berjudul "*Bandar Susoh dan Perdagangan Rempah di Pantai Barat Selatan Aceh*". Diharapkan nantinya makalah ini bisa menjadi bahan rujukan tentang bagaimana luasnya pengaruh perdagangan Kesultanan Aceh hingga sampai ke wilayah pantai barat-selatan Aceh.

Sejarah panjang berdirinya Kerajaan Susoh dan negeri sekitarnya, komoditas perdagangan, konflik ekonomi dan berbagai kerjasama ekonomi, akan dirunut dengan baik dalam makalah ini, dan semoga nantinya bisa melahirkan sebuah rekomendasi dan naskah akademik untuk memperkuat program jalur rempah nasional yang akan diusulkan menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO tahun 2024 nantinya.

Sejarah panjang Bandar Susoh yang melahirkan beberapa bandar setelahnya seperti; Kuala Batu dan Trumon juga menimbulkan efek bangkitnya bandar-bandar baru di sepanjang pantai barat selatan, perniagaan disetiap fase mengalami berbagai macam perubahan sektor tanaman dan penjualan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang, perubahan wilayah kekuasan, dan masuknya barang-barang impor dari china dan india.

Pantai Lada atau *the Pepper Coast* yang terbentang luas di pantai barat selatan Aceh mencapai 75 kilometer, hal inilah yang membuat para pedagang dari luar maupun lokal untuk datang ke pantai barat selatan Aceh, guna untuk bertani maupun datang untuk membeli lada. Tiap tahun sepanjang pantai barat selatan Aceh ramai lalu lalang kapal-kapal asing, terutama yang datang dari Amerika untuk mengangkut lada ke seluruh

---

<sup>2</sup> Aris Faisal Djamin. (2021). Susoh Cahaya Kemilau Peradaban. Banda Aceh: Aceh Culture and Education. Hlm. 50.

dunia. Besarnya volume ekspor lada dari Aceh ke luar negeri, contohnya pada tahun 1818 lebih dari sepuluh million pon. Lima million di antaranya diangkut oleh kapal-kapal yang datang dari kota-kota pelabuhan Salem, Boston, New York, Marblehead, Baltimore dan Philadelphia, dengan harga 4,7 sen dolar per pon.

## B. Rumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Wilayah-Wilayah di Pantai Barat Selatan ?
2. Komoditas Perdagangan Apa Saja Yang Ada Di Bandar Susoh dan Sekitarnya ?
3. Bagaimana Hubungan Perdagangan Dengan Bangsa Luar ?
4. Konflik Perdagangan Apa Saja Yang Terjadi ?

## C. Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Wilayah-Wilayah di Pantai Barat Selatan
2. Untuk Mengetahui Komoditas Perdagangan Apa Saja Yang Ada Di Bandar Susoh dan Sekitarnya
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan Perdagangan Dengan Bangsa Luar
4. Untuk Mengetahui Konflik Perdagangan Apa Saja Yang Terjadi

# **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

### A. Perkembangan Wilayah-Wilayah di Pantai Barat Selatan

Awalnya di pantai barat selatan Aceh hanya berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Daya, Kerajaan Singkil, dan Kerajaan Barus. Hal ini bisa dilihat pada data-data sejarah awal abad 16 (1501-1600) yang menjelaskan tentang perkembangan wilayah pantai barat Aceh. Seperti yang dimuat dalam buku Tome Pires seorang penjelajah asal Portugis yang berjudul *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of*

*The East, From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues.*

Tome Pires dalam bukunya menyebutkan pernah singgah di beberapa titik seperti Kerajaan Quinchell (Singkil), Kerajaan Baros (Barus), dan Kerajaan Mancopa (Daya). Di Quinchell (Singkil) Tome Pires menyebutkan bahwa kerajaan tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, brutal dan keras. Kerajaan ini menghasilkan beberapa komoditas seperti kemenyan, merica, sutra, dan sedikit emas. Tiga kerajaan tersebut tidak begitu kaya, namun mereka memperluas relasi perdagangannya dengan Pasai, Barus, Tiku dan Pariaman.<sup>3</sup>

Selanjutnya Tome Pires juga menyebutkan tentang keberadaan kerajaan Mancopa atau kita mengenalnya dengan nama Daya, kerajaan Mancopa atau Daya ini berbatasan langsung dengan kerajaan Singkel dan sisi lain kerajaan ini membentang luas hingga mencapai Negeri Lamuri di Aceh Besar. Kerajaan Mancopa juga melakukan hubungan perniagaan dengan kerajaan Samudera Pasai dan kerajaan Pedir (Pidie), kerajaan ini menghasilkan beberapa komoditas seperti sutra, kemenyan dan beberapa hasil alam lainnya.<sup>4</sup>

Begitulah sekilas keadaan pantai barat Aceh di awal abad 16 atau sekitaran tahun 1511 yang di jelaskan secara baik oleh penjelajah dunia Tome Pires, seiring dengan perkembangan zaman, pantai barat Aceh terus mengalami pergantian penguasa hingga muncul kerajaan-kerajaan baru disana. Seperti munculnya Kerajaan Susoh pada tahun 1666 pertengahan abad ke-17 (1601-1700) yang terletak diantara perbatasan Singkel dan Daya, Kerajaan Trumon, Meukek, Tapak Tuan, Meulaboh, dan kerajaan lainnya.

Kerajaan Susoh mulai berkembang pada pertengahan abad ke-17 (1601-1700 M), awal berdiri kerajaan Susoh dengan ditandainya kedatangan para datuk dari Pariaman Sumatera Barat. Para datuk ini adalah keturunan bangsawan Aceh yang mendapat tugas untuk menjadi gubernur atau Raja Muda di beberapa wilayah taklukkan Aceh, seperti Pariaman, Tiku, Salida, Agam, dan Kerajaan Aru. Kekuasaan Aceh di Minangkabau sudah berjalan selama 44 tahun, mulai dari tahun 1621 pasca penaklukan oleh Sultan Alaidin Riayatsyah Al-Qahar dan berakhir di tahun 1665 pada masa Sultanah Sufiatuddin Tajul Alamsyah ibni almarhum Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam.<sup>5</sup>

Para bangsawan Aceh yang berada di Minangkabau terpaksa mundur ke luhak pesisir<sup>6</sup>, dikarenakan adanya persekutuan masyarakat Minangkabau dengan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang melahirkan sebuah penjanjian yang di kenal dengan Traktat Painan pada tahun 1663, dua tahun setelah penandatanganan perjanjian tersebut di Batavia, tahun 1665 para bangsawan Aceh dan pengikutnya diserang dari dua arah. Dari laut pasukan perang Aceh diserang oleh kapal-kapal VOC

dan dari darat serangan dipimpin oleh Datuk Rangkayo Kaciak berserta masyarakat setempat yang ingin lepas dari pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam.<sup>7</sup>

Orang-orang Aceh dan pengikutnya segera meninggalkan Pariaman yang dianggap sudah tidak kondusif, mereka sebagian masih menetap di daerah Bayang dengan 4 orang Panglima Aceh dan sebagian lainnya meninggalkan Pariaman menuju pantai barat Aceh melewati jalur Air Bangis. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa para pendiri Kerajaan Susoh merupakan orang-orang Aceh yang terusir dari Pariaman, dengan terjadinya akulturasi budaya dan perkawinan campuran, maka para pengungsi ini kita kenal sekarang dengan sebutan *Suku Aneuk Jamee* (fasee pertama).<sup>8</sup>

Sedangkan untuk fasee kedua yaitu kedatangan rombongan Teuku Nanta Teuleubeh yang bergelar Datuk Makdum Sati pada abad ke-19 dimasa pemerintahan Sultan Jauhar Alamsyah (1795-1823 M) akibat Perang Paderi. Dari sumber lain disebutkan pula mereka datang pada masa Sultan Jamalul Alam Badrul Munir. Datuk Makdum Sati sendiri adalah anak dari Laksamana Muda Nanta yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai panglima angkatan perang Aceh di Andalas Barat tahun 1630, anak dari Laksamana Muda Nanta yaitu Teuku Nanta Teuleubeh yang digelari Datuk Makdum Sati datang ke Meulaboh dan mendarat di Rantau Dua Belah, kelak kemudian beliau membuka Negeri Woyla sebagai cikal-bakal kenegerian Meulaboh.

Sedangkan untuk Bandar Trumon kenegerian ini didirikan oleh Leubee Dapa yang sebelumnya menetap di Susoh, nama Leubee Dapa masyhur dalam naskah-naskah perdagangan abad 18. Hal ini memang didasari karena Leubee Dapa merupakan seorang pengusaha yang sukses dengan perdagangan lada, hingga membangun sebuah kerajaan baru yang diberinama Trumon. Yang mana negeri ini merupakan negeri dengan penghasil lada terbanyak di pantai barat selatan Aceh.

## B. Komoditas Perdagangan di Bandar Susoh dan Sekitarnya

Setelah berdirinya Kerajaan Susoh dengan ditandainya fase awal perpindahan masyarakat Aceh dari Minangkabau ke pantai barat Aceh, maka Kerajaan Susoh juga melakukan aktivitas yang sama seperti di Pariaman yaitu berdagang. Salah satu media yang dilakukan adalah dengan membuka pasar dan pelabuhan, untuk lokasi pasar Datuk Tuo dan Datuk Bagindo menempatkannya di wilayah Kedai Pasir hingga Kedai Palak Kerambil, sedangkan untuk pelabuhan ditempatkan di Ujong Serangga

7 Ibid

8 Rusli Amran. (1980). Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan Jaya.

dengan mengangkat satu orang Syahbandar sebagai kepala pelabuhan.

Mengenai komoditas perdagangan yang ada di Kerajaan Susoh itu sendiri bervariasi, di pertengahan abad ke-18 tahun 1750-1800 perkebunan di Susoh dipenuhi dengan tanaman Lada. Produksi lada di Susoh menurut William Marsden mencapai 2.000 ton setiap tahunnya, dengan harga rata-rata 12 dollar per *pikul*, biasanya Datuk Susoh menghendaki pembayaran lada dengan menggunakan emas dan perak. Selain menyediakan komoditas lada, Kerajaan Susoh mempunyai hasil tambang berupa emas. Para pedagang luar negeri juga sampai ke Bandar Susoh, mereka membawa dagangan berupa garam, potongan kain dari Coromandel bewarna putih dan biru, serta kain cita bewarna gelap. Setelah habis bedagang di Susoh, kapal-kapal mereka dipenuhi dengan muatan seperti serbuk emas, buah pinang, daun *patch* (nilam), dan lada.<sup>9</sup>

Di Bandar Singkil (Quinchell) komoditas utama yang laku terjual menurut William adalah Kamper (kapur barus) dan Benzoin (kemenyan), sedangkan untuk penghasil komoditas emas terdapat dari wilayah Nelabu (meulaboh) dan Susoh. Penyampaian William tidak jauh berbeda dengan catatan yang ditulis oleh Tome Pires bahwa Bandar Singkil penghasil kemenyan, sutra, merica, dan sedikit emas. Hal ini membuktikan bahwa Bandar Singkil sejak tahun 1501 hingga 1783 tetap eksis dalam dunia perniagaan internasional. Sedangkan untuk wilayah Meulaboh-Daya atau Tome Pires menyebutnya "Mancopa" disini (tahun 1501) barang dagangan tidak begitu dominan hanya berupa sutra dan kemenyan.

William Marsden juga menambahkan bahwa lada hitam dari pelabuhan-pelabuhan utara Nalabu (Meulaboh), Susu (Susoh), dan Mukki (Meukek) selain dikirim ke Eropa, sepertiga dari lada tersebut juga dikirim ke China, dan aktivitas tersebut telah meningkat selama 12 tahun terakhir. Menurut Nathaniel Bowditch pada tahun 1803 harga lada di Bandar Meukek berkisar 10-11 dollar per pikul (62,5 kilogram), musim lada di Meukek dimulai sejak bulan Januari dan puncak panennya di bulan Mei. Jika berada di musim panen, Bandar Meukek dipadati dengan kapal-kapal Amerika hingga mencapai 30 kapal. Meukek menjadi penghasil kopi dengan jumlah 20 pikul per tahun atau 1,24 ton per tahun.

Setelah satu setengah abad berlangsungnya pemerintahan di Kerajaan Susoh, bersamaan dengan itu Kerajaan Susoh didatangi pula oleh orang Aceh yang berasal dari Aceh Besar dan Pidie. Dengan maksud membuka Seuneubok Lada (kebun lada) yang hingga awal abad ke-19 (1801-1900) merupakan tanaman ekspor penting di Aceh.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> William Marsden. (2013). Sejarah Sumatera. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm. 492.

<sup>10</sup> Tentang kedatangan atau perpindahan penduduk orang Aceh ke pantai barat Aceh, sehingga pernah

Koloni perantau Aceh dari Minangkabau serta perantau Aceh dari Aceh Besar dan Pidie membangun komunitas mereka terutama pada muara-muara sungai setempat, antara lain Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh dan Pasie Manggeng. Lambat laun pemukiman itu berubah menjadi suatu pemerintahan lokal yang berdiri sendiri.

Memasuki abad ke-19 (1801-1900) komoditas perdagangan di Kerajaan Susoh mengalami penurunan, hal ini disebabkan terlepasnya beberapa daerah sentral penghasil lada di Susoh dan berubah menjadi wilayah mandiri seperti; Kuala Batu, Blang Pidie, Tangan-Tangan (Lhok Pawoh), dan Manggeng. Namun demikian Kerajaan Susoh memanfaatkan pajak pelabuhan sebagai pendapatan negerinya, hal ini disebabkan karena beberapa wilayah yang lepas dari Kerajaan Susoh itu tidak mempunyai Bandar pelabuhan sendiri. Menurut catatan Muhammad Saleh Urang Kayo Basa, harga 1 *pikul* lada di Tapaktuan, Meukek, dan Susoh sebesar f. 6.50. Sedangkan pajaknya cukup besar yaitu separuh harga, hasil pajak tersebut diterima oleh para Datuk dan seluruh bahan dagangan harganya ditetapkan di kantor Syahbandar.

Muhammad Saleh menambahkan bahwa dimasa itu Kerajaan Susoh menghasilkan pengrajin sutera yang ditempatkan di wilayah Puloe Kayee yang jaraknya satu *paal* (1 kilometer) dari Bandar Susoh, sutera halus nomor satu dipergunakan untuk bahan celana Aceh yang cukup mahal harganya. Sutera nomor dua digunakan untuk membuat bahan pakaian, sedangkan sutera nomor tiga digunakan untuk benang jaring pukat. Selain kain. Gambir dan karet juga menjadi komoditas perdagangan di Bandar Susoh.<sup>11</sup>

Salah satu komoditas yang terkenal di Poelo Kayee, Susoh adalah Sutera dan Beras, perdagangan beras ini terus berlanjut sampai tahun 1930 pada masa pemerintahan Teuku Oemar bin Teuku Radja Cut sebagai *Uleebalang* Poelo Kayee ke-V. Hasil panen beras yang cukup melimpah dari Poelo Kayee dan sekitaran *Cot Seutui* dibawa oleh Teuku Oemar ke Singapura dan diperdagangkan di sana.<sup>12</sup>

Dalam laporan K. F. H. Van Langen menyebutkan bahwa komoditas perdagangan di Susoh juga berupa padi, kupang, dan damar. Sedangkan lilin masuk dalam bahan impor. Pada masa ini (tahun 1889) setiap perniagaan baik ekspor maupun

---

menimbulkan perperangan dengan pemukiman asal Perantau Aceh dari Minangkabau di pantai barat Aceh pada awal abad-18. Hal ini di nukilkan dalam hikayat Pocut Muhammad, edisi GWJ Drewes, Martinus Nijhoff, the Hague. 1979.

11 Mestika Zed. (2017). Saudagar Pariaman Menerjang Ombak Membangun Maskapai. Jakarta: LP3ES. Hlm. 164-166.

12 Aris Faisal Djamin. (2023) Teuku Bentara Mahmud Setia Radja. Banda Aceh: Aceh Culture and Education. Hlm. 112.

impor dikenakan bea cukai senilai 5% dari jumlah per *pikul*.<sup>13</sup> Dari jabaran beberapa sumber diatas bisa kita ketahui bahwa komoditas perdagangan yang ada di Bandar Susoh berupa; lada, emas, sutera, gambir, karet, buah pinang, nilam, padi, kupang, minyak wangi, dan damar. Bahan-bahan tersebut hanya beberapa yang ditemukan dalam catatan perniagaan, masih banyak data lainnya dalam tahap dipelajari juga termasuk bahan impor.

Bandar Meukek	: 5000 ton/th <sup>14</sup>
Bandar Susoh	: 2000 ton/th
Bandar Sibadeh	: 1800 ton/th
Bandar Kuala Batu	: 1500 ton/th
Bandar Pulau Kayu	: 1200 ton/th
Bandar Labuhan Haji	: 780 ton/th
Bandar Pangga	: 480 ton/th
Bandar Krueng Sabe	: 360 ton/th
Bandar Rigaih	: 330 ton/th
Bandar Lhok Kruet	: 240 ton/th
Bandar Bakongan	: 180 ton/th
Bandar Bubon	: 60 ton/th
Bandar Meulaboh	: 12 ton/th
Bandar Samadua	: 6 ton/th
Bandar Kluet	: 1 ton/th <sup>15</sup>

### C. Hubungan Perdagangan Dengan Bangsa Luar

Keberadaan Bandar Susoh sudah dikenal sejak abad 17 (1601-1700), yang disinggahi oleh bangsa-bangsa Eropa, Arab, India, Eritrea dan bangsa pedagang atau penjelajah lainnya. Penyebutan Bandar Susoh dinukilkkan dengan beberapa sebutan seperti; *Susu* atau *Susum* dalam tulisan Portugis, *Soesoe*, *Soesoh*, *Sosoeh* dalam tulisan Belanda, *Soosoo* dalam tulisan Inggris, سوسو or *Susuah* dalam tulisan Arab, *Sousou* dalam tulisan Australia, dan *Soufou* dalam tulisan latin. Hal ini bisa dilihat

13 K.F.H. van Langen. (1889). *Tijdschrift Van Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*. Leiden: E. J. Brill. Hlm. 75-76.

14 Anthony Reid. (2010). *Sumatera Tempo Doeoe Dari Marcopolo Sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm. 284.

15 K.F.H. van Langen.... Ibid. Hlm 26-108.

pada peta-peta abad 17-18 M yang dibuat oleh para kartografi dunia.

Seperti para kartografi berikut ini; Willem Janszoon Blaeu (Belanda 1633) – *Soefeu*, Willem Janszoon Blaeu (Belanda 1643) – *Soufou*, Jan Jansson (Amsterdam 1657) – *Soufou*, Nicolas Sanson (Prancis 1657) – *Souson*, Vincenzo Maria Coronelli (Venesia 1687) – *Soufou*, Peter Schenk & Gerard Valk (Jerman 1695) – *Soufou*, Joachim Ottens (Amsterdam 1710) – *Soufou*, Joshua Ottens (Amsterdam 1720) – *Soufou*, Francois Valentijn (Belanda 1724) – *Seuseu*, Pieter van der Aa (Leiden 1727) – *Soufou*, Samuel Ashmore (Australia 1821) – *Sousou*, Muhammad Ghauts (Aceh 1850) – سوسو، dan John Tallis (London 1851) – *Sousou*.

Sejarah perdagangan antara Kerajaan Susoh dengan bangsa luar sudah terjalin dengan sangat baik, dalam catatan George Nicholl dan Nathaniel Bowditch menyebutkan bahwa; pada tahun 1787 Syahbandar Susoh yang bernama Leubee Dapa telah mengadakan perjanjian dengan Inggris, untuk menyediakan semua lada dan berkongsi dagang dengan Inggris. Hal ini diantisipasi oleh Inggris karena Amerika sudah mulai menjajaki pantai barat Aceh. Pada tahun 1803 Bandar Meukek menghasilkan sekitar 5.000 ton lada, dan sebagian besar lada tersebut dikirim ke New England.<sup>16</sup>

Setelah perjanjian dengan Inggris dilaksanakan, Leube Dapa yang dibantu oleh Tuanku Raja Udahna Lela (menantu Leube Dapa sekaligus kakak dari ibu Sultan Jauhar Alam Syah) secara diam-diam juga bekerjasama dengan Amerika terkait perdagangan lada, hal ini dilakukan demi meraih keuntungan yang lebih besar. Kemudian perkara ini diketahui oleh Inggris dan dilaporkan kepada Sultan Jauhar Alam Syah, John Anderson dalam bukunya menjelaskan bahwa Leube Dapa melakukan perdagangan ilegal dengan Amerika dan menggelapkan pendapatan Kesultanan Aceh di Bandar Susoh. Inggris akan memberikan bantuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Kesultanan Aceh, sebagai imbalannya harus diadakan perjanjian perdagangan secara adil dengan kompeni (Inggris), dan perdagangan Inggris di Soosoo (Susoh) juga harus diberikan jaminan, serta mengakhiri perdagangan rahasia Leube Dapa dengan Amerika yang selama ini Inggris telah ditipu dan mengalami kerugian dalam perdagangan baik di Eropa maupun di India. Lada yang dibeli oleh Amerika di Soosoo (Susoh) selama enam tahun terakhir ini yang tidak kurang dari \$240.000/tahun. Sehingga merugikan pendapatan bangsa Inggris.<sup>17</sup>

Selain pedagang dari bangsa eropa, sekitar tahun 1778 Bandar Susoh juga

16 Anthony Reid. (2010). Sumatera Tempo Doeloe Dari Marcopolo Sampai Tan Malaka. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm. 284.

17 John Anderson. (1840). Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatera. London: Wm. H. ALLEN and Co. LEADENHALL STREET. Hlm. 31-32.

disinggahi oleh pedagang dari pesisir Coromandel, atau kebanyakan orang Melayu menyebut mereka dengan julukan "Orang Kleng". Pedagang Kleng datang ke Susoh menjual berbagai macam jenis kain, ketika pulang kapal Kleng ini dipenuhi muatan 150 hingga 200 ton lada. Kapal ini datang setiap tahunnya dari Porto Novo (Afrika Barat) dan Coringa (India) sekitar bulan Agustus dan berlayar kembali di bulan Februari dan Maret. Para pedagang Kleng ini sudah mendapatkan izin berdagang dari Sultan Aceh baik itu izin berdagang di pantai barat maupun pantai timur Aceh.<sup>18</sup>

Kedatangan ulama-ulama asal Yaman ke Nusantara terjadi dalam 3 fase, fase pertama abad 9-11 M, fase kedua abad 12-15 M, dan fase ketiga abad 17-19 M. Habib Abdurrahman datang ke Bandar Susoh diperkirakan terjadi pada pertengahan fase ketiga, dalam literatur lisan beliau dikisahkan berprofesi sebagai pedagang minyak wangi dan juga sosok ulama yang memperkuat agama Islam di Kerajaan Susoh, dengan media dakwahnya mendirikan masjid di Susoh yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Warasah atau Masjid Pusaka.<sup>19</sup>

#### D. Konflik Perdagangan

Dalam perkembangan sejarah perniagaan di Bandar Susoh dan sekitarnya, hampir tidak ditemukan terjadinya konflik antara sesama pedagang di wilayah pantai barat selatan. Baik itu masa perdagangan bersama Eropa, maupun pada saat perang Belanda. Adapun konflik yang terjadi hanya sebatas penertiban pajak, seperti penyerangan yang dilakukan oleh Datuk Bagak Susoh kepada Kuala Batu yang tidak mau membayar pajak kepada Tuanku Syimkel (utusan Datuk Susoh untuk mengambil pajak bagi Sultan Aceh). Kuala Batu diserang dari darat oleh pasukan Kerajaan Susoh dan dari laut oleh pasukan Kerajaan Trumon, hingga Kuala Batu kembali mentaati pembayaran pajak untuk Bandar Susoh. Kelak dari perdamaian tersebut anak Raja Kuala Batu yang bernama Raja Kuala dinikahkan dengan putri dari Datuk Bagak Susoh.<sup>20</sup>

Pada tahun 1832 Bandar Kuala Batu diserang oleh Amerika menggunakan kapal perang *Potomac*, yang membuat Bandar Kuala Batu disekitaran Lama Muda dan Lama Tuha hancur. Serangan Amerika ini menewaskan hampir 4.000 penduduk Kuala Batu, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua, serta diikuti dengan aksi pembakaran kampung dan kapal-kapal penduduk. Hal ini disebabkan oleh klaim Amerika atas tindakan "Pembajakan" yang dilakukan oleh penduduk Kuala Batu

18 William Marsden. Sejarah Sumatera... Op.Cit. Hlm. 484.

19 Aris Faisal Djamin, Susoh; Cahaya... Op.Cit. Hlm. 185-186.

20 K.F.H. van Langen. Tijdschrift Van... Hlm. 66-67.

kepada kapal dagang *Friendship* Amerika setahun sebelumnya, peristiwa ini disebut oleh orang Amerika dengan "Ekspedisi Sumatera Pertama".

Kita ketahui bersama bahwa Amerika telah melakukan perdagangan yang menguntungkan dengan perairan Barat Aceh beberapa tahun setelah revolusi Amerika tahun 1783, tercatat bahwa persediaan lada dari perairan Barat Aceh mampu memenuhi lebih dari sepertiga kebutuhan lada dunia. Amerika sendiri merupakan pemasok lada terbesar yang dikarenakan begitu menguntungkannya perdagangan dengan Aceh, mereka bebas mengontrol harga lada bagi pasar-pasar internasional. Antara tahun 1795-1831 terdapat 400 pelayaran Amerika yang dilakukan dari Boston dan Salem ke perairan barat Aceh.<sup>21</sup>

Catatan mengenai tanggapan Kesultanan Aceh terhadap Agresi sebelah pihak Amerika menggempur Kuala Batu tahun 1832 dan disusul pertempuran kedua melawan Susoh dan Meukek 1838 terhitung minim sekali.<sup>22</sup> Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh perpecahan politik dalam negeri dimana Sultan Muhammad Daud Syah I harus terlibat konflik dengan Putri Siharibulan (ibu tirinya) terkait tahta kesultanan, sedangkan kekuasaan dibawah perwalian Raja Muda Tuanku Ibrahim.

## BAB III PENUTUP

Begitulah ulasan mengenai jejak sejarah rempah di pesisir barat selatan Aceh yang terangkum dalam makalah "*Bandar Susoh dan Perdagangan Rempah di Pantai Barat Selatan Aceh*". Secara umum bandar-bandar perniagaan di wilayah ini saling terkoneksi melalui penguasa dan para pedaganganya. Hampir seluruh nakhoda yang masyhur namanya pernah menyinggahi wilayah pantai barat selatan ini, mulai dari Meulaboh, Susoh, Meukek, Trumon, dan Singkil. Lima bandar ini merupakan tempat yang sering disinggahi mulai abad 16 sampai abad 20, namun beberapa bandar yang masyhur seperti Kuala Batu sempat hilang keberadaannya karena hancur akibat serangan Amerika ditahun 1832.

Bandar-bandar besar yang tersisa ini oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891 dijadikan rute pemberhentian untuk jasa pelayaran seperti perusahaan

21 Nia Deliana. (2019). 1832: Pembantaian Oleh Amerika Di Kuala Batu Aceh. Mengutip dalam buku America's Pepperpot 1784-1873. Karya Crawfurd dan Gould. Yang dipublis dalam website Jejak Islam Untuk Bangsa.

22 Commodore George C. Read. (1840). Cruise of the Frigate Columbia Around the World. Boston: Benjamin B. Mussey. Hlm. 120-121.

*Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan *Nederlandsch Indisch Stoomvaart Maatschappij* (NISM).<sup>23</sup> Namun pada dasarnya terdapat puluhan bandar-bandar pelabuhan disepanjang pantai barat selatan Aceh ini, seperti yang diterangkan oleh Muhammad Gauts dalam petanya yang dipersembahkan kepada Khalifah Ustmaniyah tahun 1850.

Sehubungan dengan keberadaan bandar-bandar pelabuhan tersebut, tentu wilayah ini berfungsi sebagai tempat perniagaan yang sangat penting dalam dunia maritim. Dari berbagai uraian yang kami sampaikan, sedikit kami rangkum dalam bab penutup ini komoditas perdagangan apa saja yang terdapat di wilayah pantai barat selatan Aceh. Adapun yang termasuk dalam bentuk rempah diwilayah ini hanyalah komoditas lada, dan lada dari wilayah pantai barat selatan Aceh dikenal dengan lada terbaik di dunia. Sedangkan komoditas lainnya yang ada di pantai barat selatan Aceh adalah; kemenyan, kayu gaharu, rotan, kopi, sarang burung walet, kapur barus, emas, sutera, gambir, karet, buah pinang, nilam, padi, kupang, minyak wangi, kopra dan damar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Reid. (2010). *Sumatera Tempo Doeloe Dari Marcopolo Sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Aris Faisal Djamin. (2021). *Susoh Cahaya Kemilau Peradaban*. Banda Aceh: Aceh Culture and Education.
- Aris Faisal Djamin. (2023) *Teuku Bentara Mahmud Setia Radja*. Banda Aceh: Aceh Culture and Education.
- Commodore George C. Read. (1840). *Cruise of the Frigate Columbia Around the World*. Boston: Benjamin B. Mussey.
- Gusti Asnan. (2020). *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra*, Yogyakarta: Ombak.
- H.M. Nur El Ibrahimy. (1993). *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*. Jakarta; PT Grasindo.
- John Anderson. (1840). *Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatera*. London: Wm. H. Allen and Co. Leadenhall Street.
- K.F.H. van Langen. (1889). *Tijdschrift Van Het Nederlandsch Aardrijkskundig*

---

23 Gusti Asnan. (2020). *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra*, Yogyakarta: Ombak. Hlm. 174.

*Genootschap.* Leiden: E. J. Brill. Hlm.

Nia Deliana. (2019). *1832: Pembantaian Oleh Amerika Di Kuala Batu Aceh*. Mengutip dalam buku *America's Pepperpot 1784-1873*. Karya Crawfurd dan Gould. Yang dipublis dalam website Jejak Islam Untuk Bangsa.

Mestika Zed. (2017). *Saudagar Pariaman Menerjang Ombak Membangun Maskapai*. Jakarta: LP3ES. Hlm.

Rusli Amran. (1980). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan Jaya.

Tome Pires. (2015). *Suma Oriental Karya Tome Pires; Perjalanan Dari Laut Merah Ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

William Marsden. (2013). *Sejarah Sumatera*. Jakarta: Komunitas Bambu.

# **“Sultan, Sultanah dan Rempah: Pergeseran Gelombang Perdagangan di Aceh Dar Al-Salam”**

Oleh

**Assoc. Prof. Sher Banu A. L. Khan, Ph.D**

National University of Singapore

## **Abstrak**

Pemaparan ini memberikan gambaran mengenai perdagangan rempah-rempah di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Laporan ini menggambarkan naik turunnya perdagangan rempah-rempah global dan peran Aceh sebagai pelabuhan rempah-rempah yang menghubungkan Selat Melaka ke Samudera Hindia dan sekitarnya. Bab ini menjelaskan peran para Sultan dan Sultanah dalam perdagangan rempah-rempah serta kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk mempertahankan Aceh sebagai pelabuhan utama dalam perdagangan rempah-rempah global. Pembicaraan ini juga membahas konteks lokal dan global yang memfasilitasi dan membatasi posisi Aceh dalam jalur rempah maritim.

## **Perkenalan**

### **Tinjauan Sejarah Perdagangan Rempah-rempah Global**

Dari zaman kuno hingga zaman modern, rempah-rempah melewati Laut Merah dan Teluk Persia dengan kapal kargo Yunani, Arab, Persia atau India, dalam perjalanan dari Kepulauan Indonesia dan India ke Levant dan Eropa. Hal ini berlanjut hingga sekitar tahun 1500, ketika penyeberangan Vasco da Gama ke Malabar, penaklukan Hormuz dan blokade parsial Bab al-Mandab menciptakan situasi yang sama sekali baru. Ketika pasokan rempah-rempah ke Kairo, Damaskus dan, melalui Alexandria dan Beirut, ke Venesia terhenti, banyak kargo tiba di Lisbon, sebagian besar didistribusikan melalui Antwerpen. Namun, setelah Kesultanan Utsmaniyah berhasil merebut Aden pada tahun 1538 dan Basra pada tahun 1546, sebagian besar jalur

rempah-rempah lama kembali pulih. Inilah masa kemunculan dan keterlibatan Aceh dalam jalur rempah-rempah yang berhasil menyaingi penguasaan Portugis atas jalur rempah-rempah. Aceh menyaksikan kebangkitannya sebagai pusat perdagangan global sejak pertengahan abad ke-16.

Baru pada abad akhir ketujuh belas perusahaan dagang Belanda dan Inggris berhasil memindahkan secara permanen aliran rempah-rempah yang ditujukan ke Eropa ke Tanjung Harapan. Verenigde Oostindische Compagnie (VOC, yaitu 'Perusahaan Hindia Timur Bersatu' Belanda) menguasai wilayah produksi cengkeh, pala, bunga pala dan kayu manis di Maluku dan Ceylon, sehingga memperoleh monopoli semu. Terlebih lagi, setelah penaklukan Malabar, Malabar mengambil posisi terdepan dalam perdagangan lada. Amsterdam menjadi Mekah lada dan rempah baru di Eropa.

## **Perdagangan Rempah-Rempah pada Abad Ke-16 dan Kemunculan Aceh**

Abad ke-16 menandai era penting dalam perdagangan global, yang ditandai dengan intensnya perburuan rempah-rempah, komoditas yang sangat didambakan di Eropa. Lada, sering disebut sebagai "emas hitam", mempunyai tempat khusus dalam perdagangan ini karena rasanya yang berbeda dan kegunaannya yang serbaguna. Periode ini menyaksikan beberapa kekuatan Eropa berlomba-lomba membangun jalur perdagangan rempah-rempah dan monopoli, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Di antara kekuatan-kekuatan ini, Portugis, Spanyol, dan Republik Belanda menonjol dalam mengeksplorasi rute-rute baru dan mendirikan pos-pos perdagangan di wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah.

## **Dorongan Eropa untuk Rempah-Rempah**

Rempah-rempah merupakan komoditas yang bernilai tinggi karena kelangkaannya dan dampak transformatifnya terhadap berbagai aspek masyarakat, termasuk masakan, pengawetan makanan, dan penggunaan obat-obatan. Hasilnya, harta karun aromatik ini menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Lada, dengan permintaannya yang luar biasa, memainkan peran penting dalam eksplorasi dan perdagangan global pada saat itu.

## **Dominasi Portugis dan Jalur Rempah**

Bangsa Portugis adalah pionir Era Eksplorasi, dengan Vasco da Gama berhasil memetakan jalur laut ke Asia pada akhir abad ke-15. Pencapaian ini membuka pintu bagi pasar rempah-rempah legendaris di Timur. Awalnya, Portugis menemukan jalur laut ke Pantai Malabar di India, di mana mereka segera mendirikan pijakan perdagangan. Dominasi awal mereka atas jalur perdagangan ini memungkinkan mereka memperoleh keuntungan besar. Portugis memang menimbulkan gangguan terhadap perdagangan lada khususnya di sebelah barat India – hal ini memaksa para pedagang Arab dan India untuk mencari pasokan di kepulauan Indonesia khususnya ke Aceh.

## **Posisi Strategis Aceh dalam Perdagangan Rempah-Rempah**

Abad ke-16 mewakili fase penting dalam sejarah perdagangan global, dengan rempah-rempah sebagai intinya, khususnya lada. Kemunculan Aceh sebagai pemain penting pada era ini dapat dikaitkan dengan posisi geografisnya yang strategis, pemerintahan yang efisien, dan pengelolaan perjanjian perdagangan yang terampil. Kebangkitan Aceh mencerminkan perkembangan perdagangan rempah-rempah, yang dipengaruhi oleh dinamika geografis dan politik. Akhir abad ke- 17 akan membawa faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan menyebabkan kemundurannya.

Oleh karena itu, makalah ini mengeksplorasi peran Aceh dalam perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16 dan ke-17 sambil mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi yang berkontribusi pada kebangkitan dan, pada akhirnya, penurunan perdagangan rempah-rempah. Esai ini akan menggali lebih jauh aspek-aspek tersebut untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya Aceh dalam perdagangan rempah-rempah selama periode transformatif ini.

Ketika Portugis mulai menunjukkan kehadirannya di India dan Samudera Hindia, Aceh, sebuah kesultanan kuat yang terletak di pantai utara Sumatera, muncul sebagai pemain penting dalam perdagangan lada. Beberapa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keunggulan Aceh:

Lokasi Geografis: Aceh menempati posisi geografis yang sangat penting, karena dekat dengan daerah penghasil utama lada di sepanjang Pantai Barat Sumatera seperti Tiku, Priaman, Silibar dan Inderapura. Aceh merupakan pelabuhan pertama bagi para pedagang dari Laut Merah, Teluk Persia,

# Motif Bungong Pala Tenun Songket Siem Ekspresi Budaya di Jalur Rempah

**Laila Abdul Jalil, S.S., MA**

Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah  
Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra

Badan Riset Dan Inovasi Nasional

Email: [jalil\\_laila@yahoo.co.id](mailto:jalil_laila@yahoo.co.id)

## Sekilas Sejarah Rempah di Aceh

Provinsi Aceh yang terletak di ujung paling barat dari Pulau Sumatera dikenal memiliki kekayaan khazanah budaya yang hingga kini masih terus dipertahankan. Letak Provinsi Aceh yang strategis berada yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Aceh pada masa lalu sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Perburuan rmpah-rempah pada abad ke-16 M oleh bangsa Eropa menjadikan pelabuhan Aceh sebagai pintu gerbang masuknya pedagang asing seperti Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa.

Aceh tampil menjadi bandar kosmopolitan dan menjadi pemicu terbentuknya jaringan dagang yang membentuk kota-kota pelabuhan di pesisir utara dan timur Sumatra yakni bandar Aceh, Pidie, Samudera Pasai, Peureulak, Deli, Barus. Kota-kota bandar di seberang Selat Malaka:Penang, Baruas di Kedah Selatan, Malaka. Munculnya kota-kota pelabuhan ini tidak terlepas dari faktor perdagangan rempah yang melibatkan banyak pihak. Kerajaan Aceh pada abad ke-16 M pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda turut serta dalam percaturan perdagangan global pada saat itu.

Jauh sebelum hadirnya Kerajaan Aceh, Kerajaan Samudera Pasai telah lebih dahulu membina hubungan dagang dengan bangsa asing. Marcopolo dan Ibnu Battutah pada tahun 1345 dan 1347 dalam lawatannya ke Samudera Pasai menberitakan bahwa Kerajaan Samudera Pasai kaya akan hasil alam berupa lada, termasuk sutera dan kapur barus (Hadi, 2010). Samudra Pasai terkenal sebagai pelabuhan lada dan lada menjadi salah satu produk ekspor utama dari pelabuhan Samudra Pasai yang diminati pedagang dari India (Gujarat dan Benggala), dan China. Samudra Pasai memproduksi lada sekitar delapan ribu sampai dengan sepuluh ribu bahar per tahun, ketika panen raya produksi lada mencapai lima belas ribu bahar pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa lada secara intensif telah dibudidayakan di Sumatera bagian utara pada awal abad ke-16. Daerah-daerah penghasil lada antara lain ialah Pidie (Pedir). Awal abad ke-16 merupakan awal kedatangan bangsa Eropa. Armada bangsa Portugis mendarat di

pantai Pidie pada tahun 1509 pada masa kekuasaan Sultan Pidie yakni Sultan Ma'arif. Hal itu merupakan kedatangan pertama orang-orang Portugis di kepulauan Indonesia, dan tujuannya adalah mencari lada (Inagurasi, 2017). Selain Pasai, Pidie juga menjadi salah satu kerajaan penting di Aceh dengan hasil alam andalan berupa lada, sutra putih, kapur barus, dan emas. Duerte Barbosa mengatakan bahwa Pidie terkenal di India sebagai salah satu *entrepot* utama perdagangan lada. Catatan dari Sulayman bin Ahmad al-Mahri seorang pedagang Arab dalam bukunya *al-Minhaj al\_Fakhir fi 'ilm al-Bahr al-Zakir* menyebutkan Pedir sebagai kota pelabuhan lada (Hadi, 2010).

Komoditas lada juga ditemukan di pantai barat Aceh. J. Kathiritamby-Welss dalam *Acehnese Control Over West Sumatra up to the Treaty of Painan 1663* : Tahun 1786 pantai barat Aceh antara Singkil dan Meulaboh menjadi kawasan penanaman lada yang baru, dikontrol oleh *ulee balang* Leube Dapha bekerjasama dengan Inggris di Bengkulu dengan produksi lada sebanyak 83.000 pikul, dan pada tahun 1820 produksi lada di pantai barat Aceh mencapai 150.000 pikul (Muhajir, 2022).

Lada (*pepper ningrum*) tergolong dalam jenis tanaman merambat. Masa panen dimulai saat tanaman berusia 2-3 tahun. Lada pada menjadi salah satu rempah primadona yang banyak diburu oleh bangsa Eropa. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Al-Qahar yang memerintah pada tahun 1537-1571 mengirim utusan ke Turki pada tahun 1560 untuk meminta bantuan Turki dalam menghadapi serangan Portugis di Selat Malaka. Utusan dari Kerajaan Aceh membawa lada untuk diberikan kepada penguasa Turki dan sebagai balasannya Turki menghadiahinya utusan Aceh dengan sebuah meriam yang diberi nama meriam lada sicupak (Said, 1981).



Perkebunan lada  
(Sumber: Koleksi Laila Abdul Jalil)

Selain lada, di Aceh juga dibudidayakan pala. Daerah Aceh Selatan menjadi salah satu sentra perkebunan lada di Aceh. Tanaman pala (*Myristica fragans*) merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Maluku. Pulau Banda Naira Merupakan salah satu pulau penghasil pala terbesar. Informasi mengenai pulau penghasil pala awalnya didapat dari pedagang Arab. Berita ini ditelusuri oleh pedagang Cina, lalu diburu oleh pedagang Eropa.

Pala (*Myristica fragrans*) merupakan rempah-rempah primadona bernilai tinggi yang berasal dari Kepulauan Maluku tepatnya di Banda Naira. Buah pala menjadi komoditas perdagangan penting sejak masa Romawi. Pada abad ke-6 M pala menyebar ke India lalu ke Konstantinopel. Pada abad ke-13 M pedagang Arab telah mengetahui dengan tepat sumber rempah pala yang berada di timur pulau-pulau Nusantara, namun mereka merahasiakan lokasi rempah pala kepada pedagang Eropa. Ketika Portugis berhasil mencapai Asia Tenggara barulah para pedagang Eropa mengetahui pulau rempah pala (BPK Wilayah XIX, 2023).

Pohon pala berbuah sepanjang tahun tanpa menenali musim. Tinggi pohon pala dapat Mencapai 20 m. Bagian Fuli atau kulit berwarna merah yang membungkus biji pala harganya sangat mahal dan diolah menjadi minyak atsiri. Pohon pala juga dibudidayakan di Aceh Selatan dan menjadi tanaman khas di daerah tersebut. Belum diketahui asal usul sejarah pohon pala di Aceh Selatan. Perlu dilakukan penelusuran sejarah terkait tanaman pala di Aceh. Salah satu kuliner yang terkenal dari Aceh Selatan adalah manisan pala. Belum diketahui secara pasti kapan tepatnya budidaya pala dilakukan di daerah Aceh Selatan dan dari mana bibit pala itu dibawa.



Perkebunan pala di Banda Naira

Sumber: Koleksi Laila Abdul Jalil

## Rempah-Rempah dan Pertukaran Budaya

Perdagangan rempah-rempah menjadi salah satu pintu masuk terjadinya proses pertukaran budaya yang mencakup bidang bahasa, arsitektur, dan seni. Dalam proses pertukaran budaya tersebut terjadi perpaduan budaya lokal dengan budaya luar atau dikenal dengan istilah akultuasi yang menghasilkan langgam budaya baru. Dalam proses pertukaran budaya ini muncul kreatifitas pengrajin dalam mengembangkan ornamen pada media batu, kayu, dan kain.

Tenun songket Siem merupakan salah satu khazanah budaya Aceh dalam bidang wastra dan termasuk salah satu komoditas dagang yang memiliki nilai jual tinggi dari dulu hingga kini. Desa Siem di Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu desa penghasil tenun songket yang terkenal sejak abad ke-19. Selain Desa Siem, sentra penghasil songket juga tersebar di wilayah Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan.

Daerah Siem sejak abad ke-19 sudah terkenal sebagai sentra penghasil tenun dan bertahan hingga abad ke-20. Desa Siem yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan pernah tampil sebagai sentra penghasil tenun songket Aceh. Dari hasil penelusuran sejarah yang dilakukan sejak tahun 2016 diketahui bahwa Desa Siem pada masa tampil sebagai daerah yang banyak didatangi oleh orang dari luar Desa Siem untuk belajar membuat tenun. Salah satu maestro tenun dari Desa Siem adalah almarhumah Nyak Mu yang telah memberi andil dan kontribusi besar terhadap perkembangan tenun songket Siem. Almarhumah Nyak Mu semasa hidupnya dengan kreativitasnya berhasil mengembangkan dan membuat motif-motif baru dalam kain tenun songketnya. Pendataan motif tenun songket Siem yang pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Aceh pada tahun 1992-1993 diketahui terdapat 50 motif tenun songket Siem.

Motif tenun dalam selembar kain songket Siem menjadi salah satu wujud ekspresi budaya masyarakat Aceh terkait dengan jalur rempah. Tradisi tenun sutera menurut Robyn dan John Maxwell dibawa oleh pedagang muslim dari Arab dan India yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara melalui Selat Malaka ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Pantai Utara Jawa yang menghasilkan tradisi tenun songket sutera (Robyn, Maxwell, 2014).

Catatan dari masa Dinasti Sung abad X-XI menyebutkan mengenai produksi tenun Pidie yang menjadi daerah penghasil sutera hingga permulaan abad ke-16. Catatan Belanda dan Prancis abad ke-17 M menginformasikan mengenai sutera Pidie merupakan komoditi yang dihargai diseluruh Sumatera. Mens Fiers Smedling menyebutkan bahwa kain tenun songket Aceh yang terkenal halus dan rumit karena adanya pengaruh dari Persia yang melebur dalam budaya Aceh (Leigh, 1989).

Kreemer mendeskripsikan motif songket Aceh di tengahnya terdapat pola berbentuk mawar kecil dan di bagian tepinya dihiasi dengan motif tumpal dan bunga. Catatan dari

Giovanni da Empoli seorang pengembara asal Portugis menceritakan bahwa Raja Pase menjanjikan kepada bangsa Portugis untuk mengekspor semua sutera milik negerinya. Kain sutera asal Pase dijual kepada pedagang Gujarat dan ditukar dengan kain dari Cambay serta barang dagangan lainnya seharga 100.000 dukat (Kartiwa, 1989).

Tenun songket Siem dibuat dengan teknik menambahkan benang pakan<sup>1</sup> yakni benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsin sebagai pembentuk motif dengan cara menyelipkan benang perak, benang emas, atau benang tembaga di atas benang lungsi<sup>2</sup>. Benang lungsi yang telah diatur dan disusun sejajar secara vertikal mengikuti panjang kain. kemudian diangkat sesuai dengan corak yang dikehendaki kemudian disisipi kayu kecil atau lidi diantaranya agar terpisah. Selanjutnya sisipan kayu diganti dengan benang pakan tambahan sehingga motif terbentuk. Kayu atau lidi kecil yang disisipi di antara benang inilah yang dalam bahasa Aceh disebut dengan *sungket* dan menjadi dasar penyebutan kain tenun Aceh dengan istilah *ija sungket*/kain songket.

Alat tenun, dalam bahasa Aceh disebut dengan *teumpeun* ini dikembangkan Nyak Mu salah seorang pelopor tenun songket di Desa Siem. Hingga tahun 1990-an, pengrajin tenun Desa Siem masih mempertahankan tradisi menenun. Desa Siem saat itu sudah memproduksi sendiri benang sutera dan memelihara ulat serta perkebunan murbei di Lamtamot. Setiap rumah warga Desa Siem saat itu memiliki alat tenun masing-masing. Namun konflik Aceh yang berkepanjangan ditambah dengan peristiwa tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 membuat pengrajin tenun lesu dan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan tradisi menenun. Generasi muda terutama dari kalangan wanita juga mulai enggan menenun karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi.



Alat tenun milik Nyak Mu

Sumber foto: Koleksi Laila Abdul Jalil

## Motif dan Makna Tenun Songket

Tenun songket Aceh menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di Jalur Rempah. Motif pada kain tenun songket Siem selain memberi keindahan juga mengandung makna filosofi serta informasi mengenai jenis-jenis tanaman yang umum dijumpai di Desa Siem. Warming dan Gaworski seperti yang dikutip oleh Erni berpendapat bahwa tenun dengan teknik ikat pakan yang berkembang di daerah pesisir sudah mendapat pengaruh Islam yang merupakan dampak dari interaksi dengan pedagang dari Arab dan India (Erni, 2014).

Dampak dari perdagangan dengan pedagang yang terkait dengan rempah juga dijumpai dalam motif tenun songket Siem. Motif dalam selembar kain songket bukan hanya semata-mata untuk menambah keindahan pada kain tenun, namun juga mengandung makna filosofi. Hal ini juga dijumpai dalam kain tenun songket Siem di mana motif-motif yang diterapkan dalam kain tenun songket Siem selain mengandung makna filosofi juga memberikan informasi mengenai jenis-jenis tanaman yang dijumpai di daerah Siem (Laila, 2017).

Motif-motif yang diaplikasikan dalam selembar tenun songket Sien antara lain *pucok reubong* (pucuk rebung), *pucok aron*, *bungong gasing*, *bungong rante lhee*, *timpeung mata uro*, *bungong kala*, *bungong boh aneuuh*, *bungong riwat*, *bungong u*, *bungong teube*, *mayam pineung*, *bungong pala*, *geulima meupucok*, *bungong peukan*, *bungong kupula*, *bungong ceurupa*, *bungong campli* (bunga cabai), *talou lhee bungong campli*, *bungong pala* (bunga pala). Motif tenun songket Siem yang memiliki korelasi dengan perdagangan rempah di masa lalu adalah motif *bungong campli* (bunga cabai), *bungong pala* (bunga pala), *bungong kala* (kecombrang/patikala/honje/kantan).

Motif *bungong pala* pada tenun songket Siem menjadi petunjuk bahwa di Aceh Besar pada masa lalu pernah berlangsung aktivitas budidaya pohon pala. Saat ini pohon pala banyak dibudidayakan di daerah Aceh Selatan. *Bungong pala* menjadi inspirasi bagi pengrajin tenun songket Siem. Melalui motif *bungong pala* dapat digunakan sebagai data pandu bagi pelacakan asal muasal pohon pala di Aceh. Munculnya motif *bungong pala* dalam tenun songket Siem merupakan salah satu ekspresi seni pengrajin tenun dalam memilih motif tenun yang terinspirasi dari alam dan perdagangan yang terkait dengan rempah.



Kain songket Siem dengan motif bungong pala

Sumber foto: Koleksi Laila Abdul Jalil

Kain tenun songket Siem memiliki ciri khas dari pemilihan warna yang menggunakan warna-warna cerah dan terang. Dalam Hikayat Pocut Muhammad diketahui bahwa proses mencelup dilakukan dalam skala besar. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses mencelup antara lain:

- *Bangko*, rebusan yang berasal dari kulit pohon dan menghasilkan warna kecoklatan
- *Gaca*, tanaman yang digunakan untuk menginai kuku tangan dan jari pada pengantin wanita dan menghasilkan warna kuning
- *Gaci*, bagian kulit pohon yang direbus dan menghasilkan warna kuning pucat mengarah ke putih, digunakan untuk mencelup benang jala ikan
- *Keusumba* (safran), bagian bunganya direbus untuk mencelup kain sutera dan menghasilkan warna merah tua. Bunga safran pada masa lampau dibudidayakan di desa-desa.
- *Kudrang*, bagian kulit kayunya direbus dan menghasilkan warna kuning
- *Keumudee* (mengkudu), akar pohnnya direbus dan menghasilkan warna merah
- *Mireh*, bagian kulit kayu direbus dan menghasilkan warna merah
- *Ubar*, rebusan kulit kayu yang menghasilkan warna merah dan hanya digunakan untuk mencelup benang jala nelayan
- *Ulem*, rebusan kulit pohon yang digunakan untuk mencelup benang sutera dan katun menghasilkan warna merah
- *Reugon*, rebusan kulit kayu yang digunakan menghasilkan warna hitam pekat

- *Seupueng* (sepang atau secang), rebusan kulit kayunya menghasilkan warna merah, agar tidak cepat pudar maka rebusannya dicampur dengan gandarukam
- *Seunam* (nila atau indigo), bahan pewarna yang berasal dari tanaman belukar tarun yang cukup terkenal dan menghasilkan warna biru
- *Teungge*, rebusan kulit pohon menghasilkan warna hitam
- *Cibree*, rebusan kulit pohon yang menghasilkan warna hitam yang digunakan untuk mencelup kain katun

Pada masa lalu kain tenun songket Siem menggunakan pewarna alami sebagai bahan pewarna kain. Motif tenun songket Siem terinspirasi dari alam, motif dominan pada tenun songket Siem adalah motif *pucok reubong* yang mengandung makna tentang siklus hidup, menggambarkan perjalanan hidup seseorang dari janin, bayi, muda, dewa, tua, hingga meninggal.



Sumber foto: Koleksi Laila Abdul Jalil

## **Merawat Budaya Menjaga Tradisi**

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Aceh hingga era tahun 1990-an yang mewajibkan pengantin laki-laki membawa seperangkat kain songket dalam hantaran pernikahan secara tidak langsung merupakan upaya merawat budaya dan tradisi. Hantaran seperangkat kain songket kepada mempelai wanita juga menyiratkan kesanggupan dari pihak laki-laki untuk memberi sandang atau pakaian yang pantas bagiistrinya. Makna ini juga selaras dengan ajaran Islam dimana laki-laki atau suami wajib memberi pakaian dan tempat tinggal yang pantas bagiistrinya. Tradisi membawa hantaran berupa seperangkat kain songket secara tidak langsung juga

ikut andil dalam mempertahankan keberadaan pengrajin tenun songket Aceh.

Meredupnya pamor tenun songket Aceh selain karena dianggap tidak memiliki potensi ekonomi juga faktor pemasaran yang terbatas. Banyaknya anggapan dalam masyarakat bahwa kain tenun songket buatan tangan harganya sangat mahal membuat masyarakat beralih menggunakan kain tenun buatan mesin. Selain itu juga berkembang anggapan bahwa kain tenun susah digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dianggap kain tenun lebih tepat digunakan saat upacara adat atau pesta perkawinan.

Tenun songket Siem merupakan warisan budaya masyarakat Aceh. Tenun songket Siem berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara komunal merupakan kekayaan intelektual yang bersifat inklusif yang dimiliki oleh kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menyangkut identitas masyarakat Aceh.

Terobosan yang dapat dilakukan untuk menaikkan kembali pamor tenun Siem adalah dengan mendorong pengrajin tenun di Desa Siem yang masih tersisa untuk memproduksi kain tenun songket yang *easy in use* atau mudah digunakan. Tahun 2016 melalui bincang budaya yang diasakan di Museum Aceh terbentuk komunitas / *Love Songket Aceh* yang ikut berperan besar dalam menyuarakan keberadaan tenun songket Siem sehingga lambat laun tenun songket Siem mulai menggeliat lagi. Selain itu Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dapat membuat satu kebijakan untuk menetapkan Desa Siem menjadi salah satu desa wisata. Desa Siem tepat dikembangkan menjadi desa wisata karena ada aktivitas yang

dapat dinikmati dan dilihat langsung oleh pengunjung, dalam hal ini proses membuat tenun songket Aceh yang merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Aceh. Dengan ditetapkan Desa Siem menjadi desa wisata akan memberi dampak terhadap pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini pengrajin tenun songket Siem yang akan berdampak terhadap pengembangan budaya lokal.



Ibu Dahlia penerus tenun songket Nyak Mu  
Sumber foto: Koleksi Laila Abdul Jalil

## Daftar Pustaka

- Erni. 2014. *Songket Aceh*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh Sejarah, Budaya Dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Inagurasi, Hari Libra. 2017." Komoditas Perdagangan Di Pelabuhan Internasional Samudera Pasai Pada Masa Dulu Dan Masa Kini" *Jurnal Kapata Arkeologi*, 13(1), 21-36.
- Laila Abdul Jalil. 2017. *Tenun Aceh Tradisi Yang Tergerus*. Jakarta: Mahara Publishing.
- Kartiwa, Suwerti. 1989. *Kain Songket Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Leigh, Barbara. 1989. *Tangan-Tangan Terampil*, Jakarta:Djambatan.
- Maxwell, Robyn. 2014. *Textiles of South East Asia: Tradition, Trade, And Transformation*, Revised Edition, Australia National Gallery: Tuttle Publishing.
- Muhajir al-Fairusy. *Rempah dan Kontestasi Kuasa di Pantai Barat Aceh*. Serambi news. com 8 Maret 2022, diunduh tgl. 31 Agustus 2022.
- Direktorat Perlindungan Budaya. 2023. *Pameran Jalur Rempah*. Makassar: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual.
- Pires Tome. 2016. *Suma Oriental*. Jakarta: Penerbit Ombak.

# Rempah dalam Manuskrip Kuno Aceh

Oleh: Hermansyah M.Th., M.Hum

Dosen Prodi SKI, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Filologi Aceh  
[hermansyah@ar-raniry.ac.id](mailto:hermansyah@ar-raniry.ac.id)

## Pendahuluan

Saat Pemerintah Nasional menetapkan program Jalur Rempah Nusantara, dan salah satu simpul utama jalur rempah Nusantara adalah Aceh. Aceh pun mendapat dua titik fokus utama, pertama Pasai dan kedua Banda Aceh, yang keduanya secara historical memiliki nilai tersendiri dan tentu memiliki peran besar terhadap perjalanan dan kemajuan bangsa. Tentunya, Jalur Rempah Aceh memiliki nilai tersendiri, unik, dan dapat diperoleh warisannya dari sejarah, budaya, benda cagar budaya, sosial masyarakat, dan bahkan produk unggulan yang tentu dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Aceh.

Rempah-rempah bukan sebatas nilai ekonomis dan perdagangan semata, dan juga bukan membaca sejarah nostalgia masa lalu yang gemilang tanpa melihat masa depan. Jalur rempah juga bukan sebatas alat produk di dapur ataupun bahan kosmetik kecantikan. Akan tetapi Jalur Rempah merupakan simbol kehidupan masyarakat masa sekarang untuk memaknai masa silam dan membangkitkan masa depan untuk kesadaran akan alamnya. Menanam pohon-pohon rempah di pekarangan rumah masyarakat akan menjadi baik daripada harus membeli kebutuhan tersebut secara instan. Pemanfaatan rempah-rempah di Aceh sebagai bahan asumsi makanan ataupun bahan lainnya merupakan hal utama dan sangat berguna. Demikian obat-obatan herbal akan lebih baik dikonsumsi dengan pengetahuan yang dimiliki daripada harus menelan obat generik. Hal-hal demikian akan sangat penting dan perlu diterapkan di masyarakat secara general, selain apa yang diprogramkan pemerintah untuk kemajuan bangsa untuk memperkenalkan diri ke dunia, bahwa Nusantara adalah negeri yang telah memainkan perannya di kancah dunia sejak beberapa silam.

Jika merujuk kepada UNESCO, bahwa Jalur rempah, juga dikenal sebagai Jalan Sutra Maritim, adalah nama yang diberikan untuk jaringan rute laut yang menghubungkan Timur dengan Barat, membentang dari pantai barat Jepang, melalui pulau-pulau di Indonesia, di sekitar India sampai ke daratan Timur Tengah - dan dari

sana, melintasi Mediterania ke Eropa. Jaraknya lebih dari 15.000 kilometer dan, bahkan hari ini, bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini tidak dilakukan semata-mata dalam semangat petualangan, di belakangnya ada kekuatan pendorong utama yaitu perdagangan dan bisnis.

Masih dari sumber yang sama bahwa jalur rempah adalah pola perdagangan dibentuk oleh pedagang yang membeli dan menjual barang dari pelabuhan ke pelabuhan. Barang utama dan paling menguntungkan yang diperdagangkan adalah rempah-rempah. Orang mungkin menganggapnya hanya sebagai penyedap makanan. Namun, kata "rempah-rempah" berasal dari bahasa Latin species, yang berarti "barang yang memiliki nilai khusus", dibandingkan dengan barang perdagangan biasa (<https://en.unesco.org/>).

Tapi species atau barang berharga bukanlah satu-satunya titik pertukaran antara para pedagang. Sebab dan tentu ada hal lain yang lebih penting adalah pertukaran pengetahuan, pengetahuan tentang masyarakat baru, budaya dan agama mereka, bahasa, keahlian, keterampilan artistik dan ilmiah. Pengetahuan baru nan segar yang terbawa melintasi lautan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya menjadi sebuah peta informasi penting antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jalur rempah saat ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai jalur perdagangan di mana terjadi proses ekonomis rempah, jalur rempah dimaknai sebagai konsepsi identitas bangsa yang memiliki ikatan sejarah dengan kerajaan ataupun kesultanan yang pernah berjaya di masanya dan masyarakat yang hidup pada masa itu.

Secara khusus, Aceh aceh menjadi salah satu mata rantai yang menjalin dan merajut identitas jalur rempah di nusantara. Lewat perdagangan utama Pasai dan kemudian berpindah ke Banda Aeh, menjadikan Aceh sebagai titik penghubung (connecting point) dan titik perjumpaan (meeting point) antara penduduk "negeri di atas angin" dengan masyarakat "negeri di bawah angin", sebagaimana banyak disebutkan di dalam naskah-naskah klasik dan peta-peta lama. Peta lama yang banyak dihasilkan oleh para penjelajah di dunia ini menunjukkan informasi penting terkait dengan hasil alam suatu daerah dan perhelatan yang terjadi di satu tempat, baik oleh kerajaan tertentu ataupun pelabuhan-pelabuhan yang ada. Untuk kasus Aceh misalnya, peta map yang dihasilkan oleh para penjelajah Eropa sekitar tahun 1645 M menegaskan keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan-kerajaan sekitarnya akan pelabuhan, hasil alam, lokasi, likuk danau dan gambaran lainnya yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah sebagaimana yang diungkapkan oleh Anthony Reid dan Ito Takashi ( 1999).<sup>1</sup>

1 Reid Anthony, Ito Takeshi. A Precious Dutch Map of Aceh, c. 1645. In: Archipel, volume 57, 1999. L'horizon nousantarien. Mélanges en hommage à Denys Lombard (Volume II) pp. 191-208.

Aceh yang memiliki daerah tropis dikarenakan dari aspek geografis kawasan Aceh Tenggara di kelilingi Hutan Tangse, kawasan tinggi dataran Gayo, dan yang terpenting adalah Taman Nasional Gunung Leuser dan terkenal kaya akan sumber daya hayati berupa jenis tumbuh-tumbuhan beranekaragam, salah satunya adalah jenis tanaman obat. Tumbuhan obat adalah tanaman seluruh atau yang salah satu bagian pada tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh penyakit juga berkhasiat bagi kesehatan. Daun, buah, bunga, akar, rimpang, batang (kulit), dan getah (resin) adalah bagian tumbuhan yang dimanfaatkan (Dalimarta, 2000)

Penggunaan bahan alami khususnya tanaman obat pada saat ini cenderung meningkat. Tanaman obat yang diolah sebagai obat tradisional sejak jaman dahulu telah banyak digunakan oleh manusia, terutama masyarakat menengah ke bawah, namun dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, banyak jenis tanaman obat yang sudah diolah dan dikemas secara modern. Penggunaan produk hasil pengolahan tanaman obat secara modern ini kemudian berkembang menjadi pola hidup sehat yang alami.

Dalam catatan-catatan lokal Aceh, sebagaimana terdapat dalam beberapa manuskrip seperti *Naskah Adat Aceh*, *Bustanus Salatin*, dan *Kitab Ar-Rahmah* menunjukkan pentingnya rempah-rempah untuk kesehatan. Peran setiap kerajaan dan bandar di kepulauan Nusantara dalam Jalur Rempah dunia telah mencapai ribuan tahun (2.000-5.000 tahun), berbeda jauh dibandingkan dari perkiraan para sejarawan Barat. Terlebih pohon cengkeh (*Eugenia aromatica*) merupakan tumbuhan asli (endemik) di Pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pala dan bunga pala berasal dari pohon pala (*Miriistica fragrans*) merupakan tumbuhan endemik di beberapa wilayah Nusantara. Rempah-rempah aromatik seperti kemenyan (*Styrax benzoin*) dan kamper (*Dryobalanops aromaticum*) berasal dari getah pohon endemik Sumatera. Beberapa komoditas rempah lain juga berasal dari Sumatera seperti kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) dan lada (*Piper nigrum*)

Selain petajalur kapal laut dan area pelabuhan di suatu tempat, catatan perjalanan para penjelajah juga sangat penting. Penjelajah seperti dari Venesia (Italia) tahun 1292 yang bernama Marcopolo telah menggambarkan Samudera Pasai periodenya. Demikian periode berikutnya, sekitar tahun 1325 musafir asal Maroko dengan catatan "rihlah" Ibnu Battutah mencatat lebih banyak dari sebelumnya akan suasana Kesultanan Samudra Pasai, pelabuhan dan gambaran wilayah yang penting dan istana Sultan pada masanya. Demikian juga hal tersebut menunjukkan pusat kerajaan Pasai di Pulau Sumatra, yang sebagian sumber menyebutnya juga Syumutrah, Samutrah dan beberapa istilah lainnya yang berdekatan.

Sebagai pusat keilmuan dan *meeting point*, Kerajaan Pasai yang berada pada masa keemasannya sudah dikenal memiliki reputasi sebagai kiblat keilmuan di mata kerajaan- kerajaan tetangga. Untuk mendukung pernyataan tersebut, terdapat beberapa sumber yang dapat memperkuat hal tersebut. Suatu ketika, Sultan Mansur Syah (wafat 1477) Raja Malaka menerima hadiah dari Maulana Abu Bakar, seorang ulama yang mengunjungi Malaka, yakni sebuah kitab berjudul Darul Mazlum, karya Maulana Abu Ishaq. Maulana Abu Bakar sendiri tak lain adalah murid dari sang penulis kitab. Setelah menerima kitab tersebut, Mansur Syah meminta sorang ulama Pasai untuk menerjemahkannya. Bahkan pada masa Sultan Mahmud Syah (wafat 1530), pernah mengirim delegasi di bawah pimpinan Tun Muhammad untuk menanyakan beberapa persoalan teologi ke Pasai.

## Rempah dalam Sumber Manuskip dan Dokumentasi Luar Aceh

Hubungan Aceh dengan bangsa-bangsa luar dimulai dengan adanya perdagangan laut dan semakin kuat sudah tercatat lebih banyak dari apa yang kita temukan sumber-sumber saat ini. Hubungan Aceh dengan bangsa-bangsa luar yang seiman dan seagama seperti Turki (Ottoman) dan negara-negara Arab pada masa itu tidak berbeda jauh dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki kultur dan keyakinan berbeda. Semuanya memiliki sikap keterbukaan dan toleransi yang cukup tinggi sehingga hubungan bilateral bidang ekonomi dan perdagangan menjadi bagian penting dalam pengembangan dan perkembangan suatu daerah (baca kerajaan).

Catatan tentang rempah-rempah Aceh sebenarnya sangat berlimpah, baik di dalam maupun di luar negeri, hanya saja belum ada pendataan dan katalogisasi yang merangkum seluruh sehingga sulit mencari data data informasi hasil sumber autentik yang dimiliki oleh Aceh, atau Nusantara secara keseluruhan. Disisi lain, informasi tentang rempah-rempah Aceh tidak terdapat pada satu bagian saja, akan tetapi bercampur dengan tema-tema lain yang pada dasarnya juga tidak terlepas dari kaitan rempah-rempah, misalnya saja naskah-naskah pengobatan atau dokumen dokumen tentang obat herbal, di mana data-data tersebut tersimpan dalam bagian kedokteran ataupun farmasi, tidak tersimpan di bidang pertanian dan perkebunan. Data yang demikian belum tersedia dengan rapi sehingga membutuhkan waktu dan energi yang besar, apalagi banyaknya sumber di negara-negara luar.

Salah satu sumber penting nan kuat yang memperjelas hubungan Aceh dengan bangsa-bangsa (negara) luar adalah peran penting Kesultanan Samudera Pasai, tepatnya periode ke 14-15 M. Di antara sumber penting adalah catatan perjalanan Rihlah Ibnu Bathuthah dan surat dagang Sultan Zainal Abidin ke Duta Portugis di

Goa. Untuk bagian kedua ini, terdapat sebuah surat penting dalam bahasa Arab dari Sultan Kerajaan Pasai, Zainal Abidin, yang ikut “memprotes” atas kelakuan para pedagang dari Portugis. Dokumen penting dan bersejarah terkait rempah adalah surat Sultan Kerajaan Pasai, Zainal Abidin yang dikirim ke perwakilan Portugis di Goa, India. Pada komentar gambar naskah fotografi ini disebutkan bahwa naskah asli tercatat sebagai “Cartas Orientas no. 59 pada Arsip Nasional Torre do Tombo, Lisbon, Portugal” dari Sultan Pasai Sultan Zainal ‘Abidin *al-Qa'im tahta Amri Rabb Al-Alamin*. Zainal ‘Abidin adalah sultan terakhir yang ditemukan makamnya di kawasan tinggalan Samudra Pasai dengan tarikh wafat 923 H/1517 M.<sup>2</sup>

Seperti dikatakan, pengirim atau pemilik surat adalah Sultan Zainal ‘Abidin, yang dalam surat itu tertera gelarannya, yaitu *al-Qa'im tahta Amr Rabb Al-Alamin* (orang yang mengurus Muslimin di bawah perintah Tuhan semesta alam). Zainal ‘Abidin adalah putera Sultan Mahmud (W. 872 H/1468 M) yang tak lain adalah cucu dari Al-Malik Ash-Shalih (696 H/1297 M). Dalam surat tanpa cap itu disebutkan beberapa jaringan pelabuhan penting; *Portugal (Fartugal)*, *Kauj Kalim (Kulam Mali-India)*, *Mulaqa (Melaka)*, *Pariaman (Fariyaman)* *Sumatera Barat*, *Syumuthrah (Sumatera/Pasai)*, *Bengal India*, *Maroko* atau pun mungkin *Meuraksa (Maraqqush)*, *Diyu* dan *Kambai (India)*, *Barrus (Barus)*, *Fulikat (Palikat)*.

Dalam surat komplain tersebut disebutkan secara rinci beberapa permasalahan yang dihadapi di Pasai antara perwakilan pedagang-pedagang luar Aceh yang datang ke Pasai dengan perwakilan pedagang Portugis, di mana perwakilan Portugis telah semena-mena dalam mengambil pajak (*tax* atau *bea cukai*) di jalur Selat Malaka, terutama yang bertujuan ingin singgah dan berbisnis ke kawasan Sumatra (Syumutra) atau dikenal Pasai yang titik sekarang ini berada di kawasan Aceh Utara dan sekitarnya. Secara spesifik, Sultan Pasai menyebutkan rempah-rempah yang dirampas adalah *fulful/filfil* (red. Lada) sebanyak 50 pikul dan 4000 bukhur (*kemenyan*).

Sebelumnya, pada tahun 1345 Masehi, Abu Abdillah ibn Bathuthah (1304-1368) dalam buku travelernya “Rihlah Ibn Bathuthah”<sup>3</sup> menceritakan wilayah-wilayah yang pernah dikunjunginya, antaranya ke Kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir. Ibnu Bathuthah menceritakan bahwa sultan adalah seorang yang taat kepada ajaran Islam dan raja selalu dikelilingi oleh ahli-ahli agama dan juga masyarakat yang ramai serta alamnya yang hijau segar dipenuhi pepohonan yang tumbuh di sana adalah kelapa, pinang, cengkih, dan kemenyan India. Tentu catatan-

2 Lihat: <https://www.mapesaaceh.com/2021/01/naskah-surat-sultan-zainal-abidin-wafat.html>

3 H.A.R. Gibb, Ibn Batutah. Travels in Asia and Africa, London;1929, Chapter X, No. 6

catatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dunia pada masa itu, kebutuhan para traveler Eropa dan Timur tengah mencari rempah-rempah di Nusantara serta menjadi komoditi utama di beberapa wilayah.

Tentunya terdapat beberapa catatan lain, misalnya dari Abu al-Qasim Ubaidullah bin Abdullah bin Khurdadzbih (Ibnu Khurdadbeh) (820–912 M) yang merupakan seorang sejarawan dan geografer yang terkenal dengan karyanya *Kitabul Masalik wal Mamalik* (Kitab Perjalanan-perjalanan dan Kerajaan-kerajaan). Ibnu Khurdadbeh menyebutkan beberapa sumber alam yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan di wilayah Sumatera milsanya kapur barus, bambu, dan kayu yang berkualitas tinggi. Seirama dengan beberapa sumber lainnya dari Jazirah Timur Tengah, Abu Zaid Hasan (10 M) dan juga Abu al-Hasan Ali bin Husien Ibnu Ali al-Mas'udi atau dikenal Mas'udi (10 M), adalah sejarawan dan geografer Islam yang dalam bukunya "*Al-Mas'udi and His World*" menyebutkan tentang rempah-rempah yang tidak berbeda jauh.<sup>4</sup> Tokoh bernama al-Mas'udi dilahirkan pada tahun 283 H atau 895 M di kota Baghdad dan dilaporkan meninggal dunia di Fustat Mesir tahun 345 H atau 956 M. Ia memiliki catatan yang jug atak jauh berbeda dengan Ibnu Khurdadzbih yang menyebutkan tentang komoditi alam yang dihasilkan pada saat itu seperti kamper atau kapur barus yang tumbuh bebas dan besar mencapai ketinggian 20 sampai 30 meter di pedalaman-pedalaman Sumatera. Benda ini dianggap penting pada masa tersebut sebagai untuk aroma dan kebutuhan di rumah, kerajaan dan ruang-ruang publik.

### ***Relasi Rempah Aceh-Turki***

Pada awal masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam, di mana dapat dipahami bahwa relasi dan hubungan mesra Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Ottoman Turki dapat ditinjau dari dokumen koleksi Turki. Periode tersebut dapat dikatakan adalah kerjasama bilateral dua negara (red. kerajaan) yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kebutuhan utama Kesultanan Turki menjadi motor pengespor rempah-rempah dari Nusantara (terutama Aceh) ke adalah memiliki lebih banyak dan beragam sumber-sumber terkait rempah-rempah. Data terawal adalah relasi Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki awal terjalin sekitar tahun 1538-1539 di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar mengirim 4 kapal dengan muatan penuh lada ke Ottoman Turki. Meskipun sejauh ini belum ada kajian mendalam terkait perjalanan di pertengahan abad ke-16,

---

<sup>4</sup> Ahmad A. M. Shboul, *Al-Mas'udi and His World*. London: Ithaca Press, 1979. Atau lihat juga Tarif Khalidi, *Islamic Historiography: The Histories of Mas'udi*. Albany NY: SUNY Press, 1975.

misalnya rute yang ditempuh, pelabuhan yang disinggah, hingga produk-rempah apa saja yang ekspor-impor, dan lainsebagainya. Beberapa kajian tentang perjalanan para *traveler* Arab atau pasukan Ottoman Turki ke "Negeri di Bawah Angin" bahwa jarak yang ditempuh tersebut cukup jauh dan melelahkan melalui jalur darat yang harus singgah di negara Mesir, dan menempuh jalur laut melalui Yaman dan India, sebelum masuk ke Aceh atau jalur Selat Malaka.

Tahap kedua hubungan diplomasi menunjukkan kekerabatan dan pertukaran yang saling menguntungkan pada tahun 1547 di mana kerajaan Aceh mengirim utusan ke Turki bernama Umar dan Husein untuk memohon bantuan menyerang Portugis di Malaka. Tampaknya permohonan Aceh ke Turki dibarengi dengan rempah-rempah Nusantara yang menjadi komoditi utama dan diincar oleh para pedagang dari Eropa. Melihat kesempatan tersebut Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahhar memulai menghentikan gerakan-gerakan kapitalis dan kolonialis dari Eropa yang ingin mencengkram Alam Melayu dan Nusantara. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahhar pun menyiapkan pasukan dan mengirim armada 46 kapal dan lima ribu pasukan untuk mengawal Selat Malaka. Kerjasama ini tentu tidak dengan harga murah apalagi gratis, akan tetapi juga harus dipertimbangkan tentang masa depan kedua belah kerajaan dan kerjasama yang berkelanjutan. Karenanya, tawaran-tawaran Kerajaan Aceh Darussalam kepada Ottoman Turki cukup banyak terkait dengan rempah-rempah.

Sedangkan tahap ketiga pada tahun 1562 yang dinilai lagi kerjasama paling besar antara sultan Aceh dengan sultan Sulaiman Kanuni Turki (meninggal 1566). Aceh mengirim rempah-rempah ke Turki untuk tahapan ini, dan balasannya 10 senjata perang darat, 14 meriam dan ahli pembuat serta penggunaan meriam Turki dengan pimpinan utusan tersebut bernama Lutfi Bey. Salah satunya adalah surat catatan sekretaris kerajaan Turki yang menulis bahan-bahan dikirim dari Aceh ke Turki, serta beberapa surat arsip perjalanan utusan Turki ke Aceh yang harus melalui Mesir dan Yaman, di mana mereka di sana harus menunda keberangkatan diakibatkan perang di Yaman pada tahun 1568.

Hubungan Aceh dengan Turki dan Arab terdapat dalam beberapa sumber, baik sumber lokal maupun sumber asing. Sumber-sumber Aceh misalnya dalam Naskah *Hikayat Aceh* yang menyebutkan Sultan Turki Ustmani mengutus Celebi Ahmad dan Celebi Ridhwan ke Aceh disertai beberapa ahli senjata untuk memperoleh kamper (*camphor*) dan balsam gilead (*belesan oil*) untuk mencari obat penyembuh sakit yang diderita Sultan Turki. Mereka berjumpa dengan Sultan Iskandar Muda (sekitar 1621) dan menghadiahkan berbagai obat-obatan herbal, rempah dan hadiah lainnya.

Kisah rempah-rempah kedermawanan Aceh itu kemudian menjadi perbincangan di Haramain pada musim haji yang menjadikan rempah-rempah idola di sana.

Kisah yang hampir sama juga disebutkan di dalam *Hikayat Meukuta Alam* secara juga mengisahkan tentang utusan kekaisaran Turki Usmani yang mengirim utusan ke Aceh di masa Sultan Iskandar Muda. Pada saat kembali, mereka diberikan sejumlah dirham (uang), tiga kapal berisi lada hitam, padi dan beras disertai beberapa utusan dari Aceh. Kisahnya perjalanan mereka kemudian dikenal *lada sicupak* (segenggam lada). Peristiwa *Lada Sicupak* sebagaimana banyak kisah yang berkembang seperti utusan Aceh harus menunggu lama sehingga yang tersisa lada segenggam yang diserahkan ke Sultan Turki adalah hal keliru. Sebab beberapa referensi ditemui seperti surat-surat dari Kerajaan Turki tentang kerjasama dengan Aceh. Padahal delegasi Aceh saat menghadap Sultan hanya menghantar segenggam lada sebagai contoh produk kepada Sultan, tidak dihantar seluruhnya ke hadapan Sultan sehingga disebut Lada Sicupak.

Kisah hubungan Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Ottoman terekam dalam Hikayat Aceh ala Hikayat Aceh. Ceritanya menyebutkan dua utusan Turki ke Aceh mencari obat atas sakit Sultan yang sudah lama. Celebi Ahmad dan Celebi Ridhwan, sebagai utusan Turki melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan setibanya di Aceh pada masa Sultan Aceh, Iskandar Muda, tidak berada di Banda Aceh, tetapi Sultan Aceh sudah berangkat ke Kerajaan Deli untuk menjaga kedaulatan dan gangguan dari Portugis. Namun demikian, utusan Turki menunggu hingga Sultan Aceh kembali dan mendapatkan obat yang dicari minyak kapur dan minyak tanah.

Sumber-sumber luar juga menampilkan informasi tentang rempah-rempah Aceh yang dikirim ke Turki. Pada tahun 1841-1842 Sultan Aceh mengirim utusan ke Turki dan hadiah melalui Kapten Bankin pedagang berkebangsaan Perancis dengan jumlah sebanyak 13.400 Kg Gaharu, 19.000 Kg Kemenyan Jawi, 1.100 Kg Kamper Putih, 30.700 Kg Lada Putih, dan 3 lembar helai kain sutera. Jumlah fantastis tersebut diberikan sebagai hadiah dengan harapan dapat menjalin hubungan kerjasama seperti dua abad sebelumnya.

Tiga tahun berikutnya, 1845, pengiriman kedua dikirim lagi oleh Sultan Aceh melalui Kapten Istilon asal Perancis sebanyak ; 11.500 Kg Gaharu, 15.300 Kg Kemenyan Jawi, 1.500 Kg Kamper Putih, 27.000 Kg Lada Putih, dan 3 helai kain sutera. Pengiriman hadiah kedua tentu memiliki alasan di baliknya, setidaknya Sultan Aceh telah menerima "sesuatu" dari Turki, hadiah dan ataupun informasi lainnya yang sangat bermanfaat untuk Aceh, sehingga Sultan Aceh mengirim kembali hadiah tersebut.

## **Relasi Rempah Aceh-Inggris**

Hubungan Aceh dan Inggris pernah terjalin baik, Kesultanan Aceh memberikan peluang kepada pedagang-pedagang Inggris untuk dapat leluasa berbisnis di kawasan Aceh dan sekitarnya di wilayah kerajaan Aceh di Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Surat Sultan 'Alauddin Riayat Syah kepada Kapten Henry Middleton asal Inggris pada tahun 1602 membuktikan perizinan tersebut. Surat *sitmi* (bahasa Aceh: Seuteumi) yaitu berupa surat sultan yang diberikan stempel di atasnya menjadi sebagai surat resmi yang bisa digunakan oleh si penerima. Berikut ini isi surat izin untuk Henry Middleton:



Sumber: Bodleian Library MS. Douce Or. e. 4, University of Oxford

*Dengan anugerah Tuhan seru alam sekalian, sabda Yang Maha Mulia datang kepada segala Panglima Negeri dan Pertuha segala negeri yang takluk ke Aceh. Adapun barang tahu kamu sekalian bahwa kepala orang Ingglitir [Inggris] ini Kapten bernama Hary Midelton [Henry Middleton] asalnya kapal ini berlabuh di labuhan Negeri Aceh berapa lamanya ia di sana. Maka mohon dirinya*

*ia berlayar ke Jawa jika ia memeli [membeli] lada atau barang suatu diberi akan kamu dirham atau barang suatu yang orang Ingglitir ini orang sahabat kita raja Ingglitir. Maka kapten dan segala saudagarnya itu hamba pada raja Ingglitir yang hamba raja Ingglitir itu serasa orang kitalah. Jika ia meli berjual dengan kamu yang dalam Teluk Rantau Aceh itu dengan sebenar-benarnya jua. Maka surat sitmi yang kita karunia ia akan dia ini dengan dipohonkan daripada kita pada kita supaya jangan ia dicabul segala orang Teluk Rantau kita. Maka jika ditunjukkannya kepada kamu sekalian sitmi ini, hendaklah kamu permulia dan janganlah seorang daripada kamu mencabuli dia. Inilah sabda kita kepada kamu sekalian. Wassalam.*

Hubungan Aceh dengan Inggris sebagaimana disebut dalam kajian Denys Lombard menyebutkan bahwa di era Iskandar Muda, Aceh Darussalam berupaya meningkatkan devisa kerajaan melalui monopoli perdagangan. Lada menjadi salah satu komoditas yang kerap dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan berlebih dari sektor ini. Orang-orang asing yang ingin bermiaga di bandar-bandar kekuasaan Aceh diwajibkan memperoleh surat pas (izin masuk) sesuai dengan aturan kerajaan. Bea cukai menjadi sektor pendapatan organisasi pelabuhan yang juga menjanjikan bagi pertambahan kas kerajaan. Augustin de Beaulieu, yang mengunjungi Aceh pada 1620-1621, menerangkan bahwa bea cukai Aceh semakin bertambah melimpah setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Lewat perdagangan ini, Aceh berusaha untuk menjadi yang paling terkemuka dalam sektor perdagangan. Jatuhnya Malaka pada 1511, benar-benar menimbulkan berkah tersendiri bagi perkembangan niaga Aceh, terutama dari penjualan lada. Lada dimanfaatkan pihak kerajaan untuk mendapatkan untung yang berlimpah dari berbagai kapal mancanegara yang singgah di Aceh, antara lain berasal dari Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, India, Pegu, Melayu, Nusantara dan bangsa-bangsa lainnya

Selain dikenal sebagai sentral perdagangan dunia, Aceh Darussalam juga merupakan kerajaan Islam yang memiliki pengaruh kuat di sebagian besar Sumatra dan Semenanjung Malaya. Surat Sultan Iskandar Muda yang disimpan di Bodleian Library dengan nomor Or. Rolls b. 1 Universitas Oxford, yaitu surat emas menyebutkan bahwa daerah kekuasaan Aceh, merujuk pada surat yang dikirimkan Raja James I dari Inggris yang di dalam *sarakata*-nya disebut Raja Yakub dikatakan bahwa bagian-bagian dari wilayah Aceh bagian Pulau Sumatra dan sebagian dari

---

<sup>5</sup> Denys Lombard, Kerajaan Aceh; Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hlm. 137-138

Semenanjung Malaya, antaranya wilayah Timur Sumatera mencakup Lubuk, Pedir (Pidie), Samarlanga (Samalanga), Peusangan, Pasai, Perlak, Besitang, Tamiang, Deli, Asahan, Tanjung, Panai / Pani, Batu Sawar, Perak, Rakan, Pahang dan Inderagiri. Sedangkan di pantai barat meliputi Calang, Daya, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, Salida, Inderapura, Selebar / Salibar, Palembang dan Jambi. Dengan pengecualian Palembang dan Jambi, dalam masa yang pendek atau panjang, seluruh kerajaan itu termasuk dalam wilayah teritorial Aceh periode Sultan Iskandar Muda.

Raja James I Inggris memberi hadiah kepada sultan Iskandar muda sebuah meriam "stone pieace" yang terbuat dari Perunggu dengan ukuran tipis dan dihiasi lambang kerajaan Inggris di tengah badan meriam. Meriam dengan ukuran besar dengan berat 2.600 Kg, panjang 3,1 m, kaliber 60 cm, yang terbuat dari Perunggu diproduksi oleh Thomas dan Richard Pit Family pada tahun 1617. Dan berselang dua tahun selanjutnya, 1619, Raja James I mengirim hadiah itu kepada sultan Iskandar Muda sebagai hadiah atas balasan surat emas dikirim kalau Sultan Aceh dan tentu sebagai diplomasi perdagangan dan bisnis antara Aceh dengan Inggris. Pada saat Aceh melawan penjajahan Belanda meriam tersebut disita pada tahun 1874 dan dikirim ke Belanda pada Juli 1875 sebagai hadiah Raja William III yang kini disimpan di Museum Bronbeek Belanda.

## Penutup

Banyaknya naskah kuno ataupun sumber primer di Aceh, dalam bentuk manuskrip, surat-surat (sarakata) ataupun dokumen tertulis lainnya yang memiliki nilai historis belum seutuhnya dapat menceritakan tentang rempah-rempah di Aceh. Sebab, sumber-sumber lainnya masih tersimpan di luar dan perlu diakses dan dikaji. Meskipun prioritas utama sumber-sumber di dalam negeri mengingat sumber-sumber utama ini sudah banyak hilang dan musnah oleh beragam faktor, selain musibah bencana alam, juga konflik dan perang yang cukup berkepanjangan. Rempah-rempah dalam dokumentasi dan arsip Aceh dapat disebut "sulit" ditemukan jika dibandingkan dengan arsip dan sumber luar negeri, terkhusus pada abad-abad awal. Namun demikian, kata "sulit" pun dapat dibantahkan jika ada banyaknya minat para peneliti ingin menjajaki sumber-sumber dokumentasi di beberapa pusat dokumentasi dan museum yang ada di Aceh.

Oleh karena itu, manuskrip rempah-rempah Aceh menjadi sumber primer dan autentik terhadap jalur rempah Aceh dan Nusantara. Maka diperlukan inventarisasi, riset dan kajian pengembangannya ke depan. Rempah Aceh menjadi media diplomasi, politik, koalisi/persaudara, hadiah dan media pengobatan/ herbal serta hubungan

sosial budaya antar bangsa dan itu menjadi modal utama mengingat potensi alam dan sumber daya yang dimiliki bangsa ini lebih dari cukup. Di sisi lain, sumber-sumber primer rempah-rempah dapat dijadikan titik promosi wisata sejarah dan budaya antar wilayah (provinsi) dan antar negara-negara lainnya sebagai memori kolektif dunia, terutama potensi yang dimiliki dalam negeri.

## RINGKASAN CURICULUM VITAE

**HERMANSYAH**, M.Th., MA.Hum

Email: [herman.atjeh@gmail.com](mailto:herman.atjeh@gmail.com) | Website: [www.hermankhan.com](http://www.hermankhan.com)

### Pendidikan

- S1/Bachelor Nadwatul Uloom Lucknow, India (Tamat 2003),
- S2/Magister di Aligarh Muslim University, India (Tamat 2005).
- S2/Magister Bidang Filologi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tamat 2011).

### Jabatan:

1. Ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2022-2026)
2. Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Komisariat Aceh (2021-2025)
3. Sertifikasi Ahli Cagar Budaya tingkat Nasional (2022-2025)

### Aktivitas sekarang (2023):

- Tim Dewan Pakar Pengajuan Hikayat Aceh sebagai Memory of the World (MoW) ke UNESCO 2018-2022
- Anggota Tim Dewan Pakar Naskah Syair-syair Hamzah Fansuri ke IKON (Ingatan Kolektif Nasional) dan ke UNESCO 2023.
- Tim Ahli Jalur Rempah Nusantara untuk Aceh 2020-2024
- Tim Penilai Benda Budaya dan Naskah Kuno di Provinsi Aceh
- Anggota Tim Peneliti Kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Penulis Buku dan alihaksara manuskrip

## **Bagian 3 : Peluang Masa Depan Ekonomi Rempah**

# **Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Produk Rempah Indonesia**

**Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, MSc. Agr**

Departemen Teknologi Industri Pertanian

IPB University

### **A. Sejarah Rempah di Indonesia**

Perdagangan rempah merupakan salah satu bisnis yang cukup tua dan paling menguntungkan pada masanya. Rempah-rempah telah dikenal di Eropa sekitar 70 SM dan digunakan sebagai obat serta penyedap makanan. Maluku menjadi sumber utama rempah-rempah dunia, dari Selat Malaka rempah-rempah dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat ke India serta China melalui Jalur Sutra. Rempah kemudian diangkut dengan kapal ke pelabuhan di Venesia, lalu dibawa melalui darat ke Mediterania, kemudian dieksport ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah hingga akhirnya menjadi rute perniagaan rempah tersebar di Eropa. Saat itu, rempah seperti pala dan cengkeh merupakan barang mewah yang sering ditukar dengan kain dari India, atau keramik dari China. Rempah sangat disukai oleh bangsa Eropa, karena iklim Eropa yang dingin, rempah sering dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan biasa digunakan untuk pengobatan, penyedap masakan, juga parfum. Bahkan saat itu rempah-rempah dari Negeri Timur yaitu Nusantara dipercaya menjadi obat hirup alami untuk mengobati wabah besar yang mengakibatkan kematian luar biasa di Eropa.

Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di kepulauan rempah Maluku adalah Portugis. Pada tahun 1506, Seorang Portugis bernama Lodewijk de Bartomo datang pertama kali di Nusantara dan melaporkan keadaan Maluku ke tanah asalnya. Hingga beberapa tahun kemudian orang-orang Portugis secara resmi tiba di Maluku melalui rute Utara Selat Malaka, yang mana merupakan pelabuhan tempat transit keluar masuknya perdagangan di Asia Tenggara dan kemudian sampai di pulau Banda. Pada saat Portugis berada di kepulauan Maluku, kondisi saat itu tidak begitu baik, Kesultanan Maluku yaitu Ternate dan Tidore sedang berseteru dan bersaing

ketat untuk menguasai pusat perdagangan rempah Maluku dengan membentuk kongsi dagang Uli Lima (Ternate) dan Uli Siwa (Tidore). Dalam waktu relatif singkat kedatangan Portugis kemudian disusul Spanyol yang merupakan pesaing dalam upaya menemukan kepulauan rempah. Sesampainya di Maluku, Spanyol dapat dengan mudah mempengaruhi warga lokal, namun mengalami kesulitan menghadapi Portugis untuk mendapat kewenangan dalam menangani kepulauan Maluku seutuhnya. Keduanya saling bersaing dan berupaya memperoleh dukungan juga legitimasi dari kerajaan-kerajaan lokal, hingga akhirnya Portugis bergabung dengan Ternate dan Spanyol bergabung dengan Tidore yang menyebabkan Maluku terpecah belah.

Bangsa Eropa makin mudah menguasai Nusantara karena konflik yang banyak terjadi di antara para penguasa Nusantara. Belanda merupakan negara yang kemudian sampai di laut Banda pada tahun 1599. Ketika Belanda akhirnya menemukan pulau Banda, mereka berupaya untuk melindungi rempah-rempah dengan melakukan monopoli perdagangan dan membentuk VOC pada tahun 1602, hingga akhirnya VOC berhasil menguasai perkebunan pala dan rempah-rempah mewah Nusantara. Terdapat tiga kekuasaan atas pulau Maluku saat itu, Ternate Utara dikuasai kerajaan Ternate, Ternate Tengah dikuasai VOC, dan Ternate Selatan juga Barat dikuasai Spanyol. Pada tahun 1663 Spanyol terpaksa meninggalkan Maluku karena harus melindungi negara jajahannya, Manila, dari serbuan bajak laut Tionghoa. Praktis menyebabkan wilayah Ternate Selatan dan Barat menjadi tidak bertuan dan hal ini kemudian dimanfaatkan Belanda untuk memperkuat keberadaannya di Maluku. VOC semakin gencar melakukan kegiatan monopoli perdagangan, apalagi dengan perginya Spanyol membuat seluruh tata niaga rempah-rempah di daerah Maluku berada di bawah kendali penuh Kompeni. Hingga terbentuk suatu perjanjian mengenai "hak monopoli Kompeni" atas tata niaga rempah-rempah di seluruh wilayah Maluku.

Namun saat itu monopoli perdagangan rempah VOC terhalangi oleh keberhasilan Inggris menguasai salah satu pulau di Banda bernama pulau Run. Pada tahun 1797, Inggris tiba di pulau Banda dan mencanangkan kolonialisme Inggris. Saat itu Inggris hanya mampu mempertahankan pulau Run selama 4 tahun, hingga akhirnya bisa dikuasai Belanda. Namun, tidak berhenti di situ. Inggris melakukan aksi balas dendam dengan merebut pulau Manhattan di New York yang disebut Belanda sebagai New Amsterdam sejak Prancis menduduki negeri Belanda. Hingga akhirnya kedua negara melakukan kesepakatan melalui perjanjian Breda yang mana dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa pulau Run yang sebelumnya dikuasai Inggris tetapi sedang diduduki Belanda menjadi milik Belanda. Sedangkan pulau Manhattan di New York yang merupakan tanah jajahan Belanda tetapi sedang diduduki Inggris, resmi diberikan kepada Inggris. Seiring berjalaninya waktu, kedua pulau saat ini memiliki nasib berbeda.

Pulau Run di Banda yang diperebutkan dan dahulu sangat berjaya karena menyimpan pala layaknya harta karun kini menjadi pulau terpencil dan terlupakan akibat kemunduran perdagangan dan anjloknya harga pala. Sedangkan di sisi lain, pulau Manhattan yang dahulu hanyalah pos dagang bulu binatang, kini menjelma menjadi kota yang paling maju di dunia bahkan menjadi salah satu pusat ekonomi global yang berada di kota New York.

## B. Sejarah, Kinerja, dan Produktivitas Rempah di Aceh

Aceh memiliki sejarah panjang sebagai penghasil rempah di kepulauan nusantara. Pada abad 17-18 Aceh tercatat sebagai penghasil utama Lada dunia Merujuk pada peta abad ke 18 yang dibuat pelaut Australia-Irlandia Samuel Ashmore, terdapat 99 Pelabuhan Lada di sepanjang pesisir Barat Selatan Aceh. Dari pelabuhan-pelabuhan inilah Aceh memasok kebutuhan lada dunia pada abad 17-18. Saat ini kawasan Barsela Aceh juga merupakan penghasil minyak atsiri bahan baku industri parfum terbaik di dunia, yang bersumber dari tiga komoditas rempah yaitu pala, cengkeh, serai wangi, dan nilam.

Potensi rempah terbesar di Aceh saat ini adalah pala. Provinsi Aceh merupakan daerah sentra penghasil pala urutan kedua dengan luas area 24.010 Ha dengan jumlah produksi sebesar 6.273 ton pada tahun 2019. Aceh memiliki beberapa daerah kabupaten sentral yang memproduksi pala, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Selatan. Daerah Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah yang memiliki luas tanam perkebunan pala terbesar dengan luas tanam mencapai 16.898 hektar dan jumlah produksi sebesar 5.362,5 ton tahun 2020. Salah satu daerah yang memiliki kontribusi penghasil pala di Kabupaten Aceh Selatan adalah Kecamatan Tapak Tuan dengan luas tanam 2.229 hektar dan jumlah produksi sebesar 425 ton pada tahun 2020 (BPS 2021).

Pemasaran produk pala di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan saat ini masih dipasarkan dalam bentuk buah pala, biji pala basah, dan biji pala kering. Tujuan pemasaran produk pala beragam yaitu terdiri dari pedagang besar, eksportir, industri pengolahan makanan dan minuman, dan industri pengolahan minyak asiri pala. Berdasarkan penelitian lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani atau pelaku usaha menjual produk pala nya dalam bentuk biji pala basah dan biji pala kering dengan harga yang diterima relatif rendah. Jika dilihat dari net profit yang diperoleh industri pengolahan khususnya minyak asiri pala memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Namun, pasar minyak pala di Kabupaten Aceh Selatan lebih dikuasai oleh perusahaan eksportir. Sehingga hal ini menunjukkan ada tingkat kekuatan yang tinggi memengaruhi harga di pasar yang menyebabkan lemahnya posisi petani dalam menentukan harga. Jumlah pabrik penyulingan terbanyak berada

di ibu kota seperti Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan home industry pengolahan pala menjadi produk makanan dan minuman berlokasi di Kecamatan Tapak Tuan (Fahrizal et al 2019; Idawani 2015; Mujiburrahmad et al 2019). Melihat tingginya permintaan akan pala maka komoditas ini perlu dikembangkan baik pada kegiatan pemasaran produk primer maupun produk turunannya.

Berikut data komoditas unggulan di Aceh berdasarkan Statistik Perkebunan Aceh 2021-2022.

**Tabel 1.**  
**Luas Areal (Ha)**

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Pala	23.994	24.897	25.189	25.461	25.512
Lada	1.185	1.230	1.260	1.289	1.263
Cengkeh	24.868	25.091	25.419	26.008	25.950
Nilam	2.041	1.210	1.219	1.228	1.212
Kemiri	16.840	16.373	16.281	16.290	16.403
Kayu Manis	198	250	247	260	266
Sereh Wangi	17.934	19.009	20.317	20.625	20.552

**Tabel 2.**  
**Produksi (Ton)**

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Pala	6.074	6.100	6.586	6.567	6.688
Lada	324	352	358	317	268
Cengkeh	5.268	5.515	5.513	5.661	5.727
Nilam	484	178	225	178	199
Kemiri	9.014	9.066	9.000	9.051	8.874
Kayu Manis	126	117	111	107	101
Sereh Wangi	2.539	2.609	3.187	3.414	3.208

**Tabel 3.**  
**Produktivitas (Kg/Ha)**

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Pala	639	632	665	662	656
Lada	697	672	635	518	477
Cengkeh	593	592	591	599	599
Nilam	328	228	261	174	182
Kemiri	681	708	677	681	681
Kayu Manis	-	506	1.833	915	1.016
Sereh Wangi	180	177	169	177	172

## C. Potensi Ekspor Rempah

Minyak atsiri (Essential Oil) adalah minyak mudah menguap yang komponen utamanya adalah terpen, minyak ini dihasilkan dari cairan terkonsentrasi asli yang diekstrak dari tanaman sehingga baunya sangat menyengat. Minyak atsiri juga dikenal sebagai minyak aromaterapi yang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Karakteristik dari minyak ini tidak larut dalam air, berbau harum dengan tingkat keharuman yang bertahan dari sumber tanaman dan komposisi yang terkandung di dalamnya (ber variasi mulai dari lembut/halus sampai segak menyengat), dan dihasilkan dari ekstrak berbagai macam bagian tanaman, seperti minyak yang dihasilkan dari akar (akar wangi, kemuning), daun (nilam, cengkeh, kayu putih, serai, kemangi), biji (pala, lada, anis, kapulaga, kasturi), buah (adas, jinten, anis, ketumbar), bunga (cengkeh, ylang-ylang, melati, mawar), kulit kayu (kayu manis, akasia, lawang), kayu (cendana, gaharu), rimpang (jahe, kunyit, lengkuas, temulawak) dan tanaman lainnya. Minyak atsiri mengandung komponen penyusun yang mudah menguap seperti terpen, keton, fenol, hidrokarbon, alkohol, ester, asam-asam organik, dan lainnya. Komponen kimia yang terkandung dalam minyak atsiri tersebut memiliki manfaat sebagai obat-obatan, banyak digunakan untuk efek terapeutik yang tidak hanya memberikan efek fisiologis terhadap sistem pernapasan, otot, sendi, hormon, dan imun, namun juga memberikan efek psikologis untuk menenangkan dan mengurangi kecemasan.

Menurut Dewan Atsiri Indonesia, terdapat hampir 100 jenis tanaman atsiri dan 400-500 spesies tanaman rempah di Indonesia, hal ini menggambarkan betapa beruntungnya kita memiliki kekayaan alam luar biasa. Dari 150 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan di pasar internasional 40 diantaranya diproduksi di Indonesia. Tidak mengherankan jika sejak dahulu bangsa kita menjadi salah satu pusat kebutuhan dunia apalagi rempah-rempah yang diminati bangsa Eropa banyak yang hanya tumbuh di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang tersebar di Indonesia, mampu mengantarkan kita sebagai pemimpin pasar dunia untuk komoditas minyak atsiri khususnya minyak pala, cengkeh, nilam, dan kayu putih yang mana hanya Indonesia produsen utamanya.

Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara pemasok minyak atsiri terbesar di dunia. Indonesia menjadi penyuplai minyak atsiri lebih dari 70% kebutuhan dunia, yang mana banyak dieksport ke Amerika, Eropa, Afrika, hingga Oceania. Nilai ekspor minyak atsiri merupakan salah satu sumber devisa utama bagi Indonesia, di mana Compound Annual Growth Rate (CAGR) untuk ekspor tahunan minyak atsiri Indonesia selama 5 tahun terakhir, menunjukkan tren yang cenderung

mengalami peningkatan akibat nilai jual minyak atsiri yang tinggi. Hingga April 2021 nilainya mencapai 84 juta USD dengan pertumbuhan tahunan sebesar 15,5%.

Salah satu komoditas minyak atsiri yang paling banyak diminati adalah minyak pala dan cengkeh yang sejak dahulu sudah diketahui memiliki kualitas terbaik di dunia. Bahkan Indonesia menjadi pemasok lebih dari 90% kebutuhan minyak pala dunia. Di mana dari total minyak pala yang ada di Indonesia, 50%-nya diproduksi dari Maluku. Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia dianugerahi tanaman rempah yang bernilai tinggi di pasar dunia. Melimpahnya sumber rempah Indonesia yang didorong nilai jual serta permintaan pasar luar negeri akan minyak atsiri yang tinggi, merupakan peluang eksportir yang menjanjikan. Potensi ekonomi minyak atsiri tidak main-main dan mampu membawa dampak positif terhadap perekonomian. Dengan persebaran sumber daya nabati Indonesia yang melimpah maka produksi minyak atsiri kedepannya tidak hanya berfokus pada pala, cengkeh, nilam, dan kayu putih saja. Keuntungan produksi dari komoditas rempah lain seperti anis, kapulaga, lawang, serai wangi, dan tanaman lain menjadi minyak atsiri pun terbuka sangat lebar dan perlu diperhatikan agar menjadi produk unggulan. Berikut beberapa data komoditas rempah unggulan di Indonesia.

**Tabel 4. Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Rempah Indonesia (Direktorat Jendral Perkebunan, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional (2021-2023))**

Jenis Tanaman	Tahun	Volume (Kg)	Nilai (\$ US)
Pala	2021	26.489.000	198.114
	2020	22.820.635	158.420
	2019	19.957.000	138.024
Lada	2021	37.738.000	166.751
	2020	58.378.402	160.387
	2019	51.771 .000	147.343
Cengkeh	2021	20.139.000	96.054
	2020	47.765 .000	176.557
	2019	25.990 .000	111.537

**Tabel 5. Perkembangan Harga Rata-rata Tahunan Komoditi Rempah di Pasar Dunia (Sumber: BPS (2022), Ekspor)**

Jenis Tanaman	Jenis Ekspor	Tahun	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (Ribu US\$)
Pala	Biji	2022	2.675,2	25.166,4
		2021	2.198,2	20.664,4
Lada	Biji	2022	18.041,8	87.427,9
	Bubuk		1.155,7	6.195,0
	Biji	2021	19.337	69.851,9
	Bubuk		2.202,2	9.997,2
Cengkeh	Cengkeh	2022	6.662,5	40.109,1
		2021	14.845,6	66.913,3

## D. Kinerja dan Produktivitas Rempah di Indonesia Saat Ini

Menurut data yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menduduki peringkat pertama produsen vanili dan cengkeh dunia serta menduduki peringkat ke-2 produsen lada dan pala dunia di tahun 2014 (FAOStat, 2016). Sebagai produsen rempah, Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, permintaan pasar komoditas rempah dunia terus meningkat. Selama periode 2011-2015, impor rempah dunia naik rata-rata sebesar 7,2% per tahun dengan nilai mencapai USD 10,1 miliar di tahun 2015 (Trade Map, 2016). Dengan demikian, rempah-rempah merupakan komoditas ekspor yang menjanjikan mengingat pasarnya yang terus tumbuh, sementara negara produsen jumlahnya terbatas. Hanya negara yang memiliki iklim tropis basah yang dapat menjadi tempat budidaya rempah-rempah (Teknologi Pangan UNIMUS, 2016).

Komoditas rempah Indonesia memiliki daya saing yang cukup baik di pasar global. Indonesia menduduki peringkat ke-4 eksportir rempah dunia dengan pangsa 8,8% di tahun 2015, berada di bawah India, Vietnam dan Tiongkok (Trade Map, 2016). Di sisi perdagangan, rempah Indonesia masih menjadi salah satu komoditas yang telah mencatatkan surplus neraca perdagangan luar negeri sebesar USD 801,1 juta di tahun 2015. Surplus tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar USD 561,5 juta. Hampir semua komoditas rempah di tahun 2015 menyumbangkan surplus neraca perdagangan, kecuali cabe kering dan kelompok rempah lainnya (daun thyme, curry dan lainnya) yang justru

mencatatkan defisit masing-masing sebesar USD 22,1 juta dan USD 5,1 juta. Defisit cabe kering di tahun 2015 disebabkan karena tingginya kebutuhan cabe pada konsumsi non-rumah tangga di Indonesia seperti untuk industri makanan olahan, bumbu masak praktis dan sambal yang belum dapat dipenuhi oleh pasokan dalam negeri, sehingga harus impor.

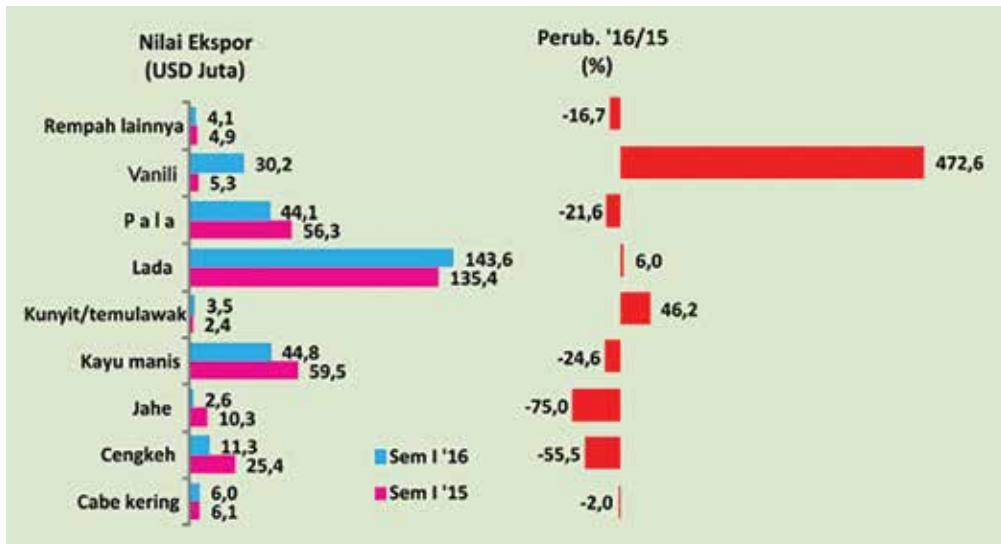
**Tabel 6. Neraca Perdagangan Rempah-rempah Indonesia**

(Sumber: BPS (2016), diolah)

KELOMPOK	NILAI (USD JUTA)					JAN-JUNI		Perub. (USD Juta) '16/15
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	
Neraca Rempah-rempah	67,04	505,54	556,16	561,53	801,13	262,76	192,00	(70,76)
Cabe kering	(9,46)	(7,25)	(15,99)	(21,06)	(22,11)	(11,14)	(11,36)	(0,22)
Cengkeh	(328,85)	(86,03)	22,10	33,83	46,36	25,29	(38,38)	(63,67)
Jahe	(15,36)	(15,35)	8,98	46,66	12,25	5,08	2,43	(2,65)
Kayu manis	58,61	47,75	69,94	106,41	100,55	57,64	43,21	(14,42)
Kunyit/temulawak	4,19	1,96	2,12	4,72	10,23	2,23	3,31	1,08
Lada	205,41	413,06	343,19	274,89	535,37	124,00	124,85	0,85
Pala	152,48	156,16	131,33	121,68	106,97	55,59	43,66	(11,93)
Vanilli	4,58	4,96	6,09	5,69	16,55	5,05	30,13	25,07
Rempah lainnya	(4,56)	(9,73)	(11,60)	(11,29)	(5,05)	(0,98)	(5,85)	(4,87)

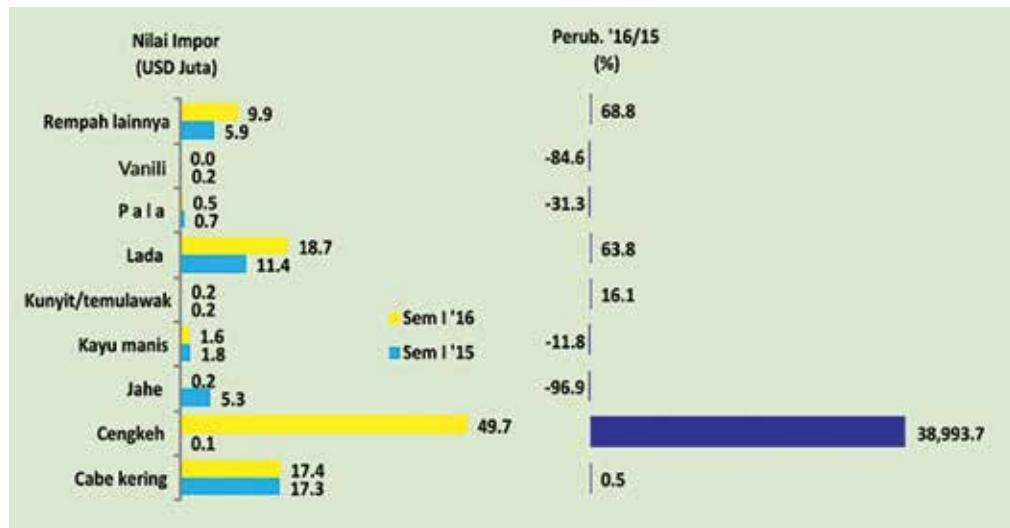
Surplus rempah-rempah tersebut terus berlanjut hingga semester I 2016 mencapai USD 192 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar USD 70,8 juta dibandingkan dengan capaian surplus semester I 2015. Penurunan surplus tersebut disebabkan oleh ekspor di 2016 yang melemah hingga 5,1% (YoY), sementara di sisi lain impor justru melonjak cukup signifikan sebesar 128,9% (YoY). Meskipun mengalami pelembahan ekspor selama semester I 2016, beberapa komoditas rempah justru masih mengalami peningkatan, antara lain vanili, lada serta kunyit/temulawak.

Pelembahan ekspor beberapa komoditas rempah di tahun 2016 merupakan kelanjutan dari penurunan ekspor yang terjadi di tahun 2015 untuk komoditas pala, jahe dan kayu manis yang disebabkan oleh permasalahan kualitas, seperti yang terjadi pada beberapa kasus ekspor pala yang kemungkinan tercemar oleh aflatoxins sehingga tidak dapat masuk ke pasar Uni Eropa (Bisnis Bali, 2015). Secara keseluruhan, lada, kayu manis dan pala merupakan kontributor utama ekspor Indonesia dengan pangsa masing-masing sebesar 62,8%; 12,4% dan 11,9% dari total ekspor rempah Indonesia di tahun 2015.

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekspor Rempah-rempah Semester I 2026**

(Sumber: BPS 2016, diolah)

Dari sisi impor, komoditas rempah yang berkontribusi terhadap peningkatan impor secara signifikan adalah cengkeh yang impornya selama Januari-Juni 2016 naik sebesar 38.993,7% (YoY). Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) menyatakan bahwa lonjakan impor komoditas cengkeh yang sangat tinggi dipicu oleh keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang menjadi bagian dari paket deregulasi dan debirokratisasi yang diluncurkan oleh pemerintah (AgroIndonesia, 2016). Dengan dikeluarkannya Permendag No. 75 Tahun 2015, praktis impor cengkeh dapat dilakukan secara bebas, namun demikian regulasi tersebut hingga saat ini masih mengundang pro dan kontra (AgroIndonesia, 2016). Bagi petani cengkeh, pembebasan impor akan menekan harga dan pendapatan di tingkat petani. Dengan masuknya cengkeh impor, diperkirakan harga dapat menyentuh angka Rp 50.000/Kg dari harga saat ini sebesar Rp 125.000/Kg. Petani juga merasa khawatir bahwa bebasnya impor menyebabkan pelaku industri pengguna cengkeh di dalam negeri lebih memilih cengkeh impor daripada menggunakan cengkeh petani lokal dikarenakan harga internasional yang lebih murah (AgroIndonesia, 2016). Sementara bagi industri, impor cengkeh dibutuhkan sebagai bahan baku khususnya bagi industri rokok. Meskipun hingga saat ini masih terjadi perdebatan terkait regulasi pembebasan impor cengkeh tersebut, neraca perdagangan cengkeh tetap menunjukkan angka yang positif mencapai USD 46,4 juta di tahun 2015.



**Gambar 2. Pertumbuhan Impor Rempah-rempah Semester I 2026**

(Sumber: BPS 2016, diolah)

Indonesia menjadi negara pengekspor HS 090811 (nutmeg, mace, cardamoms) terbesar dengan nilai ekspor US\$ 25,7 juta pada tahun 2020 (Tridge 2021) dan mampu menyuplai 60% – 75% pangsa pasar dunia (Zalukhu 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pala yang diproduksi oleh Indonesia diminati oleh pengusaha impor pala. Kemendag (2013) menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah penghasil pala terbesar di dunia dengan julukan “The King of Spices” karena kualitas yang unggul dan kondisi alam yang mendukung sehingga memungkinkan menghasilkan berbagai jenis rempah-rempah dengan kualitas terbaik.

Selain itu, saat ini sedang digencarkan Indonesia Spice Up the World (ISUTW) adalah suatu program yang didukung oleh kementerian dan lembaga, utamanya yang terkait pangan untuk peningkatan kontribusi sektor kuliner bagi perekonomian nasional. Salah satu targetnya adalah peningkatan jumlah ekspor rempah dan bumbu Indonesia sebesar USD 2 miliar pada tahun 2024. Selain itu, hadirnya 4.000 restoran Indonesia di luar negeri menjadi target dari program ini. Ekspor rempah-rempah Indonesia pada Januari-Agustus 2021 tercatat sebesar US\$ 499,1 juta dan nilai tersebut tumbuh sebesar 12,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

## E. Produk Inovasi Rempah

Rempah-rempah adalah sumberdaya hayati yang sejak lama telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas (FAO, 2005). Rempah adalah tanaman atau

bagian tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam makanan dengan fungsi utama sebagai pemberi cita rasa. Rempah-rempah dapat digunakan sebagai bahan tambahan makanan dalam seni kuliner, sebagai jamu, kosmetik dan antimikroba.

Dalam bidang kesehatan, beberapa peneliti telah melakukan eksperimen, seperti yang telah dilakukan oleh Dr. Rika Indri Astuti, M.Si *et al.* 2019 yang meneliti ekstrak cengkeh yang dikembangkan sebagai agen anti-aging serta agen terapi penyakit degeneratif. Hasil penelitian berhasil mengungkap adanya aktivitas antiaging dari ekstrak bunga dan daun cengkeh pada organisme model khamir *Saccharomyces cerevisiae* dan *Schizosaccharomyces pombe*; yang merupakan landasan pengembangan ekstrak cengkeh sebagai agen anti-aging.

Dalam industri pangan juga telah dilakukan penelitian seperti penggunaan andaliman sebagai bahan pengawet alami pada pangan. Inovasi ini menawarkan pembuatan bubuk andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium*) dengan cita rasa yang sama dengan andaliman segar, terutama aroma jeruk dan rasa kebas (numbing sensation), guna mengatasi masa simpan yang pendek dan mempermudah distribusinya sebagai rempah pangan yang bermanfaat bagi kesehatan (Wijaya *et al.* 2019).

Selain itu juga dilakukan penelitian pengembangan bahan aditif dari rempah. Minyak atsiri (eugenol dan sitronelal) yang diisolasi dari daun cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan sereh wangi (*Cymbopogon nardus*), dapat dijadikan bahan tambahan (additive) bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Hasil pengujian nilai kalor menunjukkan penggunaan eugenol dalam bahan bakar solar meningkatkan nilai kalor sebesar 10%, sementara sitronelal sebesar 17%. Penambahan eugenol mampu menurunkan konsumsi bahan bakar solar hingga 30%, sedangkan sitronelal sebesar 37%. Uji emisi juga menunjukkan penurunan konsentrasi gas CO, NO, SO maupun total partikulat.

Dalam bidang pengembangan proses, dilakukan fraksinasi pada minyak seperti minyak pala untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang tinggi. Contoh yang pernah dilakukan penelitian adalah fraksinasi pada minyak pala. Minyak pala dapat digunakan sebagai sumber *fragrance* ataupun *flavor*. Minyak pala yang digunakan sebagai flavor adalah minyak pala yang tidak mengandung terpen karena golongan monoterpen dalam minyak pala cenderung mengalami polimerisasi dan membentuk senyawa yang tidak diinginkan, sehingga merusak bau dan flavor yang khas dari minyak pala. Kelompok senyawa terpen dapat dipisahkan dari minyak pala melalui proses deterpenasi. Deterpenasi merupakan proses menghilangkan seluruh atau sebagian komponen terpen di dalam minyak pala dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas minyak, meningkatkan kualitas rasa dan bau khas minyak, meningkatkan kelarutan dalam alkohol serta memperbaiki daya simpan. Teknik deterpenasi minyak pala dapat dilakukan melalui metode pemisahan kromatografi kolom, distilasi vakum dan

ekstraksi secara selektif menggunakan pelarut. Namun, metode yang paling paling cocok diterapkan dalam skala industri adalah distilasi vakum karena lebih cepat, tidak membutuhkan pelarut, sederhana dan dapat diadopsi pada skala industri.

## F. Peran Perguruan Tinggi

Pada umumnya, pengrajin minyak atsiri atau UMKM masih menggunakan cara tradisional dengan peralatan sederhana dalam proses penyulingan minyak atsiri. Sehingga kualitas minyak atsiri cenderung kurang memenuhi standar nasional/internasional, adanya ketimpangan dari kualitas tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan kestabilan harga dan akan berimbas pada kurang menguntungkannya usaha pengolahan minyak atsiri. Permasalahan industri minyak atsiri masih berkutat pada proses penanaman, teknik dan kelangsungan produksi, kualitas produk, serta belum berkembangnya industri hilir atsiri yang bernilai tambah lebih. Selama ini peningkatan mutu minyak atsiri Indonesia dilakukan di negara tujuan ekspor yang umumnya akan diolah menjadi minyak turunan atau digunakan sebagai bahan baku industri seperti industri perasa, wewangian, penguat aroma, parfum, produk rumah tangga (bahan baku sabun, deterjen), farmasi, dan oleokimia. Oleh karena itu perlu upaya khususnya dari berbagai instansi seperti perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendampingan petani binaan untuk teknik budidaya tanaman yang baik, pasca panen, pendampingan penyulingan tradisional, proses produksi yang didukung teknologi berstandar alih teknologi fraksinasi (pemisahan senyawa) untuk meningkatkan kemurnian, hingga pengembangan produk turunan minyak atsiri yang memiliki harga jual lebih tinggi. Pengolahan yang sesuai dan mata rantai industri yang terintegrasi dengan baik dari hulu ke hilir akan menghasilkan perolehan minyak atsiri yang tinggi dan berkualitas. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta penyuling atsiri Indonesia.

Pengembangan minyak atsiri dari rempah-rempah Nusantara melalui peningkatan produktivitas dan kualitas minyak rempah-rempah lain menjadi peluang besar yang tidak boleh dilewatkan. Revitalisasi potensi sumber daya rempah lain menjadi minyak atsiri dapat membantu meningkatkan pemanfaatan rempah, memberdayakan para petani, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang rempah, dan lebih jauh lagi menghidupkan eksistensi jalur-jalur rempah di Nusantara agar kembali dikenal dunia.

# **Program Wisata Tematik Jalur Rempah Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 Tahun 2023**

**Oleh: Syaifulah Agam, SE., M.Ec., Ph.D.**

Direktur Manajemen Industri,

Deputi Bidang Industri dan Investasi,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

**Banda Aceh, 6 November 2023**

## **I. Pendahuluan**

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,13 juta kunjungan pada Agustus 2023. Jumlah ini merupakan yang tertinggi semenjak pandemi Covid-19. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2023 mencapai 7,44 juta kunjungan, naik 166,12% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Januari-Agustus 2022, jumlah kunjungan wisman ke RI hanya 2,79 juta kunjungan. Mayoritas wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Agustus 2023 berasal dari Malaysia, yaitu 174,79 ribu kunjungan (15,43%), diikuti wisman berkebangsaan Australia 129,06 ribu kunjungan (11,39%), Singapura 105,46 ribu kunjungan (9,31%), Tiongkok 85,2 ribu kunjungan (7,52%), dan Timor Leste 64,29 ribu kunjungan (5,68%).

Pascapandemi Covid-19, terjadi pergeseran tren wisata yang mengarah pada wisata berbasis experience dan alternative tourism. Motivasi wisatawan global saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Saat ini orang berwisata bukan hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi semakin banyak yang ingin mencari pengalaman yang bermakna bagi hidupnya. Wisata saat ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit). Untuk itulah, Program Tematik Jalur Rempah memiliki potensi yang sangat baik dalam menjawab kebutuhan tersebut, karena menawarkan alternatif destinasi wisata alam dan budaya, melalui pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.

Program Tematik Jalur Rempah juga dapat menghadirkan keunikan dan ciri khas produk lokal, atraksi budaya daerah, serta pelayanan yang berkualitas dengan

mengangkat daya tarik daerah di sepanjang Jalur Rempah sebagai destinasi wisata keindonesiaan berbasis akar budaya bahari dan agraris. Diharapkan melalui pariwisata, sejarah panjang Jalur Rempah sebagai bagian dari identitas peradaban bangsa Indonesia, dimana jalur tersebut merupakan jalur budaya yang sedang diusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO.

## II. Pembahasan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf) telah melakukan berbagai strategi untuk mempersiapkan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi, di antaranya menyusun suatu sertifikasi baru berpedoman CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability); sehingga ke depannya sektor pariwisata Indonesia tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih sustainable. Saat ini, tidak kurang dari 6000 unit usaha di 34 provinsi telah memperoleh sertifikat CHSE, mulai dari outlet, restoran, hingga destinasi wisata, sentra ekonomi batik, dan lain sebagainya.

Rempah-rempah dari Nusantara diperkirakan sudah dikenal dunia sejak era sebelum Masehi. Jejakrempah-rempah Nusantara ditemukan pada kebudayaan kuno di Mesopotamia, Mesir, Romawi dan Tiongkok. Catatan tertua yang menunjukkan Nusantara sebagai tempat penghasil rempah terbaik ditulis oleh Cladius Ptolemaeus (M). Lini waktu sejarah kemudian menyebutkan Nusantara didatangi para pedagang Asia dan selanjutnya terbentuk jejaring perdagangan dunia. Kedatangan para pedagang Eropa mengubah peta perdagangan rempah-rempah dunia: dari co-sharing antar pedagang Asia menjadi monopoli pedagang Eropa yang mengeksplorasi potensi kekayaan alam Nusantara.

Rempah-rempah menjadi komoditas yang penting karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selain untuk obat, rempah-rempah juga banyak digunakan untuk bumbu masakan, wangi-wangian dan pewarna alami. Bumbu Masakan Adas, adas manis, adas sowa (dill), andaliman, asam cikala, asam gelugur, asam jawa, asam kandis, bangle, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bunga lawang (kembang pekak), cengklik, daun bawang, jahe, jeruk nipis, jeruk purut, jintan, jintan hitam, jintan putih, kapulaga, kapulaga seberang, kecombrang (honje, bunga kantan, dan honje hutan), kemangi, kemiri, kencur, ketumbar, kulit manis (kayu manis), kunyit, lada, laurel (salam sebrang), lempuyang, lengkuas, mustar, pala dan fuli, pandan wangi, salam, salam koja, selasih (basil), serai, temu giring, temu hitam, temu kunci, temu lawak, temu mangga, temu putih, temu putri, temu rapet, temu tis,

vanili, wijen. Pewangi Alami Akar wangi, cendana, damar, gaharu, kapur barus, kayu putih atau gelam, kayu mesoyi atau masoi, kemenyan, kemenyan arab, kemenyan jawa, kopal, kenanga, mawar. Diolah dari PewarnaAlami Gambir, kesumba, secang atau sepang, soga, suji, tarum atau indigo.

Ada tiga potensi yang bisa digali dari Jalur Rempah bagi pariwisata Indonesia. Yang pertama wisata sejarah atau susur, wisata kuliner dan wisata wellness atau kebugaran. Ada banyak cerita menarik dari sejarah rempah-rempah di Indonesia, mulai dari Maluku, Sulawesi sampai Samudra Pasai. Semuanya punya cerita tersendiri tentang perkembangan rempah yang sangat disukai dan diincar bangsa Eropa dan bahkan seluruh dunia. perjalanan atau wisata sejarah ini bahkan tak hanya menelusuri Indonesia, tapi juga ke negara Asia lainnya dan bahkan sampai ke Eropa.

Di bidang wisata kuliner, potensinya lebih besar lagi bahkan sudah banyak diakui negara lain. Kekayaan kuliner Indonesia bisa dilihat dari tiap daerah yang hampir semuanya punya makanan khas. Kelebihan utama kuliner adalah keberanian memakai banyak bumbu karena Indonesia punya banyak jenis rempah yang bisa membuat makanan semakin enak dan punya rasa yang khas. Kekayaan bumbu rempah ini jadi potensi wisata kuliner yang sangat besar.

Beragamnya kuliner Nusantara tidak terlepas dari kekayaan rempah yang ada sekaligus terdapat sisi historis dan filosofis. rempah-rempah menjadi kunci dari identitas masakan itu sendiri. Mayoritas masakan di Indonesia memiliki filosofi yang mendalam baik itu ditinjau dari proses memasaknya maupun bahan yang digunakan. Setiap daerah yang berbeda, akan didapati makanan yang berbeda pula, bergantung pada bahan pangan dan rempah yang tumbuh di daerah tersebut. Sekalipun bahan dan proses memasaknya hampir sama, namun kebudayaan setempat memberikan setuhan makna yang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat, kuliner juga menjadi tempat berdialognya lintas budaya sehingga melahirkan identitas multikultural. Tidak sebatas dengan sesama pribumi, perkawinan dengan budaya Eropa, India, Tionghoa, Arab, maupun Melayu lainnya semakin memperkaya cita rasa kuliner Nusantara. Ketersediaan rempah yang ada, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dijadikan ciri khas setiap makanan. Karenanya, kuliner menjadi salah satu elemen kebudayaan suatu bangsa yang mudah dikenali. Untuk mendapatkan pengakuan Jalur Rempah Indonesia sebagai warisan dunia dari UNESCO, diperlukan bukti dan pengakuan dari negara-negara yang disinggahi para pedagang rempah dari kerajaan-kerajaan Nusantara pada zaman dahulu.

Potensi lainnya adalah wisata kebugaran. Ramuan dari rempah bisa digunakan untuk pengobatan dan perawatan tubuh secara alami. Rempah juga bisa dijadikan

minuman jamu atau untuk pijat dan bahkan membuat minyak esensial. Rempah banyak digunakan sebagai bahan utama di berbagai spa dan sauna di Indonesia. Spa wellness di Indonesia berbeda dengan spa negara lain karena bahan alami dari rempah yang sangat khas, seperti jahe, akar tumbuhan, daun pandan dan bunga sedap malam. Indonesia menempati peringkat ke-17 dari aspek wellness tourism market. Kearifan lokal dari kurang lebih 1.340 suku bangsa nusantara, rempah-rempah sebagai bahan baku produk, keragaman seni budaya serta keramahtamahan dan act of services terapis Indonesia dapat berkontribusi dalam pengembangan wellness tourism dunia.

Melalui Program strategis nasional bertajuk rekonstruksi dan revitalisasi jalur rempah nusantara, Untuk program rekonstruksi, jalur rempah nusantara ditargetkan pada tahun 2024 mendatang diakui dan ditetapkan sebagai World Heritage Memory oleh UNESCO. Sementara program revitalisasi lebih diarahkan untuk membangkitkan kembali kejayaan perdagangan rempah tempo dulu, melalui konsep pengembangan destinasi wisata jalur rempah. Dengan mengusung tema *Celebrating the Civilization of Flavors*, memberikan pengalaman pesona budaya Indonesia dengan menyusuri jejak pedagang dunia dan menemukan rempah-rempah, bumbu dan bahan pangan serta menikmati citarasa kuliner nusantara dan mengalami interaksi dengan keberagaman budaya dan alam Indonesia. Rangkaian perjalanan keberagamancitarasa setiap jengkal tempat di Indonesia mempunyai cerita yang berbeda tentang citarasa Sebagai negara kepulauan dengan pulau yang dihuni lebih dari kelompok etnis, membuat Indonesia mempunyai peluang besar untuk menawarkan pengalaman budaya rempah-rempah yang sangat beragam, unik dan otentik yang tidak ditemui di negara-negara lain. Diperkirakan Indonesia mempunyai makanan tradisional yang bisa menjadi modal pengembangan destinasi pariwisata.

Penggunaan rempah cenderung banyak ragamnya. Cenderung asin, asam dan pedas, serta banyak menggunakan santan dipengaruhi tradisi kuliner India, Timur Tengah dan Melayu Penggunaan rempah cenderung moderat ragamnya. Rasa manis, asin, asam dan pedas, serta santan yang berimbang. Dipengaruhi tradisi kuliner India, Timur Tengah, Tiongkok dan Eropa Penggunaan rempah terbatas ragamnya. Cenderung mempertahankan citarasa bahan pangan setempat; pengembangan rasa cenderung asin, asam dan pedas Pengaruh tradisi kuliner asing sangat terbatas keudian dirangkai menjadi *spices heritage trail* suatu jejaring destinasi wisata yang terencana dengan mengkombinasikan keberagaman daya tarik pusaka budaya dan gastronomi setempat untuk menarik wisatawan agar melakukan perjalanan dan mendapatkan pengalaman budaya yang unik dan otentik.

Adapaun usulan destinasi wisata tematik jalur rempah meliputi Banda Aceh, Manado, Palembang, Bangka Belitung, Ternate, Padang, Jakarta, Semarang, Makasar, Kendari, Ambon, Banten, Surabaya, Mataram, Flores. Adapun fokus destinasi meliputi:

1. Banda Aceh;
2. Banten;
3. Jakarta;
4. Semarang;
5. Makasar;
6. Ambon; dan
7. Ternate.

Adapun Rute Tematik Kejayaan Rempah Nusantara meliputi: Aceh, Selat Malaka, Kep.Riau, Palembang, Bangka-Belitung, Ternate, Tidore, Makasar, Banten, Jakarta,, Cirebon, Tuban, Gresik, Surabaya, Lombok, Bima dan Buton.

Sedangkan Rute Tematik Rempah dan Kedatangan Bangsa Eropa meliputi: Ternate, Tidore, Jakarta, Semarang, Makasar, Ambon, Banda, Gresik, Surabaya, Flores Timor.

Dalam kedua skema program strategis nasional ini, tidak ada daerah yang memiliki peluang paling besar selain Aceh. Letak geografis Aceh sebagai pintu gerbang masuk ke kepulauan nusantara dan bersebelahan langsung dengan Selat Malaka. Sejak lama Selat Malaka telah menjadi jalur perdagangan tersibuk dunia, diperkuat dengan kedaulatan politiknya sebagai kerajaan Islam yang cukup disegani, bahkan masuk dalam lima kerajaan Islam terbesar di dunia pada abad pertengahan. Kala itu Aceh diberi posisi istimewa, baik dalam konteks kesejarahan sebagai salah satu penghasil utama rempah dunia, maupun dalam konteks kekinian dengan segala peluang diplomasi ekonomi, politik, dan budayanya.

Dengan fakta-fakta ini, maka tentu sangat berasalan jika Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memasukkan Aceh sebagai salah satu titik atau daerah pengembangan utama dalam 20 titik rekonstruksi dan delapan sebagai pengembangan destinasi jalur rempah nusantara. Ini menjadi peluang besar bagi Aceh untuk berinovasi mengembangkan program strategis jalur rempah di tingkat daerah. Momentum ini harus dimanfaatkan bukan hanya karena latar dan justifikasi sejarah sebagai daerah penghasil rempah. Tapi dalam konteks kekinian, juga karena Aceh masih membudidayakan beberapa komoditas rempah baik dalam bentuk mentah dan bahan baku turunannya mengisi kebutuhan pasar dunia, hingga dapat diproyeksikan sebagai stimulan pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan. Artinya kejayaan sejarah masa lalu sinambung dengan proyeksi ragam manfaat ekonomi dan budaya saat ini. Jadi sebagai modal, Aceh sudah memiliki embrio pengembangan program dengan konsep yang dapat mencakup perspektif masa lalu-kesejarahan, masa sekarang-kekinian, dan masa depan-keberlanjutan, untuk kemudian dikapitalisasi untuk tujuan-tujuan dan manfaat ekonomi dan budaya.

### **III. Kesimpulan dan Saran**

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengusung program strategis nasional bertajuk rekonstruksi dan revitalisasi jalur rempah nusantara, dalam rangka memperkuat posisi diplomasi geopolitik dan geoekonomi Indonesia di kancah global. Jalur rempah nusantara ditargetkan pada tahun 2024 diakui dan ditetapkan sebagai *World Heritage Memory* oleh UNESCO. Untuk mendapatkan pengakuan Jalur Rempah Indonesia sebagai warisan dunia dari UNESCO, diperlukan bukti dan pengakuan dari negara-negara yang disinggahi para pedagang rempah dari kerajaan-kerajaan Nusantara pada zaman dahulu. Melalui Program Wisata Tematik Jalur Rempah diharapkan dapat untuk mendukung dan menyukseskan program strategis nasional rekonstruksi dan revitalisasi jalur rempah nusantara dalam rangka diplomasi budaya ekonomi dunia di kancah internasional. Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan Ekosistem *Indonesia Spices of The World (ISUTW)* sebagai upaya promosikan rempah, kuliner nusantara kepada dunia, upaya ini linier Program Wisata Tematik Jalur Rempah.

Untuk mewujudkan program strategis diatas, Kemenparekraf/ Baparekraf mengajak pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pariwisata untuk berkolaborasi sehingga mampu menaikkan citra pariwisata Indonesia melalui program wisata tematik jalur rempah.

**Terima Kasih**

# Peluang Pengembangan Budidaya Komoditas Rempah di Aceh

**Ir. Cut Huzaimah, MP**  
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh



Perkebunan Aceh  
(1.070.302 Ha)

Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kelapa Dalam, Pala, Lada, Nilam, Cengkeh, Pinang, Kapuk, Jambu Mete, Kemiri, Sagu, Aren, Cassiavera, Gambir, Tembakau, Tebu, Serewangi, dan Jarak

Pertanian Aceh  
(245.657 Ha)

**SBS (Sayuran & Buah2an Semusim) :**

Bwg Mrh, Bwg Pth, Bwg daun, Bayam, Kentang, Kubis, Kembang Kol, Sawi, Wortel, Kcg Pjg, Cabai, Paprika, Jamur, Tomat, Terung, Buncis, Mentimun, Labu Siam, Kangkung, Melon, Semangka, Strawberi

**TBF (Tan. Biofarmaka)**

Jahe, Lengkuas, Kencur, Kunyit, Lempuyak, Temulawak, Temuireng, temukunci, Kapulaga, Mengkudu, Serai Hijau, Jeruk Nipis, Mahkota Dewa, Sambiroto, Lidah Buaya

**Padi**

## Aceh Gerbang Masuk Jalur Rempah

Sejak dulu Aceh terkenal dengan jalur pelayaran dunia, melibatkan aktivitas perdagangan dari berbagai jenis armada kapal asing. Para pelayar dan pedagang tiba dari berbagai penjuru, masuk ke gerbang jalur rempah nusantara. Aceh menyumbang tiga pelabuhan penting dari tiga kerajaan besar Aceh yang masyhur yaitu Mulai dari Kerajaan Lamuri di Aceh Besar, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara dan Kerajaan Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh

Aceh kala itu terkenal dari hasil rempah-rempah berupa pala, cengkeh, dan lada. Beragam komoditi unggulan yang menjadi rebutan para pedagang ditambah dengan lokasi yang sangat strategis



Sejak dulu Aceh terkenal dengan jalur pelayaran dunia, melibatkan aktivitas perdagangan dari berbagai jenis armada kapal asing. Para pelayar dan pedagang tiba dari berbagai penjuru, masuk ke gerbang jalur rempah nusantara. Aceh menyumbang tiga pelabuhan penting dari tiga kerajaan besar Aceh yang masyhur yaitu Mulai dari Kerajaan Lamuri di Aceh Besar, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara dan Kerajaan Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh.

Aceh kala itu terkenal dari hasil rempah-rempah berupa pala, cengkeh, dan lada. Beragam komoditi unggulan yang menjadi rebutan para pedagang ditambah dengan lokasi yang sangat strategis.

## Transportasi Laut dan Udara



### Transportasi Laut dan Udara

Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar.

Pelabuhan Internasional Samudera Pasai, Krueng Geukuh, Aceh Utara.

Pelabuhan Internasional Langsa

Pelabuhan Arun, Lhokseumawe

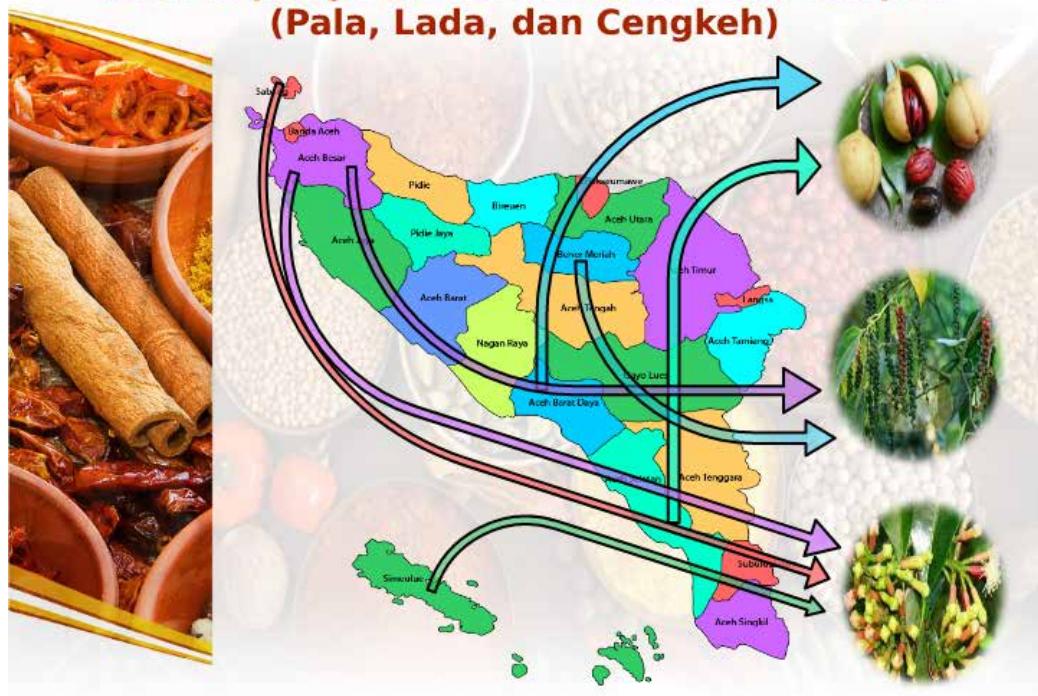
Pelabuhan Internasional Sabang

Pelabuhan Internasional Aceh Tamiang

Pelabuhan Ulèè Lheuë, Banda Aceh.

Pelabuhan Jetty, Meulaboh.  
 Pelabuhan Ferry Labuhan Haji, Aceh Selatan.  
 Pelabuhan Sinabang, Simeulue.  
 Pelabuhan Ferry Singkil, Aceh Singkil.  
 Pelabuhan Ferry Susoh, Aceh Barat Daya.  
 Pelabuhan Teluk Surin, Aceh Barat Daya.  
 BTJ–Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar  
 LSW–Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara  
 MEQ–Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya  
 SNB–Bandar Udara Lasikin, Sinabang  
 SBG–Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang  
 TXE–Bandar Udara Rembele, Bener Meriah  
 SKL–Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri, Singkil  
 TPK–Bandar Udara Teuku Cut Ali, Tapaktuan  
 LSX–Bandar Udara Lhoksukon, Aceh Utara

### **Daerah penghasil utama komoditas rempah (Pala, Lada, dan Cengkeh)**

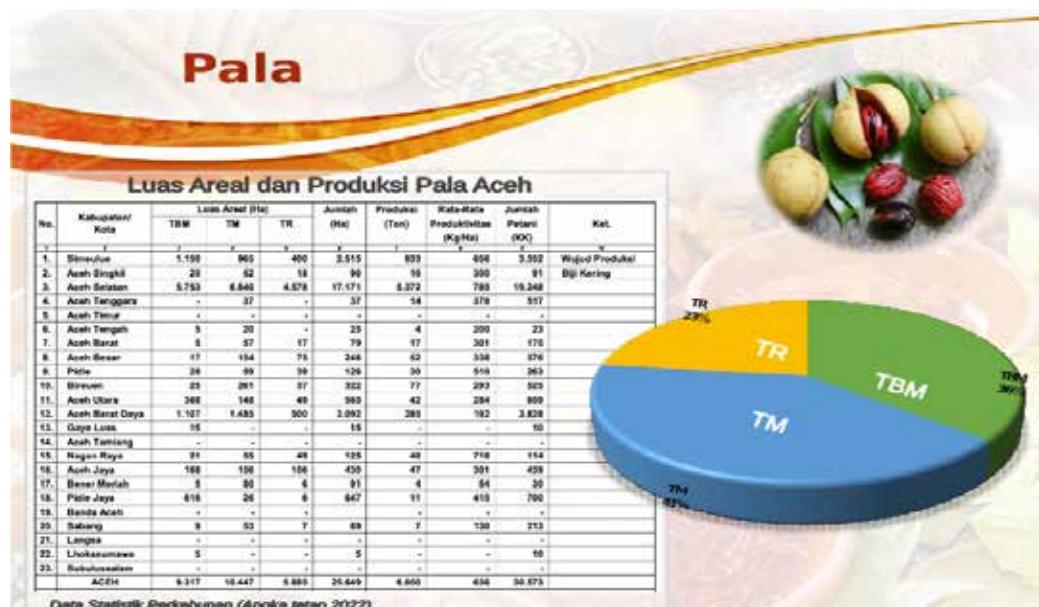


Daerah penghasil utama komoditas rempah

Pala : Kab. Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan

Lada : Kab. Aceh Besar dan Kab. Bener Meriah

Cengkeh : Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, dan Kab. Simeulue



# Cengkeh

Luas Areal dan Produksi Cengkeh Aceh

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Pemasok (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR				
1. Simeulue	7.282	8.880	7.468	18.211	3.738	617	11.037	Wujud Produk
2. Aceh Singkil	60	136	162	298	68	443	239	Bunga Kering
3. Aceh Selatan	168	918	258	1.511	332	546	2.261	
4. Aceh Tenggara	5	21	-	26	6	388	25	
5. Aceh Timur	-	-	-	-	-	-	-	
6. Aceh Tengah	-	-	-	-	-	-	-	
7. Aceh Barat	-	-	-	-	-	-	-	
8. Aceh Besar	2.222	1.801	659	4.478	941	523	6.078	
9. Pidie	1	4	2	14	1	223	44	
10. Bireuen	-	12	2	14	4	353	26	
11. Aceh Utara	-	42	53	95	3	71	110	
12. Aceh Barat Daya	57	70	36	183	23	674	287	
13. Gayo Lues	-	13	-	13	2	231	43	
14. Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	-	
15. Nagan Raya	-	-	-	-	-	-	-	
16. Aceh Jaya	58	91	200	347	48	440	461	
17. Bener Meriah	-	5	-	3	1	160	8	
18. Pidie Jaya	70	19	5	99	6	899	111	
19. Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
20. Sabang	1.448	886	413	3.796	961	739	3.860	
21. Langsa	-	-	-	-	-	-	-	
22. Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	-	
23. Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ACEH</b>	<b>6.268</b>	<b>9.932</b>	<b>9.438</b>	<b>25.629</b>	<b>5.728</b>	<b>399</b>	<b>22.628</b>	

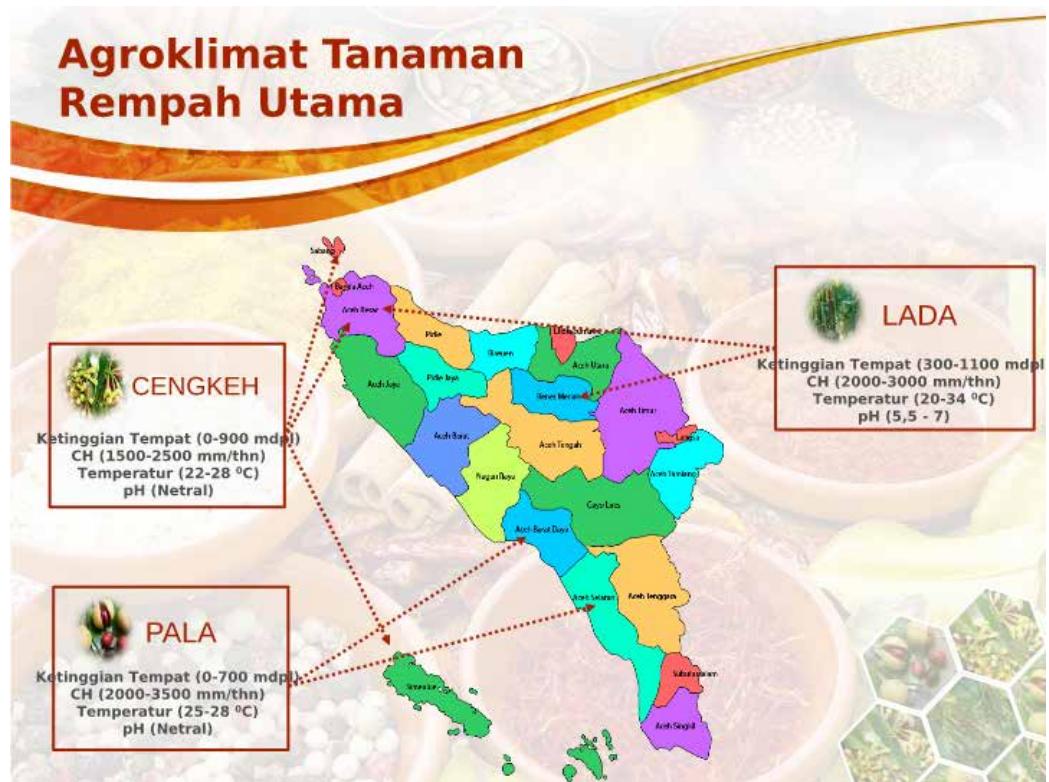
Data Statistik Perkebunan (Angka tetap 2022)



## Luas Panen Komoditas Pertanian Rempah Iainnya

NO	KABUPATEN	Luas Panen (M <sup>2</sup> )							
		Jalve	Kunyit	Kapulaga	Sere Hijau	Jeruk Nipis	Kencur	Bwg Merah	Bwg Putih
1. Simeulue	-	13	15	0	13	31	0	0	0
2. Aceh Singkil	-40.025	10.000	0	16	0	3.507	5	0	0
3. Aceh Selatan	39.921	20.900	0	19.294	1.438	16.875	6	0	0
4. Aceh Tenggara	1.270.780	74.850	0	10.250	0	72.660	1.120.000	0	0
5. Aceh Tamiang	15.000	10.000	0	0	12.487	0	0	0	0
6. Aceh Tengah	18.682	17.199	1.512	306	1.036	9.652	1.956.000	10.000	0
7. Aceh Barat	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
8. Aceh Besar	214.346	156.866	0	74.631	6.737	4.000	370.000	0	0
9. Pidie	29.374	314.800	0	500	124	2	3.841.200	0	0
10. Bireuen	7.000	0	0	0	75	0	50.000	0	0
11. Aceh Utara	74.919	44.923	0	2.369	7.363	14.302	60.000	0	0
12. Aceh Barat Daya	6.837	6.486	0	0	3.861	8.315	0	0	0
13. Gayo Lues	430.281	16.303	0	11.305	0	16.020	3.577.800	0	0
14. Aceh Tamiang	20	7	0	5	10	8	70.000	0	0
15. Nagan Raya	69	276	0	51	0	30	60.000	0	0
16. Aceh Jaya	95	73	0	0	70	0	10.000	0	0
17. Bener Meriah	8.239	2.808	0	3.400	0	12	740.000	0	0
18. Pidie Jaya	200	0	0	184	0	0	210.000	0	0
19. Kota Banda Aceh	-	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Kota Sabang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kota Langsa	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
22. Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kota Subulussalam	5.180	3.925	560	750	200	24.533	0	0	0
<b>NAD</b>	<b>2.161.181</b>	<b>679.431</b>	<b>2.072</b>	<b>123.074</b>	<b>33.432</b>	<b>169.916</b>	<b>12.255.011</b>	<b>10.000</b>	

Data Statistik Pertanian (Angka tetap 2022)

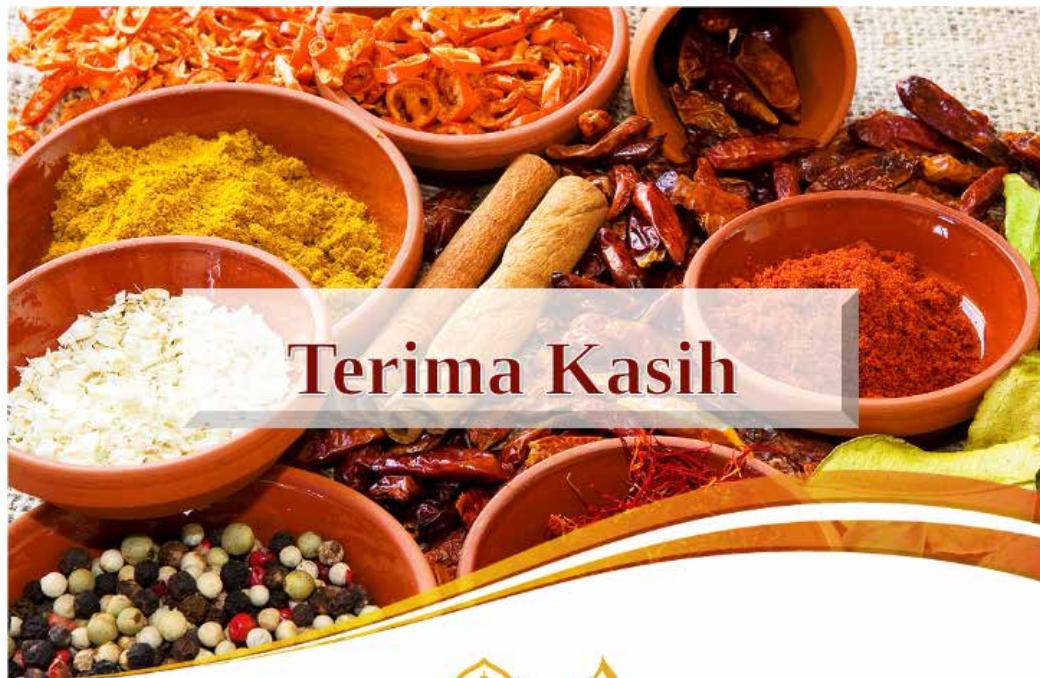


## Simpul Kritis

- ▶ Minat Petani Terhadap Budidaya Komoditas Rempah Menurun
- ▶ Kelembagaan Petani Rempah Masih Lemah
- ▶ Jalur Rempah Belum Maksimal
- ▶ Inovasi Pemanfaatan Lahan Dan Teknologi Budidaya Rempah Masih Lemah

### Simpul Kritis

- Minat Petani Terhadap Budidaya Komoditas Rempah Menurun
- Kelembagaan Petani Rempah Masih Lemah
- Jalur Rempah Belum Maksimal
- Inovasi Pemanfaatan Lahan Dan Teknologi Budidaya Rempah Masih Lemah



# Rempah untuk Dunia: Amalan Perubatan Tradisi dan Potensi Moden

**Assoc. Prof. Dr. Mohd Affendi bin Mohd Shafri, M. Res, Ph.D**

Biomedical Science Department,  
Kulliyah of Allied Health Sciences,  
International Islamic University, Malaysia.  
[affendishafri@iium.edu.my](mailto:affendishafri@iium.edu.my)

## Pendahuluan

Rempah sudah menjadi sangat sebatи dengan sejarah Alam Melayu. Kawasan ini mempunyai kepelbagaiannya rempah-ratus antara yang tertinggi di dunia. Rempah-ratus yang asli berasal dari Asia Tenggara terdiri daripada jenis (1) umbisi seperti halia, kunyit, lengkuas, lempoyang, temu, dan cekur; (2) bijian seperti lada hitam, lada putih, lada ekor, lada pintal, cabai Jawa, dan buah keras; (3) buah seperti asam Jawa, buah keras, asam gelugor, pala, dan pelaga; (4) bunga seperti bunga lawang dan bunga cengkik; (5) kulit kayu seperti kayu manis; (6) daun dan batang seperti serai dan daun kari. Kesemuanya digunakan sebagai rempah masakan dan ramuan ubatan. Selain itu, rempah digunakan di Alam Melayu untuk menjadi bahan asas pewangi, pewarna dan bahan pengawetan. Kegunaan penting rempah ratus ini menyebabkannya mendapat permintaan yang tinggi dari seluruh dunia dengan rangkaian perdagangan dunia yang sangat meluas melalui Laluan Sutera Laut dan Laluan Sutera Darat. Apatah lagi, kebanyakan bahan-bahan rempah boleh dikeringkan menjadikannya tahan lama, ringan, dan sesuai untuk dibawa dalam perjalanan yang jauh.

## Sejarah Rempah Sebagai Bahan Ubatan Dunia

Dioscorides, seorang tokoh perubatan tamadun Greek, adalah antara orang yang terawal mencatatkan tentang penggunaan bahan-bahan rempah sebagai bahan ubatan. Dalam tahun 1M, Dioscorides menulis buku perubatannya yang termasyhur, *De Materia Medica (Bahan-bahan Ubatan)*, setebal 5 jilid. Kebanyakan bahan ubatan yang dicatatkannya berasal dari Timur Tengah/Mediterranean tetapi terdapat segelintir bahan-bahan rempah yang dimasukkannya ke dalam buku ini antaranya pala, lada berekor (kemukus), lengkuas dan asam Jawa. Ini bermakna bahan-bahan

rempah tentu telah sampai diperdagangkan ke tamadun Greek lebih lama sebelum sebelum penulisan Dioscorides dilakukan.

Penggunaan rempah sebagai bahan ubatan dunia juga boleh dilihat di pelbagai muzium perubatan lama di merata tempat di dunia. Muzium Farmasi Sopron di Hungary, yang mengekalkan keadaan muzium tersebut seperti mana keadaannya semasa menjadi sebuah farmasi di abad ke-16, mempamerkan bahan-bahan rempah seperti asam Jawa, cengkih, pelaga dan bunga lawang bersama-sama bahan ubatan Asia Tenggara yang lain seperti kapur barus dan gaharu di dalam bekas-bekas seramik di raknya. Begitu juga di Muzium Kebangsaan tentang Sejarah Perubatan Iran di Tehran, dan Muzium Perubatan di Khiva, Uzbekistan.

Jika kedatangan pelbagai bangsa terdahulu ke Alam Melayu seperti India, Cina dan Arab adalah untuk membuat hubungan secara damai dan berdagang, kedatangan penjajah ke Alam Melayu pula telah didorong oleh kemahuan untuk merebut seterusnya memonopoli perdagangan rempah. Afonso d'Albuquerque, Laksamana Portugis yang menakluki Melaka, menyatakan dengan jelas dalam catatannya, bahawa:

"...jika kita dapat mengambil Melaka dari tangan orang-orang Islam maka Mesir dan Mekkah akan binasa, dan Venice tidak akan dapat membeli rempah lagi selain apa yang ada di Portugal." (Albuquerque).

Pada zaman penjajahan, harga rempah-ratus Alam Melayu begitu mahal apabila dijual di pasaran Eropah, mencapai berkali ganda lebih tinggi daripada apa yang dibayar kepada para pedagang tempatan. Selain Portugis, Sepanyol, Belanda, Inggeris, bahkan Perancis dan Amerika juga pernah cuba untuk menguasai pasaran rempah di sini. Bandar Salem di Massachusetts, Amerika Syarikat, sebagai contoh pernah menjadi kaya setelah dapat menjalinkan hubungan dengan pelabuhan Kuala Batu di Aceh, mengangut lada hitam selama hampir 50 tahun (antara tahun 1799-1846M) (Duncan, 1949). Bandaraya New York sendiri, asalnya merupakan sebuah penempatan kecil yang dikuasai Belanda yang ditukar dengan Pulan Run, yang ketika itu kepunyaan Inggeris. Pertukaran telah dibuat pada tahun 1667 melalui perjanjian Breda kerana Belanda mahukan monopoli ke atas perdagangan pala di Maluku (Loth, 1995).

## **Senyawa Bermanfaat Dalam Rempah**

Terdapat banyak senyawa atau bahan aktif di dalam rempah yang menyebabkan bahan-bahan ini mempunyai khasiat perubatan. Senyawa-senyawa ini dipaparkan dalam Jadual 1.

Jadual 1. Rempah-rempah dan senyawa terpilih.

Rempah	Senyawa
1. Cengkih	Eugenol
2. Pala	Myristicin, eugenol
3. Kayu manis	Cinnamaldehyde, coumarin
4. Halia	Gingerol, shogaol
5. Kunyit	Curcumin
6. Lada putih, lada hitam	Piperine

Senyawa-senyawa inilah yang menghasilkan kesan-kesan umum daripada rempah seperti:

1. Karminatif – mengeluarkan gas.
2. Ekspektoran – melancarkan kahak.
3. Analgesik – meredakan kesakitan pain.
4. Antispasmodik – melenyapkan kejang urat dan otot.
5. Astringen – mengecutkan dan mengurangkan rembesan.
6. Antibiotik – membunuh kuman.

## Data Rempah dalam Manuskip Perubatan Alam Melayu

Kemasyhuran rempah sebagai bahan-bahan ubatan dunia sudah semestinya merupakan hasil daripada proses pemindahan pengetahuan daripada penduduk Alam Melayu yang terlebih memahami kaedah dan kegunaan bahan-bahan rempah ini untuk merawat pelbagai penyakit. Pengetahuan penduduk peribumi Asia Tenggara ini masih terakam dalam tradisi lisan, begitu juga dalam banyak manuskrip-manuskrip perubatan yang ditulis oleh generasi terdahulu. Data daripada manuskrip-manuskrip di ambil dari pelbagai tempat dan tujuan sebagai bukti bahawa penggunaan rempah sebagai bahan ubatan telah tersebar di segenap pelosok Alam Melayu untuk pelbagai jenis penyakit. Di dalam manuskrip juga dapat dilihat bahawa ubatan Melayu yang menggunakan rempah ini merupakan ramuan beberapa bahan dan adakalanya diadun bersama-sama rempah luar, seperti ketumbar dan jintan hitam, atau bahan tempatan bukan rempah seperti bunga atau akar kayu.

### 1. Manuskip perubatan dari Aceh

Di dalam manuskrip Bustan al-Salatin karangan Shaykh Nur al-Din a-Raniri (Mohd Shafri & Hermansyah, 2022) iaitu merupakan salah sebuah manuskrip perubatan berbahasa Melayu yang paling tua, beberapa bahan rempah disebut. Salah satunya ialah berkenaan qaranful. *Qaranful* ini dikenali di bahagian lain Alam Melayu sebagai bunga

cengkik (*Szygium aromaticum*) tetapi jika di Aceh, *Szygium aromaticum* dipanggil bunga lawang. Sebaliknya, bahan yang dikenali sebagai bunga lawang di Alam Melayu merujuk kepada *Illicium verum*. Di dalam Bustan al-Salatin, tertulis tentang *qaranful* ini:

"*Qaranful* iaitu bunga lawang. Adalah ia hangat kering pada darjah yang ketiga dan ia memberi quwwat otak kepala yang sejuk dan menambah ingat dan hafaz. Dan membaik suara dan memberi quwwat segala anggota yang indah seperti hati dan jantung dan paweu dan mata dan dhakar dan limpa. Dan adalah airnya yang ditiris itu memberi quwwat lebih daripada arak yang haram. Dan adalah mengerjakan dia bahawa ambil sebahagian bunga lawang dan setengah bahagi sirih dan sebahagi daun mawar dan dipipis sekaliannya dengan air mawar. Kemudian maka atas api diambil perlahan-lahan, dan adalah air ini memberi quwwat segala anggota *zāhir* dan *bātin* dan menghilangkan penyakit daripada segala racun. Dan jika dikehendaki bahawa jadi air ini lalu baik kepada segala yang demikian yang dikehendaki."

Satu lagi bahan rempah yang ditulis di dalam Bustan al-Salatin ialah pala (*Myristica fragrans*). Terdapat dua bahagian pada pala yang digunakan iaitu buah pala, iaitu biji buahnya, dan bunga pala, iaitu lapisan luar berwarna merah yang menyaluti bijinya. Kedua-dua bahan ini disebut secara berasingan di dalam Bustan al-Salatin:

"Dan *jawz* iaitu buah pala, khāsiyatnya hangat lagi kering pada darjah yang ketiga, menghilangkan panau hitam dan menghilangkan busuk bau mulut dan memberi quwwat akan mata."

"Dan *basbāsah* iaitu bunga pala, khāsiyatnya hangat lagi kering pada darjah yang ketiga, fā'idahnya memberi quwwat akan paru dan menghilangkan segala lendir yang dalam perut dan memberi fā'idah akan hati dan lemak/limpa yang sejuk."

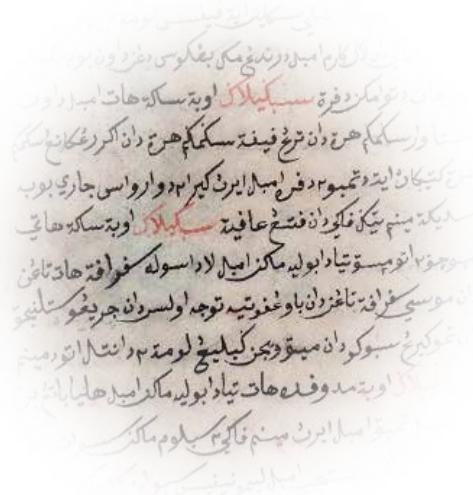


Gambar 1. Bustan al-Salatin, dari koleksi Dayah Tanoh Abee, Aceh.

## 2. Manuskip perubatan dari Patani/Kelantan.

Patani mengeluarkan banyak manuskip-manuskip perubatan berbahasa Melayu. Salah sebuah manuskip tersebut ialah MSS2219 yang kini berada di Perpustakaan Negara Malaysia. Antara rawatan berasaskan rempah di dalam manuskip ini ialah rawatan untuk sakit hati (boleh jadi hepatitis). Terdapat berbelas-belas ramuan yang menggunakan rempah untuk penyakit itu, salah satunya seperti yang diberikan berikut:

"Sebagailagi ubat sakit hati menyucuk-nyucuk atau menyesak tiada boleh makan, maka ambil lada sulah seperapat hati tangan, dan mesui seperapat tangan, dan bawang putih tujuh ulas, dan jeringau setelunjuk, dan temu giring sebuku, dan minyak bijan. Giling lumat-lumat, dan ditelan atau diminum."

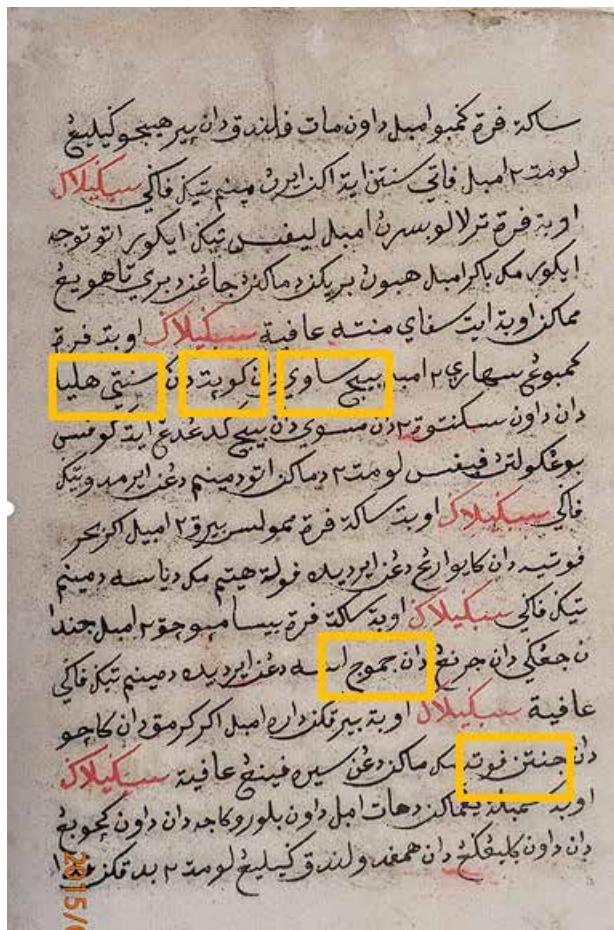


**Gambar 2. MSS2219 dari Patani memaparkan ubatan untuk penyakit hati.**

Dalam sebuah lagi manuskip yang lain iaitu MSS1292 (Mat Piah & Mustapha, 2019), berpuluhan-puluhan ramuan berasaskan rempah diberikan pula untuk sakit gastrointestinal. Salah satunya merupakan contoh yang baik untuk menunjukkan bahawa tabib Melayu dahulu berkemahiran untuk menginovasi, dan memiliki daya ta'akul dan daya kreatif yang tinggi, apabila meramu ubatan yang mengadunkan rempah tempatan dengan rempah luar bersama-sama bahan bukan rempah:

"Sebagailagi ubat perut kembung sehari-hari, ambil biji sawi dan kunyit dan sunti halia dan daun sekentut-kentut dan mesui. Dan biji kedondong itu kupas buangkan kulitnya, dipisah lumat-lumat, dimakan atau diminum dengan air madu tiga pagi."

"Sebagailagi ubat sakit perut bisa menyucuk-nyucuk. Ambil cendana janggi, dan jerenang, dan jemuju. Asah dengan air didih. Diminum tiga pagi."



**Gambar 3. MSS1292 dari Patani dengan rawatan untuk sakit perut.**

### **3. Manuskrip perubatan dari Terengganu**

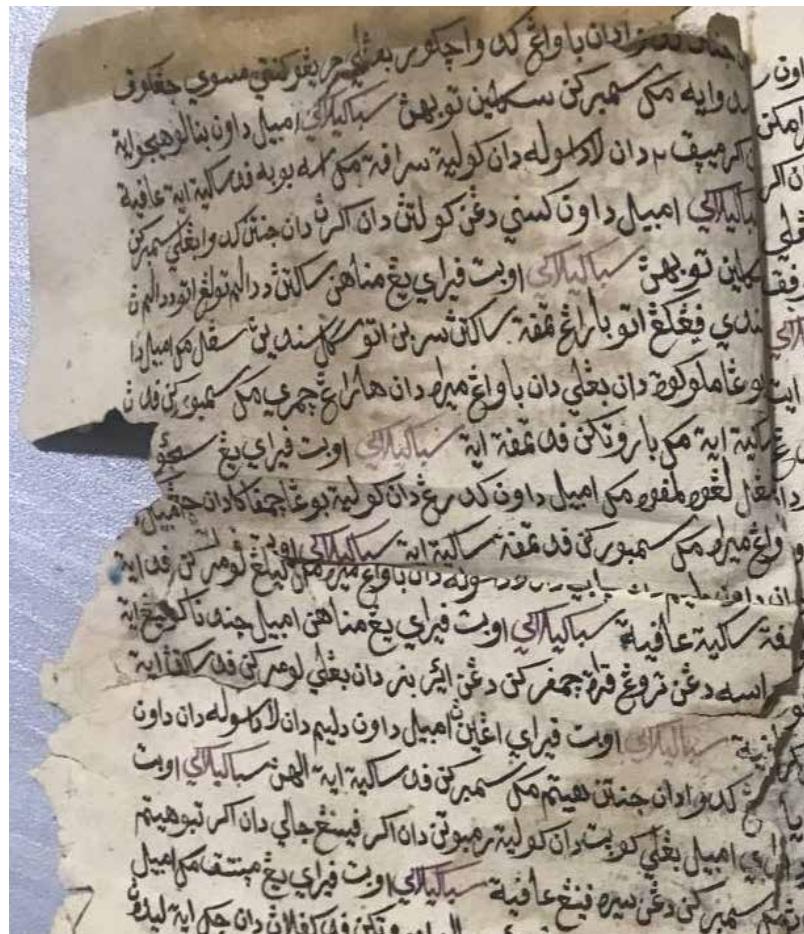
Sebuah manuskrip perubatan Melayu Terengganu pula menampilkan beberapa ramuan berasaskan rempah untuk penyakit seperti pirai iaitu gout. Rempah yang paling banyak dipakai ialah lada hitam, lada putih dan lada sulah, manakala dalam beberapa ramuan ditambah dengan rempah lain seperti buah kemiri (buah keras), dan cengkik. Menurut manuskrip ini, rawatan untuk penyakit ini termasuklah:

"Sebagailagi ubat pirai yang menahun sakitnya di dalam tulang atau di dalam sendi, pinggang atau barang tempat sakitnya atau segala sendinya sengal. Maka ambil daun bunga melukut dan bonglai dan bawang merah dan arang kemiri, maka

semburkan padanya sakit itu maka barutkan pada tempat itu."

"Sebagailagi ambil daun benalu hijau itu dan akar minyak-minyak dan lada sulah dan kulit serapat maka asah bubuh pada sakit itu, 'afiat."

"Sebagailagi ambil daun kesinai dengan kulitnya dan akarnya dan jintan kedua (putih dan hitam), bonglai. Semburkan sekalian tubuhnya."



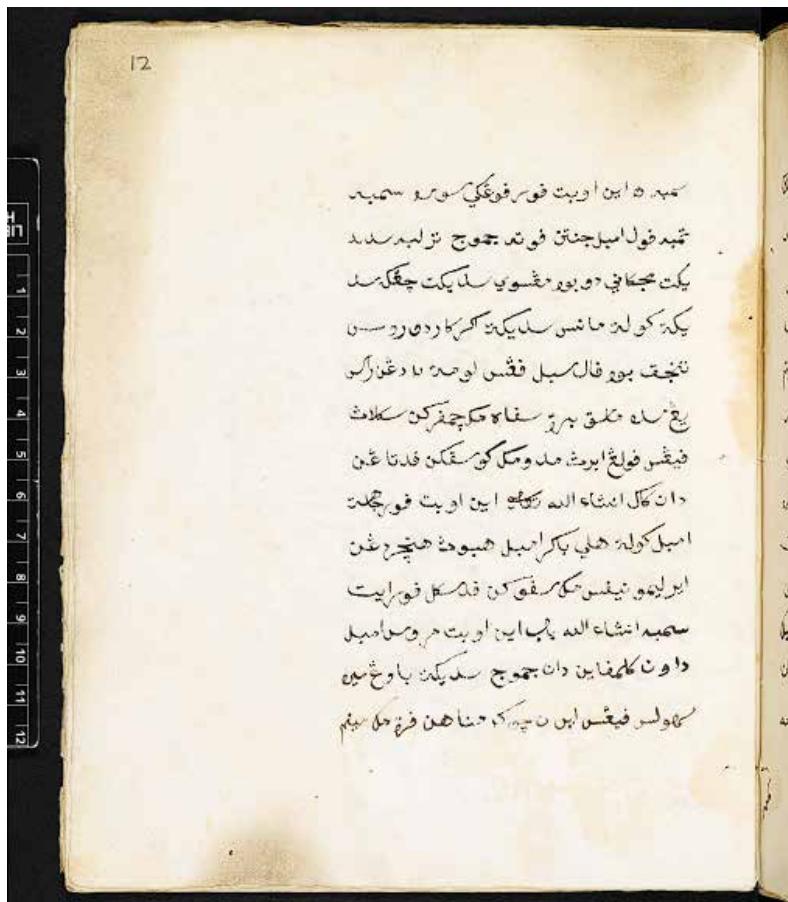
**Gambar 4. Sebuah manuskrip perubatan Melayu Terengganu.**

#### 4. Manuskrip perubatan dari Pontianak

Sebuah manuskrip MS B 15 dari Pontianak, Kalimantan (Mohd Shafri, 2019) merupakan manuskrip perubatan yang tertua dari Kalimantan kerana ditulis pada selewatnya tahun 1813M. Manuskrip ini juga mengandungi bahan-bahan rawatan yang menggunakan rempah-ratus seperti rawatan penyakit kulit iaitu puru. Puru pernah menjadi masalah besar kepada penduduk Alam Melayu. Ia mengakibatkan

luka-luka diseluruh tubuh yang sukar untuk diubati. Manuskrip ini mencadangkan rawatan berikut untuk penyakit puru:

"Ini ubat puru Peringga susah sembah, tumbuh pula. Ambil jintan putih, jemuju terlebih sedikit, majakani dua buah, mesui sedikit, cengkik sedikit, kulit manis sedikit, akar kara, tanjak buah pala. Sila pipis lumat-lumat dengan rasa yang sudah masak berat sepha. Maka campurkan segalanya. Pipis pulang. Airnya madu. Maka gosokkan pada tangan dan kaki, insha-Allah ta'ala."



**Gambar 5: Manuskrip B 15 yang ditulis oleh tabib diraja Kesultanan Pontianak memaparkan penggunaan rempah untuk penyakit kulit.**

### Penggunaan Rempah Sebagai Ubatan Masa Kini

Kewujudan industri farmaseutikal moden hari ini menyaksikan bahan-bahan rempah tidak lagi digunakan secara terus sebagai bahan-bahan ubatan. Sebaliknya, bahan-bahan rempah dikaji untuk diketahui senyawa aktif yang terkandung dalam

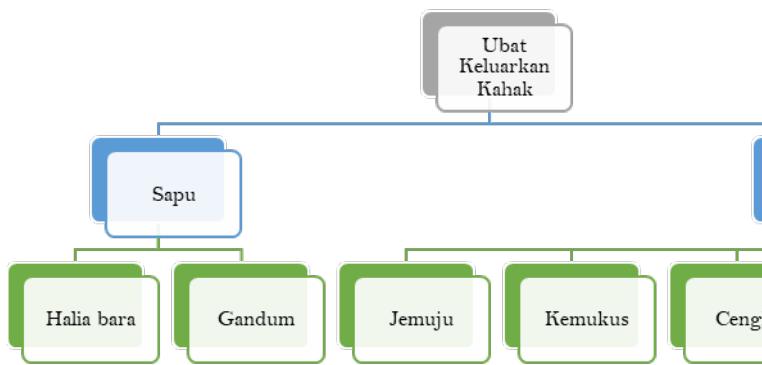
setiap rempah itu untuk disintesis secara makmal dan dilakukan proses famakognosi untuk mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan rawatan. Meskipun demikian, cara guna tradisional yang mencampuradukkan atau meramukan bahan-bahan rempah bersama bahan-bahan lain sebagai sebuah ramuan masih harus di kaji kerana kepelbagaiannya struktur biologi yang terwujud secara alami melangkaui tahap imaginasi para saintis dan kemampuan sintesis di makmal.

Pengalaman menunjukkan bahawa kajian terhadap amalan perubatan tradisional, termasuk data daripada manuskrip-manuskrip lama, boleh menghasilkan rawatan yang berkesan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Nobel Prize untuk Perubatan telah diberikan kepada seorang saintis wanita dari China, Youyou Tu, yang mengkaji manuskrip kuno tamadun Cina pada tahun 1960-an. Hasil daripada kajian tersebut, beliau telah berjaya menemui ubatan baharu, Artemisinin, yang menyelamatkan banyak nyawa dari kematian akibat malaria. Perkara ini menyebabkan agensi kesihatan seperti World Health Organisation (WHO) menggerakkan polisi perubatan integratif di mana amalan perubatan moden dan tradisi kedua-duanya dinilai berdasarkan keberkesanan dan keselamatan rawatan yang dilakukan.

Di Malaysia, sebagai contoh, Kertas Biru Bagi Perubatan Tradisional dan Komplementari telah dilancarkan mulai tahun 2019 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Melalui Kertas Biru ini, Malaysia menetapkan garis panduan untuk membina sebuah kebanggaan nasional yang baharu berdasarkan amalan tradisional tempatan, mencipta peluang ekonomi bernilai lebih 1 billion pada tahun 2027, ubatan tradisi yang selamat dan berguna, serta perlindungan daripada eksploitasi pelanun biologi.

Ketika berlakunya wabak Covid-19, data-data manuskrip menunjukkan ada ramuan-ramuan tradisi yang mungkin boleh digunakan untuk dibangunkan sebagai rawatan terhadap Covid-19. Dalam sebuah manuskrip perubatan Johor, salah satu catatan menampilkan simptom-simptom yang sangat mirip kepada Covid-19:

"Fasal ini ubat balgham yang panas dan kering maka batuk sebab sesak sangatlah tiada keluar balgham kerana pendek nafas naik dan turun dan tiada dapat tidur melainkan meniarap duduk dahinya pun pada bantal diletakkannya. Maka adalah sedap sedikit kerana berbetulan dengan nafasnya naik dan turun. Dan sangatlah lelah rasanya kerana paru-paru itu tempat nafas. Apabila tempat melemak kepada paru-paru bersarang-sarang itulah maka tiada habis nafas itu keluarnya dan naik turun nafas itu maka menjadi lelah mereka itu."

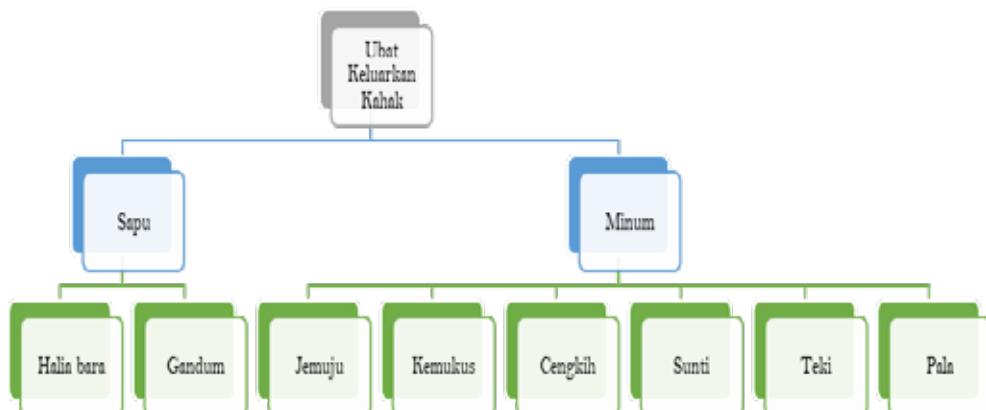


**Gambar 6. Salinan sebuah manuskrip di Johor menunjukkan catatan sebuah penyakit yang mirip Covid-19 dan rawatan-rawatan yang sesuai.**

Menurut manuskrip ini, terdapat rawatan yang menggunakan rempah yang boleh diberikan sebagai satu ubatan jenis sapu dan satu rawatan jenis minum sebagai rawatan:

"Adapun akan ubatnya ambil gandum dan halia bara maka giling keduanya. Maka tampalkan keduanya dan kepada hulu hatinya nescaya afi'at olehnya."

"Bab ini ubat balgham, adapun yang diminumkan itu ambil buah teki dan sunti dan cengkikh dan jemuju dan buah pala dan kemukus maka sekalian itu giling lumat-lumat maka hancurkan dengan air, maka minumkan supaya hilang lendir itu supaya keluar nafasnya itu."





**Gambar 7. Rempah-rempah merupakan bahan-bahan asas dan utama dalam ramuan dari satu salinan manuskrip perubatan Melayu di Johor yang mungkin berguna untuk merawat simptom-simptom Covid-19.**

## Penutup

Rempah merupakan kebanggan warisan di Alam Melayu yang mempunyai pelbagai kegunaan terutamanya sebagai bahan ubatan. Kepentingan rempah menjadikannya komoditi perdagangan yang dicari-cari oleh para pedagang dari seluruh pelosok dunia. Sesuatu yang belum begitu diamati ialah bagaimana rempah-rempah Alam Melayu juga telah mempengaruhi tradisi-tradisi perubatan lain seperti perubatan Eropah, Timur Tengah, Asia Barat dan Cina. Kajian juga belum begitu meluas terhadap manuskrip-manuskrip perubatan Melayu yang berjumlah ratusan jilid yang mengandungi pelbagai ramuan rawatan. Sekiranya rawatan yang berkesan dapat dibangunkan daripada pengetahuan tradisi Alam Melayu ia mungkin sekali lagi akan mengangkat Alam Melayu ke hadapan sebagaimana ia pernah terjadi suatu masa dahulu.

## Rujukan

- Albuquerque, A. (2010). *The commentaries of the Great Afonso Dalboquerque, second viceroy of India*, Translated from the Portuguese edition of 1774 Volume 3. The Hakluyt Society: London. [Dilihat pada 3 Oktober 2023 di <http://www.sabrizain.org/malaya/library/albuquerque3.pdf>]
- Loth, V.C. (1995). Armed Incidents and Unpaid Bills: Anglo-Dutch Rivalry in the Banda Islands in the Seventeenth Century. *Modern Asian Studies*, 29(4): 705–740.
- Mat Piah, H. & Mustapha, N.M. (2019). *Kitab Tib MSS1292 PNM*, Institut Penyelidikan Perhutanan: Kuala Lumpur.
- Mohd Shafri, M.A. & Hermansyah. (2022). *Kitab Perubatan Melayu: Kebun Raja-raja (Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri)*, Akademi Jawi Malaysia: Kuala Lumpur.
- Mohd Shafri, M.A. (2019). *Kitab Perubatan Melayu: Sari Segala Ubat (MS B 15 Tabib Diraja Kesultanan Pontianak)*, Akademi Jawi Malaysia: Kuala Lumpur.
- Duncan, P.J. (1949). *Pepper and Pirates: Adventures in the Sumatra Pepper Trade of Salem*. Boston: Houghton Mifflin, 1949.

# Gastrodiplomacy Interlisasi Kuliner Nusantara

**William Wongso**

Pemerhati Kuliner Indonesia

Pertanyaan yang terus menggema dalam benak banyak orang, termasuk saya, yang mana sesungguhnya kuliner Indonesia? Apakah rendang, nasi goreng, bistik, seblak, gado-gado, soto gragot, atau coto makassar? Sudah pasti pertanyaan ini tidak serta merta bisa dijawab secara baik. Pertama, nama negara Indonesia adalah sebuah keputusan politik yang setidaknya digaungkan sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 silam. Sebagai keputusan politik sebelum kemerdekaan di pekkikan Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945, 17 tahun setelah Sumpah Pemuda, kata "Indonesia" mengandung persamaan nasib dan persatuan. Kedua, secara geopolitik, Indonesia dibentuk oleh kesatuan-kesatuan "daerah",

Oleh sebab itu, secara identik kita bisa menjawab mana masakan Indonesia, ya, tak lain dan tak bukan dari masakan daerah seperti rendang, gado-gado, dan soto itu. Persoalan yang justru menjadi krusial bagaimana mengupayakan persilangan "lidah" di antara keragaman suku .

Sampai hari ini, harus diakui bahwa banyak orang Indonesia dari Jawa, misalnya, tidak begitu menyukai makanan Bali yang pedas dan asin. Banyak orang Minang, yang tidak menyukai makanan Jawa yang manis dan kalem. Banyak orang dari Indonesia timur, lebih menyukai *chinese food*, ketimbang masakan daerahnya sendiri. Realitas ini masih terus bisa diperpanjang daftarnya. Sesungguhnya fakta ini tak berhenti sebatas selera, tetapi menyangkut pada sisi-sisi yang terlupakan kita bahas selama puluhan tahun, yakni tentang persilangan lidah untuk mencapai kesepahaman dalam politik makanan.

setelah melakukan banyak perjalanan, menyusup ke banyak daerah dan kemudian membandingkannya dengan makanan-makanan di luar negeri, saya mulai paham, bahwa kita harus menempuh jalan pintas untuk "mempersatukan" selera Nusantara. Jalan pintas itu, tak lain membentuk apa yang saya sebut dengan Pusat Kuliner Nasional.

Institusi ini mengemban tugas-tugas strategis seperti:

1. Pusat informasi tentang keragaman kuliner Indonesia;
2. Pusat studi tentang kekayaan kuliner Indonesia;
3. Dapur pertukaran kuliner antar daerah di Indonesia;
4. Pusat riset pemetaan kuliner, keragaman rempah dan bumbu-bumbu Nusantara;
5. Etalase promosi kekayaan kuliner Indonesia.

Sebagai pusat informasi keragaman kuliner, institusi ini menjawab begitu banyak pertanyaan pecinta, peneliti, pengkaji kuliner dari bangsa lain dari luar Indonesia. Suatu hari chef kelas dunia Gordon Ramsay bertanya kepada saya:

"William, saya punya slot untuk singgah di Indonesia dalam perjalanan dari Australia menuju India, apa makanan Indonesia yang kamu rekomendasikan?" katanya.

Tanpa pikir panjang saya jawab,"Rendang dari Minang!"

Dengan pertimbangan, tidak ada yg tidak kenal dan menyukai RENDANG dan masakan MINANG di seluruh Indonesia...agar nanti setelah tayang terjadi Nasional-Bonding



William Wongso dan Gordon Ramsay, Ngurai Sianok – Bukit Tinggi – Sumatra Barat

Shooting Uncharted session 2 - Januari 2020

Chef Gordon Ramsay selain acaranya yang bertajuk "MasterChef" atau "Hell's Kitchen" atau juga "Kitchen Nightmares", yang terkenal, Gordon adalah chef yang dianugerahi 17 bintang Michelin. Anugerah itu adalah anugerah tertinggi dalam dunia kuliner dan restoran dalam acara "Gordon Ramsay: Uncharted season 2", yang telah ditayangkan channel National Geographic pada 29 Juni 2020 lalu, dan sudah ditonton lebih dari 150 juta pemirsa seluruh dunia. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari sini? Yaitu pengenalan bumbu dan rempah Indonesia keberbagai penjuru dunia secara tidak langsung atau dengan Bahasa kerennya " Budaya Kuliner Indonesia hrs juga berani tampil secara elite agar menjadi bagian dr kancalah perhelatan budaya kuliner dunia dan masuk dalam **World Culinary Map**" maka semua mata dunia tertuju ke Indonesia pada waktu itu.



Working lunch Presiden RI dengan Pemilik perusahaan terpilih Korea,  
Busan 25 November 2019 – Korea Selatan

Publikasi yang meluas semacam ini, sayangnya tidak diikuti oleh kebijakan di dalam negeri. Rendang seharusnya telah memainkan peran penting sebagai sebagai *agent of cultural Indonesia* dalam berbagai perhelatan kelas dunia. Sayangnya, di dalam negeri sendiri rendang tetap saja kita kenal sebagai bagian "kecil" dari

beragamnya masakan Minang. Kita masih suka mengecap aneh, jika menemukan orang Jawa, orang Makassar, atau orang Tionghoa, menyajikan masakan Minang untuk restorannya.

Perasaan aneh itu sesungguhnya bermula dari minimnya pertukaran kebudayaan kuliner di Indonesia. Saya berharap dalam Pusat Kuliner Indonesia pertukaran kuliner antar-daerah di Indonesia, menjadi awal dari pertukaran kebudayaan, yang saya katakan dalam terminologi lebih spesifik, persilangan lidah antar bangsa. Peneliti dan penulis Denys Lombard (2005), punya istilah yang tepat, yakni *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Dalam buku bertajuk lengkap *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-batas Pembaratan* itu, Denys membuktikan premisnya tentang Jawa yang akulturatif. Pulau Jawa adalah gugusan kebudayaan yang diramu dari tradisi Hinduisme, Islam, Barat, dan China.

Bukankah dalam kuliner kita menemukan jenis-jenis makanan seperti lumpia, bakso, selat Solo, bakpia, pai susu, nasi kebuli, martabak telur, pempek, nasi megono, mie Jawa, dan rendang. Penelitian Poston dan Wong dalam buku *The Chinese Diaspora: The Current Distribution of the Overseas Chinese* (2016) menyebutkan makanan-makanan di atas merupakan akulterasi antara budaya asra dengan China dan India. Bahkan rendang, yang kita asra berasal dari asra kebudayaan asli Minang, tidak lepas dari pengaruh kuliner India, terutama dari daerah Gujarat yang membawa rempah-rempah lewat Aceh dan akhirnya menyebar ke seluruh Pulau Sumatera.

Dalam Pusat Kuliner Indonesia, kita juga bisa menggerakkan riset untuk kemudian membuat mitigasi tentang persebaran makanan di Nusantara. Dari situ kita dapat menjawab pertanyaan: apakah bedanya rempah-rempah dengan bumbu?

Banyak orang keliru beranggapan bahwa semua bumbu yang dipergunakan dalam masakan Nusantara termasuk dalam jenis rempah-rempah. Hal yang aneh dan menarik untuk terus dikaji dalam bingkai kebudayaan Nusantara, daerah-daerah jalur rempah seperti Maluku Utara dan Kepulauan Banda, hampir-hampir tidak menggunakan rempah dalam masakan mereka.

Bumbu masakan mereka tak lebih tak kurang dari bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk, serai, jahe, lemon cui dan garam. Sangat jarang memasukkan cengkeh, lada, atau kayu manis sebagai bagian dari bumbu masakan sehari-hari mereka? ada apa?

Dalam lembaga seperti Pusat Kuliner Indonesia, yang tentu masih berupa usulan ini, "keanehan-keanehan" semacam ini bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena bersandar pada penelitian dan kajian yang bisa dipertanggung-jawabkan. Secara pribadi saya bisa saja melontarkan hipotesis, bahwa rempah-rempah di wilayah

Maluku Utara dan Kepulauan Banda sejak abad ke-16 telah dikuasai bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oleh karena itu rempah-rempah adalah harta paling berharga di masa itu, maka tidak ada sedikitpun yang menetes kepada rakyat terjajah di wilayah Ternate dan Tidore, misalnya. Seluruh rempah dikuasai para pedagang Eropa yang kemudian menjadi kaum kolonialis. Maka, rakyat jelata hanya memiliki bawang, cabai, sereh, daun jeruk dan garam, mungkin juga santan, dan itulah yang kini menjadi dominan dalam wilayah perbumbuan di Nusantara. Tidak semua masakan Nusantara menggunakan santan.

Namun, sekali lagi apa yang saya katakan ini sebatas hipotesis yang harus diuji kebenarannya lewat riset dan kajian ilmiah. Mungkin sekali sudah ada, tetapi hanya sedikit yang terpublikasikan secara menyeluruh. Bisa juga karena tidak secara spesifik diarahkan untuk meneliti kenapa orang Maluku tidak menggunakan rempah-rempah dalam masakan mereka, seperti yang terjadi di Aceh atau di wilayah lain dari Pulau Sumatera.

Lewat pusat-pusat kebudayaan Nusantara , bisa menjadikan kuliner sebagai gastropipolomi yang langsung menyentuh pada perasaan-perasaan terhalus dan sensasional dari lidah dunia. Saya optimistis, kitab isa "menaklukkan" lidah dunia melalui keragaman kuliner di negara kita. Tentu saja dalam strategi yang berbeda dengan negara-negara yang memiliki diaspora seperti China, Vietnam, dan Thailand. Sebagai bangsa dengan diaspora yang tersebar di berbagai penjuru dunia, Thailand memiliki sekitar 1.000 restoran di Sydney, Australia. Di setiap sudut kota ini, ada restoran Jepang dan Vietnam. Cherry Ripe, seorang *food critic* dan *food writer* yang disegani di Australia, pernah menerbitkan artikel berjudul "Asianisation of Australians Palate" (1993). Ia tulis, melihat keragaman etnis di Australia, terdapat 60 etnis migran, tidak lama lagi negara ini akan dilumuri oleh masakan-masakan Asia. Makanan Australia yang berbasis pada keju dan lain-lain seperti makanan Eropa, benar-benar tergusur oleh makanan Asia. Pertanyaannya, di manakah makanan Indonesia?

Sebenarnya di seluruh Australia ada sekitar 150 rumah Indonesia. Sementara di seluruh dunia, setidaknya tercatat sekitar 1.500 rumah makan, yang terus merosot karena Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Jumlah ini jauh lebih kecil dari restoran Thailand yang berjumlah sekitar 25.000 dan Vietnam mencapai 7.730 di seluruh Amerika, mungkin juga jumlahnya mencapai puluhan ribu di seluruh dunia. Jangan berkecil hati, restoran Vietnam menyebar seiring dengan persebaran *boat people*, yang membawa orang-orang Vietnam ke seluruh penjuru dunia. Mereka inilah yang kemudian membentuk diaspora-diaspora orang Vietnam di seluruh dunia dan memperkenalkan budaya mereka khususnya.

Kita bisa menempuh strategi berbeda untuk menancapkan makanan Indonesia pada lidah dunia. Secara "partikelir" orang-orang Indonesia telah memperkenalkan masakan Indonesia kepada dunia dengan cara yang terukur dan selektif.

Pasca Pandemi Covid-19, saya merancang penyajian nasi bungkus di restoran Garam Merica di Melbourne, Australia. Restoran ini sudah buka tahun 2006 dengan memperkenalkan lebih dari 15 jenis lauk-pauk Indonesia. Sesudah pandemi, Garam Merica menambah ragam lauk-pauknya menjadi 30-32 menu. Tetapi saya ingin katakan, bahwa nasi bungkus menjadi agen terpenting di Garam Merica untuk memperkenalkan masakan Indonesia. Menu ini dihargai 19 dollar Australia, tidak hanya memenuhi Hasrat kerinduan pada kampung halaman bagi orang Indonesia, tetapi nasi bungkus tak jarang dipakai sebagai oleh-oleh warga Australia bagi orang-orang di rumah.



Garam Merica Melbourne dan Sydney, Nasi Bungkus Australia  
Photo Th. 2023

## Apa istimewanya nasi bungkus?

Pertama hampir di setiap wilayah Nusantara mengenal nasi bungkus dengan nama yang berbeda-beda. Di Jawa disebut nasi kucing, di Sunda disebut nasi timbel, di Bali disebut nasi jinggo, nasi docang dan jamblang di Cirebon, nasi kabaka di Padang Panjang, nasi Perang Padri di Pasaman, nasi minyak dari jambi, nasi kuning di ambon, dan seterusnya daftar ini bisa diperpanjang. Kedua, nasi berbungkus daun pisang atau daun jati ini, sangat istimewa karena ditambah menu-menu lokal, tergantung dari daerah masing-masing.

Nasi bungkus adalah teman perjalanan orang Indonesia di dalam melakukan aktivitas sehari-hari

Jadi di dalam nasi bungkus terdapat kekayaan budaya, keragaman kuliner, sanitasi, dan simbol kesiapsiagaan orang Indonesia dalam menghadapi sesuatu yang tak terprediksi

Kekayaan narasi yang terkandung dalam nasi bungkus, sudah pada tempatnya diangkat menjadi bahasa gastrodiplomasi dalam wilayah global. Seperti yang dilakukan oleh Garam Merica di Melbourne, kita bisa melakukan hal serupa di negara-negara lain secara masif dan terstruktur. Pelan-pelan saya yakin, karena kepraktisan, keragaman cita rasa kuliner, dan kekayaan narasinya, nasi bungkus bisa menjadi *agent of cultural* untuk memperkenalkan Indonesia di seluruh dunia.

Jika ini kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus, niscaya dengan nasi bungkus kita mampu menaklukkan lidah dunia. Karena kita percaya bahwa lidah adalah kunci pembuka jalan bagi ekspansi dunia kuliner Indonesia di dunia

## Strategi Memperkenalkan Budaya Kuliner Indonesia

**Indonesia Spice Up The World** adalah kiat agar mengolah masakan Indonesia tetap otentik dengan menggunakan bumbu yang diproduksi di Indonesia menggunakan bahan-bahan terbaik seperti cabe, bawang putih, lengkuas, jahe, kencur, sereh, daun jeruk, daun salam dan hasil rempah yang tumbuh secara alamiah ditanah Indonesia yg sangat subur yg juga berakibat memasak lebih praktis.

## Daftar Pustaka

*Pidato Budaya DKJ by William Wongso , Jakarta Th.2023 ( Gastrodiplomasi Nasi Bungkus untuk Menaklukkan Lidah Dunia )*

# Peluang dan Tantangan Ekspor Rempah Aceh

**T. Satria Wira, SE, MM**

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

## I. PENDAHULUAN

Pada masa dahulu, Aceh terkenal dengan daerah yang memiliki berbagai jenis rempah dengan kualitas yang sangat bagus, kekayaan rempah akan rempah tersebut membuat Aceh menjadi salah satu daerah perdagangan serta menjadi salah satu daerah tujuan untuk disinggahi dari kapal asing yang berlayar di selat malaka, kala itu banyak Saudagar Aceh yang melakukan kegiatan perdagangan rempah dengan negara lain, adapun komoditi yang diperdagangkan antara lain yaitu, cengkeh, pala, pinang, lada, kemiri serta jahe.

Seiring dengan waktu, dengan banyaknya para pedagang asing datang ke Aceh untuk mencari rempah maka hal ini membuat rempah menjadi komoditi andalan untuk perdagangan Aceh pada zaman dahulu, hal ini membuat ekonomi Aceh tumbuh serta menimbulkan banyaknya para pedagang dari Aceh atau yang kala itu biasa disebut dengan nama Saudagar yang melakukan perdagangan bukan hanya di Aceh saja namun melakukan kegiatan ekspor rempah asal Aceh ke berbagai belahan dunia seperti ke China, India, Arab Saudi bahkan hingga ke Turki.

## II. PETA DAN DATA EKSPOR REMPAH ACEH

Guna mengetahui apakah komoditi rempah masih menjadi andalan ekspor Aceh pada saat ini serta kenegara mana saja yang menjadi tujuan ekspor rempah Aceh, maka berdasarkan data dari BPS yang diolah oleh Pusat Data Statistik Informasi, Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan RI diketahui beberapa data ekspor rempah serta komoditas unggulan lainnya dari Aceh, antara lain sebagai berikut :

- Pala

Realisasi Ekspor Komoditas Pala asal Aceh periode tahun 2020 s.d Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 50.126 dengan jumlah volume sebesar

41.968 Kg, adapun negara tujuan ekspor pala pada kurun waktu tersebut adalah negara Vietnam dengan nilai US\$ 46.565 diikuti oleh negara Malaysia dengan nilai ekspor US\$ 3.432 dan negara Amerika Serikat dengan nilai US\$ 129

b. Cengkeh

Realisasi Ekspor Komoditas Cengkeh asal Aceh periode tahun 2020 s.d. Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 1.986.986 dengan jumlah volume sebesar 488.730 Kg, adapun negara tujuan utama ekspor Cengkeh pada kurun waktu tersebut adalah negara India dengan nilai US\$ 1,257.603 diikuti oleh negara Siria dengan nilai ekspor US\$ 138.847 lalu negara Vietnam dengan nilai ekspor US\$ 118.495 serta negara-negara lainnya.

c. Lada.

Realisasi Ekspor Komoditas Lada asal Aceh periode tahun 2020 s.d Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 256.383 dengan jumlah volume sebesar 95.000 Kg, adapun negara tujuan ekspor pala pada kurun waktu tersebut adalah negara India dengan nilai US\$ 208.332 dan negara Amerika Serikat dengan nilai ekspor US\$ 48.050.

d. Kemiri

Realisasi Ekspor Komoditas Kemiri asal Aceh periode tahun 2020 s.d Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 566.003 dengan jumlah volume sebesar 259.300 Kg, adapun negara tujuan ekspor pala pada kurun waktu tersebut adalah negara Malaysia dengan nilai US\$ 429.556 dan negara India dengan nilai ekspor US\$ 136.447.

e. Jahe

Realisasi Ekspor Komoditas Jahe asal Aceh periode tahun 2020 s.d Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 124.502 dengan jumlah volume sebesar 106.021 Kg, adapun negara tujuan ekspor pala pada kurun waktu tersebut adalah negara Pakistan dengan nilai US\$ 124.500 dan negara India dengan nilai ekspor US\$ 2.

f. Pinang

Realisasi Ekspor Komoditas Pinang asal Aceh periode tahun 2020 s.d. Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 62.972.903 dengan jumlah volume sebesar 44.295.535 Kg, adapun negara tujuan utama ekspor Pinang pada kurun waktu tersebut adalah negara Iran dengan nilai US\$ 37.222.894 diikuti oleh negara

Thailand dengan nilai ekspor US\$ 13.741.995 lalu negara Bangladesh dengan nilai ekspor US\$ 4.863.160 serta negara-negara tujuan ekspor pinang lainnya.

g. Essential Oil

Realisasi Ekspor Essential Oil asal Aceh periode tahun 2020 s.d. Agustus 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 8.776.517 dengan jumlah volume sebesar 221.834 Kg, adapun negara tujuan utama ekspor Essential Oil pada kurun waktu tersebut adalah negara India dengan nilai US\$ 3.386.834 diikuti oleh negara Perancis dengan nilai ekspor US\$ 2.203.052 lalu negara Spanyol dengan nilai ekspor US\$ 835.879 serta negara-negara tujuan ekspor Essential Oil lainnya.

h. Kelapa

Realisasi Ekspor komoditas Kelapa asal Aceh periode tahun 2020 s.d. Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 57.687 dengan jumlah volume sebesar 200.500 Kg, adapun negara tujuan ekspor Komoditas Kelapa pada kurun waktu tersebut adalah negara Thailand dengan nilai US\$ 44.870 diikuti oleh negara Malaysia dengan nilai ekspor US\$ 9.873 lalu negara Singapura dengan nilai ekspor US\$ 2.940.

i. Tepung Kelapa

Realisasi Ekspor komoditas Tepung Kelapa asal Aceh periode tahun 2020 s.d. Juli 2023 diekspor dengan jumlah nilai sebesar US\$ 6.301.125 dengan jumlah volume sebesar 3.742.500 Kg, adapun negara tujuan ekspor Komoditas Tepung Kelapa pada kurun waktu tersebut adalah negara Thailand dengan nilai US\$ 3.792.305 diikuti oleh negara Korea Selatan dengan nilai ekspor US\$ 1.053.495 lalu negara Portugal dengan nilai ekspor US\$ 343.980.

### III. PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR REMPAH ACEH

a. Peluang Ekspor Aceh

- Aceh memiliki Komoditas Rempah serta mempunyai History Perdagangan Rempah Ekspor Rempah
- Permintaan Rempah Dunia diprediksi mengalami peningkatan antara 3% s.d. 5% dari tahun 2022 s.d. tahun 2028
- Perubahan Gaya Hidup pasca Pandemi mengakibatkan konsumen lebih

banyak mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung rempah-rempah yang berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh.

- Ketakutan akan kelangkaan Produk mengakibatkan peningkatan permintaan termasuk komoditas rempah-rempah.

### **b. Tantangan Ekspor Aceh**

- Nilai ekspor rempah Aceh masih rendah
- Masih minimnya jumlah eksportir di Aceh
- Kualitas Rempah Aceh masih dibawah Standart Ekspor yang disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan pemrosesan Pasca Panen oleh Para Petani.
- Penolakan dari negara importir melalui penerapan Standar Mutu yang tinggi serta penerapan Sertifikasi Produk
- Pengetatan Impor dari negara importir khususnya kawasan Uni Eropa melalui penerapan prosedur dan regulasi Kesehatan terhadap Bahan Makanan dan Minuman.

## **IV. STRATEGI PENETRASI PASAR EKSPOR**

1. Konsistensi Kualitas dan Kontinuitas ekspor produk
2. Memiliki Sertifikat Traceability yang dikembangkan oleh organisasi sertifikasi
3. Melakukan kolaborasi stakeholders yaitu dengan Pemerintah, Asosiasi, UKM, mitra di negara tujuan maupun dengan diaspora di luar negeri.
4. Investasi untuk memperbaiki pemrosesasn pasca panen, kualitas dan kebersihan komoditas rempah dapat memberikan nilai tambah dan harga premium.
5. Melakukan riset pasar untuk mengenali pasar yang dituju baik itu saluran distribusi, regulasi maupun persaingan yang terdapat pada pasar tersebut.
6. Tingkatkan Komunikasi dan Profesionalisme Perusahaan dengan calon buyer di luar negeri
- 7 Aktif mengikuti pameran makanan dan minuman di Luar Negeri
8. Mengikuti dan mempelajari tren produk baik dalam bentuk kemasan maupun produk akhir rempah-rempah.





